

SANITASI MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA

April 2007

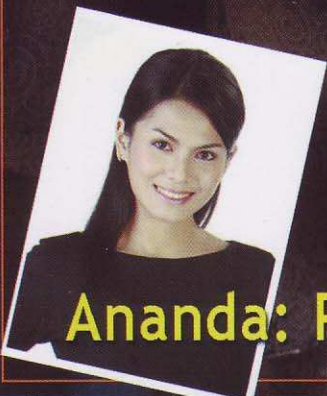
Percik

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan



ISU GENDER

dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi



Ananda: Prihatin terhadap Kelangkaan Air

Daftar ISI

Percik

Media Informasi Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan

Diterbitkan oleh:

Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL)

Penasihat/Pelindung:

Direktur Jenderal Cipta Karya
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Penanggung Jawab:

Direktur Permukiman dan Perumahan,
BAPPENAS

Direktur Penyehatan Lingkungan,
DEPKES

Direktur Pengembangan Air Minum,
Dep. Pekerjaan Umum

Direktur Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman,
Dep. Pekerjaan Umum

Direktur Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna, DEPDAAGRI

Direktur Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup, DEPDAAGRI

Pemimpin Redaksi:

Oswar Mungkasa

Dewan Redaksi:

Supriyanto, Johan Susmono,
Indar Parawansa, Bambang Purwanto

Redaktur Pelaksana:

Maraita Listyasari, Rewang Budiayana,
Rheidida Pramudhy, Joko Wartono,
Essy Asiah, Bowo Leksono

Desain/Illustrasi:

Rudi Kosasih

Produksi:

Machrudin

Sirkulasi/Distribusi:

Agus Syuhada

Alamat Redaksi:

Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat.

Telp./Faks.: (021) 31904113

<http://www.ampl.or.id>

e-mail: redaksipercik@yahoo.com

redaksi@ampl.or.id

oswar@bappenas.go.id

Redaksi menerima kiriman
tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan
dengan air minum dan penyehatan lingkungan
dan belum pernah dipublikasikan.

Panjang naskah tak dibatasi.

Sertakan identitas diri.

Redaksi berhak mengeditnya.

Silahkan kirim ke alamat di atas.

Dari Redaksi	1
Suara Anda	2
Laporan Utama	
Isu Gender dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	3
Implementasi Gender dalam Proyek AMPL di Indonesia	7
Wawancara	
Deputi Pengarusutamaan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	9
Peraturan	
Dana Alokasi Khusus Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	11
Wawasan	
Mengapa CLTS Berhasil?	13
Apapun Sumber Dananya, yang Penting Perencanaannya	18
Limbah Bukan Lawan tapi Kawan	20
Metode Balanced Scorecard	22
Inspirasi	
Kerelaan Tatung-Azizah Mengelola Jaringan Air Warga	25
Tamu Kita	
Ananda: Prihatin terhadap Kelangkaan Air	26
Inovasi	
Lubang Resapan Biopori	28
Opini	
Pendampingan Pascaproyek, Siapa Berminat?	30
Seputar Plan Indonesia	
Togo-togo Butuh Pionir Baru	31
Seputar ISSDP	
Lokakarya Sanitasi di Blitar Hasilkan Deklarasi	32
Seputar WASPOLA	34
Seputar AMPL	39
Program	42
Air untuk Kesehatan Lingkungan dan Manusia	45
Abstraksi	47
Klinik IATPI	48
Info Buku	49
Info Situs	50
Info CD	51
Pustaka AMPL	52

■ Majalah *Percik* dapat diakses di situs AMPL: <http://www.ampl.or.id> ■

Majalah *Percik* edisi April 2007 ini diterbitkan atas kerja sama antara POKJA AMPL dan Plan Indonesia

Tak terasa kita sudah menapaki bulan kelima di tahun 2007. Selama itu pula kita tak bersemuka. Kini kami kembali menyapa pembaca setia **Percik** dengan tetap mengusung semangat "cinta air dan cinta lingkungan".

Banyak hal yang harus kami benahi. Penyesuaian rubrik, pengumpulan data, hingga pembenahan intern. Dan didedikasikan 17 ini, kami kembali menyampaikan berbagai informasi seputar air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL).

Dalam empat bulan terakhir, banyak peristiwa dan kegiatan berkaitan dengan air dan penyehatan lingkungan. Peristiwa dan kegiatan tersebut telah kami rangkum dan kami hadirkan di hadapan pembaca setia semua.

Tepat 22 Maret 2007 lalu, Hari Air Sedunia diperingati. Sudah lebih dari 10 tahun sejak sidang umum PBB menetapkan pelaksanaan Hari Air Sedunia setiap 22 Maret mulai 1993. Bukan tanpa alasan ada penetapan hari air yang setiap tahun diperingati negara-negara seluruh dunia. Bukankah air terus menjadi persoalan kompleks yang melanda banyak negara, terutama negara-negara miskin? Dan tak disangkal lagi, air memang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Karena itu, edisi kali ini, membahas seputar Hari Air Sedunia. Tentang sejarah dan berbagai kegiatan yang digelar masyarakat Indonesia dalam menyambutnya. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, mahasiswa, hingga masyarakat biasa. Kegairahan ini menunjukkan keinginan semua pihak agar terhindar dari kelangkaan air.

Hari Air Sedunia tahun ini memetik tema Menanggulangi Kelangkaan Air (*Coping with Scarcity*). Sangat tepat, karena semakin tahun kelangkaan air sebagai kebutuhan seluruh umat manusia, semakin terasa.

Di banyak daerah di Indonesia, baik di perdesaan atau bahkan di perkotaan, akses terhadap air minum masih terus menjadi masalah utama, apalagi bagi



Pemasangan spanduk oleh KRUHA (Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air) dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia.

masyarakat miskin. Dan yang paling merasa menderita adalah kaum perempuan.

Sudah saatnya perempuan berperan aktif menjadi penentu kebijakan berkaitan dengan pengadaan air minum dan penyehatan lingkungan. Tak hanya itu, semua pihak juga sudah seharusnya menyadari pentingnya keterlibatan peran perempuan.

Bicara perempuan, sekedar mengingatkan, bila di bulan April tepatnya 21 April, pernah lahir seorang pejuang perempuan, Raden Ajeng Kartini. Tampaknya di zaman ini, dibutuhkan pejuang-pejuang perempuan sebagai penyelamat keluarga dari kelangkaan air.

Laporan utama kali ini tentang isu gender. Penjelasan sejarah, definisi, dan pengarusutamaan gender, diharapkan dapat memberi pencerahan bagi kita semua. Untuk membumikan isu gender, maka Kami mencoba mengorek seberapa jauh proyek-proyek seperti ProAir, Sanimas, WSLIC-2, dan

Promkes telah memberi porsi terhadap peran perempuan. Tentunya gambaran tentang gender menjadi lengkap dengan adanya wawancara eksklusif bersama Dr. Surjadi Soeparman, MPH, Deputy Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Satu rubrik yang akan terus dihadirkan adalah "Tamukita". Mengangkat selebritis atau *public figure* yang telah lama dan berkompeten seputar air minum dan lingkungan hidup. Kita bisa bersama belajar dari pengalaman mereka.

Masih banyak lagi bahasan dan informasi yang ditampilkan di majalah yang diterbitkan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) ini. Namun berbeda dengan edisi terdahulu, **Percik** Yuniorkali ini diterbitkan secara terpisah dan langsung didistribusikan ke sekolah. Kritik dan saran tetap dinantikan demi kemajuan majalah kita bersama. Akhir kata, selamat membaca. ■

Gagasan Tanggap Bencana

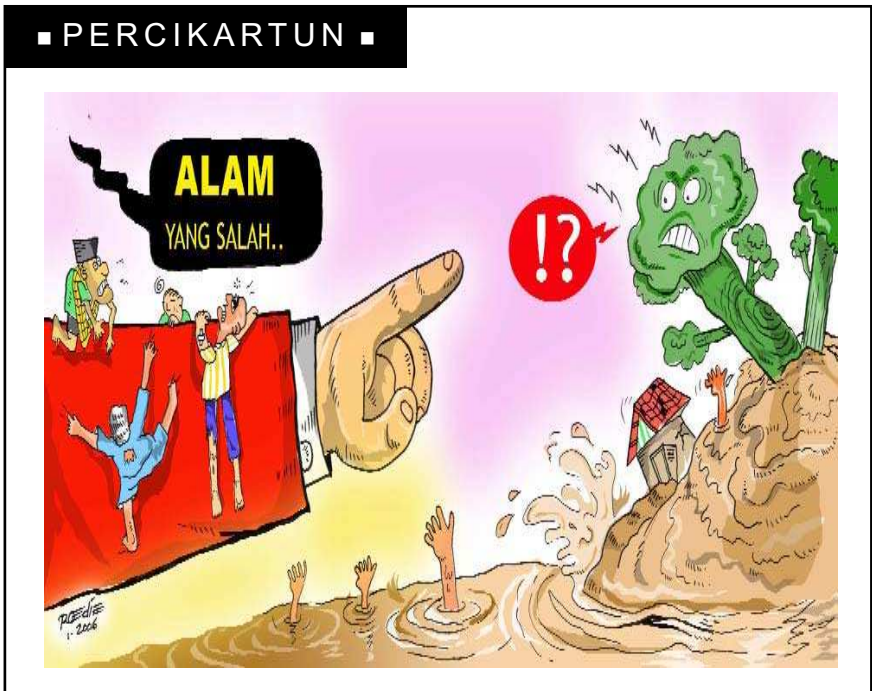
Memperhatikan bencana banjir yang terjadi di Jakarta pada awal Februari 2007, kami ingin menyampaikan gagasan preventif sebagai berikut :

1. Latar Belakang

- a. Pembangunan perumahan sangat sulit dicegah apalagi kota yang menarik dari berbagai aspek seperti Jakarta maupun daerah urban/sub urban Depok dan Bogor.
- b. Relokasi permukiman warga di pinggir kali juga sangat sulit dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan.
- c. Regulasi sumur resapan sudah diterapkan, namun dalam praktiknya warga membuat tapi kapasitas tidak mencukupi, tidak pernah dipelihara, dan hanya berorientasi pada konservasi air tanah dangkal sehingga masih terjadi banjir karena sumur resapan tidak berfungsi optimal.
- d. Beban ekonomi masyarakat saat ini khususnya yang bertempat tinggal di wilayah berpotensi banjir sangat berat.

2. Usulan

- a. Dengan pertimbangan anggaran yang cukup, baik dari APBN maupun APBD DKI Jakarta, masalah sumur resapan sebaiknya diambil alih Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- b. Dalam pembuatan sumur resapan harus komunal, mempunyai kapasitas yang besar, dapat dipelihara, berkelanjutan, dan berorientasi pada konservasi air tanah dalam.
- c. Sebagai *pilot project* Jakarta sebaiknya mengembangkan sumur resapan dengan menggunakan konstruksi sumur dalam 80-100 meter, seperti sumur bor untuk pengambilan air bawah tanah untuk air minum. Sehingga apabila terjadi penyumbatan dapat di *flash-*



- ing* dan digunakan kembali.
 - d. Dengan mengacu pada penyedotan air minum, dimana satu sumur bor dapat mensuplai debit 20-40 liter/detik, maka sumur resapan dengan konstruksi yang sama akan mampu menyerap air 20-40 liter/detik.
 - e. Untuk memelihara dan mencegah penyumbatan yang cepat, sebelum air dimasukkan ke dalam sumur resapan air dari saluran drainase dilewatkan dulu pada bangunan penangkap pasir/kerikil termasuk kotoran yang lain yang dapat ditangkap.
 - f. Uji coba dapat dilaksanakan dengan memerintahkan kepada semua hotel-hotel berbintang yang ada atau bangunan-bangunan komersial yang besar.
 - g. Agar lebih aplikatif dapat diadakan uji akademik dan penelitian terlebih dahulu.
 - h. Apabila Jakarta berhasil, maka dapat ditiru provinsi/kabupaten lain di Indonesia.
- Demikian usulan kami, atas perha-

tiannya diucapkan terima kasih.
Bambang Widiyoko
 Staf Dinas Kimpraswilhub
 Kabupaten Sleman

Mohon Dikirim Percik

Perkenalkan nama saya Joko Sutrisno, guru di SMA 1 Karangmojo Gunungkidul D.I. Yogyakarta 55891.
 Selanjutnya, suatu ketika saya pernah baca majalah **Percik**, saya tertarik isinya karena masalah lingkungan menjadi topik yang perlu segera dipikirkan secara serius. Untuk itu kiranya berkenan, saya mohon untuk dikirim majalah **Percik** setiap kali majalah **Percik** terbit.
 Pertama untuk menambah wawasan saya tentang lingkungan, kedua dan seterusnya untuk dapat ikut memberikan saran-saran kepada lingkungan saya berada atau cakupan yang lebih luas yaitu Pemkab kami Gunungkidul. Terima kasih atas perhatiannya.
Joko Sutrisno, S.Pd., M.T.
 SMA 1 Karangmojo, Gunungkidul,
 Yogyakarta 55891

Isu GENDER dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Setiap manusia, tidak terkecuali perempuan dan laki-laki, membutuhkan air setiap hari untuk berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan air di setiap keluarga, khususnya di perdesaan, perempuan mempunyai peran dominan, mulai dari mengambil air, memasak, memandikan anak, mencuci, dan menyiram tanaman. Namun laki-laki memegang kendali dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan air minum dan sanitasi.

Kondisi ini kemudian menyebabkan timbulnya ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Fasilitas yang dibangun sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan terutama terkait dengan kebutuhan perempuan yang *nota bene* merupakan pengguna air dominan, baik dari segi proporsi jumlah penduduk maupun peran penggunaan air.

Beberapa dasawarsa terakhir, mulai timbul kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan kepentingan perempuan dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Isu ini kemudian banyak dikenal sebagai isu gender.

Salah Kaprah Gender

Pemahaman gender sebagai jenis kelamin perempuan banyak terjadi di sekeliling kita. Bukan sesuatu yang aneh ketika kita mendengar seseorang dalam sebuah pertemuan mengajukan pernyataan seperti "Kok laki-laki semua ya?. Mana gendernya?". Bahkan tidak jarang kita menemukan studi tentang gender yang semua tenaga ahlinya perempuan. Alasannya sederhana bahwa "Biar hasil

studinya tidak bias gender". Jadi gender diterjemahkan hanya sebagai jenis kelamin perempuan.

Apa itu Gender?

Jika melacak ke belakang, kata gender muncul terutama dalam khasanah akademik di akhir abad 20. Penggunaan pertamakali kata gender terlacak pada tahun 1976 ketika dilaksanakan Lokakarya

Subordinasi Perempuan di University of Sussex. Para ahli pada pertemuan tersebut menyatakan bahwa perempuan, seperti juga pria, adalah perbedaan biologis, sementara subordinasi perempuan adalah tercipta secara sosial dan bukan ditentukan secara biologis. Mereka lebih lanjut menegaskan bahwa untuk membedakan secara konseptual dari kenyataan ini maka diperlukan untuk mengidentifikasi 'sex' seba-

Evolusi Pendekatan Gender

Sampai awal 1970-an, kebijakan pembangunan terfokus pada pemenuhan kebutuhan perempuan miskin dalam konteks sebagai istri dan ibu. Sekarang ini dikenal sebagai pendekatan kesejahteraan, dengan pusat perhatiannya adalah kesehatan ibu dan anak, dan nutrisi. Diasumsikan bahwa keuntungan dari orientasi strategi ekonomi makro akan memercik ke penduduk miskin dan perempuan miskin akan mendapatkan manfaat dari perbaikan kondisi kesejahteraan suaminya. Perempuan adalah penerima manfaat secara pasif. Layanan air dan sanitasi didefinisikan dalam konteks kesehatan dan higienitas, yang dipandang sebagai tanggungjawab perempuan.

Dalam periode 1970-1980, pendekatan perempuan dalam pembangunan (*Women in Development/WID*) ditujukan untuk menyatukan perempuan kedalam proses pembangunan dengan menjadikan mereka sebagai target, bahkan dalam bentuk kegiatan khusus perempuan. Perempuan tetap sebagai penerima manfaat secara pasif dalam pendekatan ini. Meskipun banyak proyek WID meningkatkan kesehatan, pendapatan atau sumber daya dalam jangka

pendek, tetapi perempuan tidak mendapat perlakuan yang setara, bahkan banyak kegiatan yang tidak berkelanjutan. Kelemahan utama proyek WID adalah tidak mempertimbangkan peran perempuan yang beragam atau salah menghitung elastisitas ketersediaan waktu perempuan.

Sejak akhir 1980-an, pendekatan Gender dan Pembangunan (*Gender and Development/GAD*) diperkenalkan dengan sasaran menghilangkan disparitas sosial, ekonomi dan keseimbangan politik antara perempuan dan laki-laki sebagai persyaratan untuk mencapai pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Sebagian besar kegiatan di bidang air dan sanitasi saat ini menggunakan pendekatan ini. Walaupun demikian, terdapat banyak cara pandang dalam pendekatan ini dan belum tersedia satu cetak biru untuk memungkinkan kesejahteraan dalam penyediaan air.

Baik pendekatan WID dan GAD masih dipergunakan sampai saat ini

Beberapa tahun terakhir, pendekatan gender dan pemberdayaan (*gender and empowerment*) telah berusaha merubah hubungan gender saat ini melalui penekanan pada pemberdayaan perempuan. ■

FOTO:DOK/CWSH



Kemudian apa yang dimaksud dengan Analisis Gender?

Analisis gender mengacu pada cara sistematis memandang perbedaan dampak pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki. Analisis gender mensyaratkan pemilahan data berdasar jenis kelamin. Analisis gender harus dilaksanakan di tiap tingkatan proses pembangunan, untuk kemudian mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan, keputusan, rencana tertentu mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda.

Mengapa Gender Penting dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Terdapat beberapa fakta penting yang menjadikan alasan pentingnya mengangkat isu gender diantaranya (i) kaum perempuan merupakan kolektor, pengangkut, pengguna dan pengelola utama air untuk keperluan rumah tangga dan sebagai promotor dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan air dan sanitasi (ii) manfaat yang lebih besar dari sekedar kemampuan proyek untuk menyediakan air dan sanitasi yang baik antara lain berupa

○ *Manfaat ekonomi*: Akses yang lebih

gai perbedaan biologis antara perempuan dan pria, dan 'gender' pembedaan antara maskulinitas dan feminitas yang terbangun sebagian besar melalui pendidikan dan sosialisasi. Faktor biologis tetap dan tak dapat dirubah, tetapi faktor sosial dapat dirubah.

Sehingga gender kemudian mengacu pada perbedaan peran, hak, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dan hubungan diantara keduanya. Gender tidak sekedar mengacu pada perempuan atau laki-laki, tetapi terhadap bagaimana kualitas, perilaku dan identitas ditentukan melalui proses sosialisasi. Gender umumnya dikaitkan dengan ketidaksetaraan kekuasaan dan akses terhadap pilihan dan sumber daya. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh kenyataan sejarah, agama, ekonomi dan budaya. Keseluruhan peran ini dan tanggung jawabnya dapat berubah seiring waktu.

Pada penggunaan istilah gender terkini, gender telah digunakan layaknya seperti kelas, etnis, suku, untuk menjelaskan analisis kategori sosial dalam interaksi antarfaktor sosial.

Sederhananya, seharusnya gender

bukan tentang perempuan tetapi lebih pada kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Pada satu kesempatan, mungkin masalahnya adalah peran perempuan tetapi tidak tertutup kemungkinan dilain kesempatan peran laki-laki yang menjadi isu.

■ Keterkaitan Gender ■

Gender dan pendidikan – Lebih banyak anak perempuan bersekolah ketika ketersediaan air minum meningkat dan ketika tersedia fasilitas jamban yang terpisah bagi anak laki dan perempuan.

Gender dan kesehatan – peningkatan kesehatan menguntungkan perempuan secara langsung (termasuk kesehatan melahirkan), dan akibatnya higienitas rumah tangga membaik.

Gender dan pekerjaan rumah tangga – peningkatan ketersediaan air mengurangi beban kerja rumah tangga dan memberikan perempuan lebih banyak waktu bersama anak-anak dan kegiatan ekonomi.

Gender dan pendapatan – peningkatan ketersediaan air dan mengurangi beban penyakit mengakibatkan lebih banyak waktu bagi perempuan untuk bekerja.

Gender dan budaya – peningkatan ketersediaan air dan fasilitas sanitasi memperbaiki kehormatan, status dan kesempatan perempuan. ■

baik pada air akan memberi kaum perempuan waktu yang lebih banyak untuk melakukan aktivitas mendatangkan pendapatan, menjawab kebutuhan anggota keluarga, atau memberikan kesejahteraan dan waktu luang untuk kesenangan mereka sendiri. Perekonomian, secara keseluruhan, dapat pula memberikan berbagai manfaat.

- *Manfaat kepada anak-anak:* Terlepas dari pekerjaan mengumpulkan dan mengelola air yang memakan waktu dapat membuat anak-anak, khususnya anak perempuan untuk bersekolah. Oleh sebab itu, dampaknya diharapkan dapat mencapai antargenerasi.
- *Pemberdayaan terhadap kaum perempuan:* Keterlibatan dalam proyek-proyek penyediaan air dan sanitasi akan memberdayakan kaum perempuan, khususnya apabila kegiatan proyek tersebut dihubungkan dengan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pendapatan dan sumber daya produktif seperti kredit.

Salah satu bukti empiris pentingnya partisipasi perempuan dalam penyediaan air minum yang selalu dijadikan referensi adalah hasil analisis terhadap 121 proyek air minum perdesaan Bank Dunia. Berdasar hasil analisis ternyata bahwa partisipasi wanita meningkatkan keefektifan proyek dalam bentuk desain, implementasi, operasi dan pemeliharaan, dan kehandalan sistem.

Jejak Gender dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Pada pertemuan tingkat dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*The World Summit on Sustainable Development*) September 2002, pemimpin dunia bersepakat untuk memajukan pendekatan gender kedalam kebijakan dan praktek pengelolaan air internasional. Kesepakatan ini dituangkan dalam



FOTO:PRO AIR

■ Tahukah Anda? ■

- Perempuan Afrika dan Asia berjalan rata-rata 6 km untuk mengambil air. Sementara perempuan India menghabiskan rata-rata 2,2 jam per hari.
- Ketika fasilitas sanitasi memadai bagi anak perempuan, tingkat kehadiran meningkat. Di Pakistan, lebih dari 50 persen dari anak perempuan yang putus sekolah disebabkan tidak tersedianya fasilitas jamban di sekolah. Di Bangladesh, penyediaan air dan fasilitas sanitasi meningkatkan kehadiran anak perempuan sebesar 15 persen.
- Di Tajikistan, anak perempuan memilih tidak hadir di sekolah ketika sedang datang bulan, sebagai akibat tidak tersedianya fasilitas jamban. ■

Deklarasi Politik (Prinsip 18) yaitu "Kami bersepakat untuk memastikan bahwa pemberdayaan perempuan dan emansipasi dan kesetaraan gender dipadukan kedalam seluruh kegiatan yang disepakati dalam Agenda 21, dan *Millennium Development Goals* (MDGs)".

Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dibuat dalam Konferensi Tingkat Menteri 2001 di Bonn, Jerman, bahwa "pengelolaan air seharusnya didasarkan pada pendekatan partisipatif. Baik laki-laki dan perempuan terlibat dan mempunyai kese-

taraan dalam pengelolaan penggunaan air berkelanjutan dan dalam memperoleh manfaat. Peran perempuan perlu ditingkatkan dan partisipasinya diperluas". Pada Forum Air Dunia II (*2nd World Water Forum*) di Hague tahun 2000, baik tujuan efisiensi dan kesetaraan dipromosikan melalui penggunaan pendekatan gender.

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah proses mengukur implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap kegiatan

yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan dan program di semua tingkatan. Ini merupakan strategi untuk menjadikan kepedulian yang sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan penyusunan, implementasi, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan dan program di segala aspek. Singkatnya, pengarusutamaan gender diartikan sebagai cara untuk memastikan bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki terwujud baik dalam perencanaan, operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan program dan proyek.

Dalam penyediaan air minum dan sanitasi, pendekatan berbasis masyarakat sering mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan efisiensi dan keberlanjutan program dikarenakan komunitas dipandang sebagai sekumpulan penduduk dengan kebutuhan yang sama tanpa membedakan perempuan atau laki-laki.

Pada kenyataannya, komunitas bukan merupakan kumpulan penduduk dengan karakteristik dan keinginan yang seragam. Komunitas terdiri dari beragam kelompok yang saling bersaing. Ketika sumber daya terbatas maka terjadi persaingan dan sebagaimana biasa penduduk miskin terabaikan khususnya perempuan. Penerapan analisis gender akan membantu pengambil keputusan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik tanpa merugikan kelompok marjinal.

Ketika disepakati bahwa keterlibatan perempuan merupakan faktor kritis dalam memastikan tercapainya efisiensi dan keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi, pengarusutamaan gender menjadi jalan keluarnya. Tentu saja pengarusutamaan gender dalam penyediaan air minum dan sanitasi akan memerlukan langkah strategis, diantaranya berupa (i) penyiapan data yang mendukung analisis gender berupa pemisahan data perempuan dan laki-laki; (ii) mendorong keterlibatan pe-

empuan dalam pengambilan keputusan, diantaranya dengan membuat jadwal kegiatan yang membuat perempuan dapat terlibat; (iii) mendorong kerjasama strategis antara Organisasi Berbasis Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan komunitas dan pemerintah daerah dalam penyediaan AMPL dan mendukung pengembangan usaha kecil; (iv) meningkatkan kapasitas para profesional untuk mengarusutamakan gender; (v) keterlibatan swasta dalam penyediaan AMPL perlu mempertimbangkan aspek gender.

FOTO:PRO AIR



Bagaimana Isu Gender Diterjemahkan dalam Kebijakan

Pada banyak negara, kebijakan nasional penyediaan air minum dan sanitasi sebagian besar telah menyebut pentingnya peran wanita dan lebih rinci lagi pembagian tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, walaupun jarang ditemukan fokus gender yang lengkap. Di Uganda, Strategi Gender Sektor Air Minum telah diperkenalkan sejak tahun 2003 yang menegaskan keterlibatan perempuan pada seluruh ting-

katan pengelolaan air minum. Contoh lainnya yang relatif lebih rinci seperti di Lesotho dan Afrika Selatan yang mengatur proporsi tertentu staf perempuan. Di Republik Dominika, Otoritas Air Minum mempersyaratkan setidaknya 40 persen dari komite air minum harus perempuan.

Di Indonesia sendiri, isu gender telah diadopsi dalam salah satu prinsip dasar Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Dibahasakan sebagai peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian prinsip dasar ini diterjemahkan oleh masing-masing pengelola proyek AMPL di Indonesia (WSLIC 2, CWSH, Sanimas, Pro Air dan lain-lain). Bentuk implementasi dari prinsip ini akan berbeda di setiap proyek (selengkapnya lihat tulisan Implementasi Gender dalam Proyek AMPL di Indonesia). Ada yang secara jelas mensyaratkan proporsi keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, sementara lainnya hanya mensyaratkan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan. Belum terlihat secara jelas bagaimana konsep gender ini akan diterapkan di dalam kegiatan penyediaan AMPL di Indonesia.

Pekerjaan Rumah yang Tersisa

Ketika pemahaman konsep gender telah dipahami dengan benar, ketika konsep gender telah dituangkan dalam kebijakan pemerintah, ketika konsep gender telah dicoba diimplementasikan dalam kegiatan penyediaan AMPL, dan banyak ketika yang lain, maka pertanyaan yang menyeruak adalah apakah konsep gender dalam penyediaan AMPL di Indonesia sudah dalam jalur yang benar?. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana mengukurnya? Ini menjadi tugas kita bersama, baik perempuan maupun laki-laki. ■ (OM)

Implementasi Gender dalam Proyek AMPL di Indonesia

FOTO:PRO AIR



Bicara kesetaraan gender seperti tak ada habisnya. Di satu tempat ada kemajuan sementara di tempat lain masih ada praktek pemarginalan peran perempuan.

Pada hakekatnya baik secara tersirat maupun dalam implementasinya, proyek-proyek AMPL di Indonesia telah mencoba mengimplementasikan prinsip gender.

Proair atau program air yang merupakan proyek hibah Pemerintah Jerman telah menekankan secara tersirat salah satu prinsip dasarnya adalah berorientasi pada gender.

Sekretaris Eksekutif Proair Ir. Deni Mulyana, M.Kes menekankan perem-

puan memiliki peran sentral dalam penyediaan, pengelolaan dan perlindungan air. "Oleh sebab itu, perempuan harus dilibatkan dalam segala pembuatan keputusan yang mempengaruhi penggunaan air," tegasnya.

Proyek Proair ini mengacu pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) bahwa perempuan mempunyai peran dalam pengambilan keputusan.

Salah satu fokus dari proyek WSLIC-2

(*Water and Sanitation for Low Income Communities*) adalah gender dan kemiskinan. Melalui proyek ini diperlukan upaya menggugah dan menggali peran perempuan dan masyarakat miskin untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat dan dalam pengambilan keputusan.

Tidak berbeda dengan CWSH (*Community Water Services and Health Project*) yang menjadikan pendekatan gender sebagai salah satu karakter dari proyek. CWSH menempatkan kaum perempuan sebagai posisi kunci untuk fasilitator yang diharapkan keterlibatannya disetiap level.

Sementara pada proyek Sanimas memang tidak secara khusus menerapkan pendekatan gender. Tapi pada kenyataan di lapangan, perempuan banyak terlibat dalam setiap tahapan proses pemberdayaan Sanimas seperti tenaga fasilitator dan pengambil keputusan.

Dra. Pimanih, M.Kes, Staf Perencanaan dan Keuangan Proyek CWSH, mengatakan peran penting perempuan, karena mereka selalu berhubungan dengan air mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali dalam hal menyediakan air untuk minum, memasak, mandi dan mencuci. "Dalam keseharian perempuan tidak terlepas dari air sebagai salah satu kebutuhan rumah tangga karena sudah dianggap kodratnya," jelasnya.

Sementara menurut CPMU WSLIC-2 Imam Syahbandi, perempuan berperan besar dalam kesinambungan kegiatan sehingga mereka penting menentukan pilihan teknis sarana yang dibangun agar sesuai kebutuhan perempuan dan laki-laki. "Perempuan juga penting untuk ikut dalam penentuan aturan dan sanksi penggunaan dan pemeliharaan air serta

pembayaran iuran operasional dan pemeliharaan," tuturnya.

Kesetaraan Peran

Sebenarnya sudah adilkah peran antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi? Karena tak hanya di perdesaan saja perempuan masih dianggap orang rumah-an. Di wilayah perkotaan pun perbedaan status sosial dan budaya masih terasa.

Dalam penelitian Proair ditahun 2004 tentang pengetahuan, sikap dan praktek dalam pemakaian/pengolahan air khususnya terhadap kaum perempuan, hasilnya kaum perempuan banyak terlibat dalam mengambil air khususnya bagi mereka kalangan ekonomi lemah. Bagi kaum perempuan dengan tingkat ekonomi lebih baik, yang mengambil air adalah anak-anak dan itu adalah anak perempuan.

Dari yang mengambil air, 27 persen anak perempuan, 41 persen perempuan dewasa dan sisanya kaum laki-laki. Sedangkan dari status, baik kaum kaya, sedang dan rendah tetap kaum perempuan yang berperan mengambil air.

Menurut Pimanih atau yang akrab disapa Upi, memaparkan masih terjadi ketidaksetaraan kaum seperti pada pertemuan untuk mengambil keputusan rencana pembangunan sarana air minum. Kaum laki-lakilah yang kerap diundang karena dianggap mereka lebih mengetahui dan mampu mengerjakannya.

"Sementara perempuan dianggap tidak mengetahui tentang pembangunan tepatnya hanya untuk mengurus anak dan rumah tangga," ujar Upi.

Emah, staf Dep. PU yang sehari-hari menangani Sanimas, menganggap untuk memperoleh air tidak perlu diperdebatkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban siapa karena kebutuhan dasar adalah milik semua orang. Akan tetapi, menurut Deni, peran yang disediakan untuk perempuan terkadang kurang dimanfaatkan sehingga perempuan yang hendak terlibat masih ada perasaan khawatir bahwa ini bukan porsi perempuan atau khawatir berbuat salah karena

Keterlibatan perempuan di CWSH bisa dilihat dalam musyawarah, workshop, diskusi kelompok. Perempuan diminta pendapatnya dalam proses, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan perawatan.

selama ini peran itu ada pada kaum laki-laki. Dan pandangan ini yang menjadikan tetap adanya rasa ketidakadilan.

Menurut Emah, perempuan harus berperan aktif disetiap tahap pembangunan dimanapun berada sejauh dia mampu dan diberi kesempatan. "Tanpa perlu memilih-milih peran karena pada kenyataannya perempuan bisa dan mampu melakukan dan berperan sebagai apa saja," ujar perempuan yang bekerja sebagai staf Subdit Air Limbah Direktorat Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Untuk pemenuhan kebutuhan air, lanjut Emah, seharusnya perempuan menjadi pihak pertama yang diutamakan masukan/pendapat maupun kebutuhannya, karena perempuan yang berfungsi sebagai ibu rumah tangga masih menjadi faktor utama penentu keberhasilan sebuah keluarga. "Jika ingin generasi penerus yang berkualitas, yang pertama harus dilakukan adalah mendidik perempuan-perempuan menjadi ibu yang pintar dan cerdas," ujarnya.

Usaha dan Konsep Keterlibatan Perempuan

Cara pelibatan perempuan dalam pembangunan Sanimas adalah dengan melibatkan mereka dalam setiap kesempatan tahapan proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perempuan yang terlibat disetiap pembangunan Sanimas di hampir semua tempat.

Dalam proyek WSLIC-2 proses pelibatan dengan jalan penetapan *quota*

keterwakilan perempuan dalam setiap langkah kegiatan dan kepengurusan kelembagaan masyarakat (minimal 30 persen perempuan), rekrutmen staf, dan mengadakan berbagai pelatihan gender dan advokasi gender kepada *stakeholder* untuk mensosialisasikan dan mendukung implementasi pendekatan gender.

Keterlibatan perempuan di CWSH bisa dilihat dalam musyawarah, *workshop*, diskusi kelompok. Perempuan diminta pendapatnya dalam proses, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan perawatan.

Sudah sejak awal ada dukungan dan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan air minum dan sanitasi di proyek Proair sehingga tinggal mengikuti aturan yang ada dari kegiatannya. "Semuanya kembali pada kaum perempuan. Apakah mau terlibat atau tidak, atau dapat memanfaatkan kesempatan ini," kata Deni.

Saat ini, pemberdayaan dan peran perempuan dikegiatan Proair baru pada tahap keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam setiap langkah. Masih dibutuhkan peran yang lebih mendalam lagi.

Imam memaparkan upaya WSLIC-2 dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan peran perempuan saat ini pada konsep "partisipasi perempuan" yang berpegang pada prinsip "kesetaraan", karena memang belum dilakukan upaya-upaya khusus penguatan untuk perempuan. Masih pada keterlibatan disetiap kegiatan dan bergeser pada pengambilan keputusan.

"Kedepan, pada proyek-proyek yang menggunakan pendekatan gender dalam implementasinya selain mengeluarkan kebijakan tentang *quota*, *staffing*, peran perempuan dalam setiap langkah kegiatan juga perlu dirancang sejak persiapan proyek untuk penguatan perempuan dalam peran pembangunan," paparnya.

Apapun jika pemberdayaan masyarakat benar-benar diterapkan, maka perempuan akan terlibat dengan aktif dan suaranya akan didengar. Semua ini perlu kesadaran dan kedewasaan bersama. ■

Bowo Leksono

Dr. Surjadi Soeparman, MPH

(Deputi Pengarusutamaan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan)

KAUM PEREMPUAN PALING PEDULI

Kaum perempuan kerap masih dianggap "orang rumahan" yang hanya berhak mengurus rumah tangga belaka. Sementara kaum laki-laki bebas berpendapat dan menentukan langkahnya. Tak jarang keinginan perempuan yang sejatinya menjadi kebutuhan penting keluarga tidak terealisasikan. Seperti kebutuhan air minum dan sanitasi. Padahal perempuan adalah kaum yang paling peduli terhadap ketersediaan air minum untuk keluarga.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan berupaya mengangkat keteringgalan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kebutuhan air minum dan sanitasi. Bagaimana upaya dan langkah kementerian ini? Berikut petikan wawancara *Percik* dengan Deputi Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dr. Surjadi Soeparman, MPH.

FOTO: BOWO LEKSONO



Bagaimana Anda melihat pembangunan air minum dan sanitasi dilihat dari perspektif gender?

Kita lihat fungsi air bersih dan sanitasi akan mempengaruhi standar dan indeks pembangunan manusia yang sudah disepakati di dunia internasional yaitu *Human Development Index* (HDI) dan bila dipilah menjadi *Gender Development Index* (GDI) untuk kemudian secara khusus menjadi indeks pembangunan perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi dan pengambilan keputusan.

Menilik *Human Development Report* (HDR) 2006, memang topik utamanya masalah air dan sanitasi. Karena ternyata kelangkaan air dan masalah

sanitasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Siapa yang paling menderita bila kebutuhan akan air dan sanitasi tidak memadai ?

Dari setiap keluarga atau penduduk yang paling menderita karena tak memiliki akses air minum dan sanitasi adalah penduduk miskin. Dan kalau kita lihat siapa sejatinya penduduk yang paling miskin? Adalah perempuan. Karena kemiskinan di Indonesia adalah berwajah perempuan. Sekitar 84 persen dari penduduk miskin adalah perempuan.

Dalam laporan tercatat satu dari lima orang mengalami kesulitan meng-

akses air minum. Sementara untuk sanitasi, satu dari dua orang mengalami kesulitan mengakses sanitasi yang bersih dan sehat. Kelangkaan air dan sanitasi yang buruk menyebabkan timbulnya berbagai penyakit menular.

Jadi permasalahan pengadaan air minum dan sanitasi yang sehat merupakan masalah yang perlu kebijakan-kebijakan baik secara lokal maupun nasional untuk menunjang pencapaian-pencapaian standar HDI.

Seberapa penting peran perempuan dalam hal ini ?

Kalau kita perhatikan peran perempuan dan laki-laki dalam mengakses kebutuhan air minum dan sanitasi yang paling peduli terhadap masalah itu adalah kaum perempuan. Kaum laki-laki hanya tinggal terima bersih. Air sudah tersedia dalam bentuk apa saja. Air minum, untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Tapi yang paling peduli adalah perempuan karena mereka sadar hal ini akan meningkatkan kesehatan keluarga terutama melindungi balita dan keluarga dari bermacam penyakit.

Padahal penduduk miskin untuk mengakses air minum sangat mahal, perlu perjuangan dengan jalan naik-turun bukit, dan memerlukan waktu yang lama. Sudah harga mahal jumlah sedikit pula. Tenaga mereka habis untuk mencari air.

Bisa dibayangkan kaum perempuan hilang waktu produktifnya hanya untuk mendapatkan akses air minum. Semakin miskin keadaan, semakin sulit mengakses air. Oleh karena itu, kita harus

memperhatikan kebutuhan air maupun sanitasi sebagai wujud keutamaan perencanaan perempuan.

Berarti masih ada ketidakadilan dalam hal ini ?

Ya jelas. Satu contoh saya pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa atau "Musrenbang", sebagai satu sistem perencanaan pembangunan di tingkat bawah. Ada masyarakat yang mewakili laki-laki dan perempuan tapi kita lihat dari forum itu saja jumlah perempuan sedikit sekali. Jadi bagaimana kaum perempuan menyampaikan aspirasi dan harapannya?

Pada waktu itu pimpinan ingin mendapatkan satu keputusan. Kaum laki-laki cenderung menginginkan perbaikan jalan desa, sementara ibu-ibunya ingin ada sumber air minum yang dekat dengan permukiman supaya tidak repot mencari air.

Begitu pengambilan keputusan, perempuan yang jumlahnya sedikit ya kalah bersuara. Akhirnya kami berpendapat supaya aspirasi, harapan, dan kebutuhan kaum perempuan turut berperan mulai dari proses perencanaan, harus ada pemberdayaan perempuan supaya mereka mampu berbicara diforum.

Kepedulian pengambil kebijakan?

Kami melihat para pengambil kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, belumlah terasa kepeduliannya. Air masih dianggap komoditas yang tak punya nilai ekonomi. Padahal kelangkaan air merupakan ancaman terhadap sumber daya manusia bahkan sampai menimbulkan kematian. Dan yang tanpa disadari, kematian itu menimpa anak-anak balita yang jauh lebih besar dari korban peperangan.

Sejauh mana peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan ?

Salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan hingga akar rumput. Kerap aspirasi dan harapan perempuan jauh lebih mengarah pada kepentingan kesejahteraan keluarga, seperti ketersediaan air minum, jamban, dan sanitasi yang baik, dibanding aspirasi laki-laki yang terkadang kurang relevan. Di sinilah arti penting peran perempuan agar mampu me-



FOTO: BOWO LEKSONO

nyampaikan aspirasi dalam musyawarah pembangunan desa.

Caranya?

Kelemahan kami memang tidak mempunyai kemampuan kegiatan hingga akar rumput. Unit kerja kami terdapat di tingkat provinsi seperti biro atau badan dan bagian pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten.

Caranya ya bekerjasama dengan organisasi perempuan, LSM, dan berbagai donor yang mempunyai struktur organisasi sampai tingkat akar rumput. Pada tataran kebijakan bekerjasama dengan departemen-departemen teknis maupun satuan perangkat kerja di daerah pada tataran operasional.

Sebenarnya apa faktor penye-

bab ketimpangan ini?

Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pertama; faktor sosial budaya. Hal yang selama ini mengatakan perempuan adalah orang rumahan atau orang kedua yang kerap terpinggirkan dari peran-peran di berbagai bidang. Kedua faktor pendidikan. Ini penyebab perempuan tertinggal dengan laki-laki. Dan yang ketiga faktor kemiskinan yang semakin memarginalkan kaum perempuan.

Padahal bila perempuan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dengan jalan ikut bersuara, beraspirasi atau berpendapat, dan bisa bernegosiasi di tingkat rembug desa, maka suara perempuan akan bisa menggerakkan rencana pembangunan yang lebih penting seperti penyediaan air minum dan sanitasi sehat.

Peran perempuan harus didengar suaranya karena yang paling peduli. Karena itulah kita harus melibatkan perempuan dalam pembangunan air minum dan sanitasi melalui keputusan-keputusan perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Jadi apa yang harus dilakukan?

Ya harus melihat sejauh mana kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Apakah keberpihakan program kegiatan sampai penganggaran sudah memberikan akses yang setara? Apakah sudah memberikan partisipasi yang setara? Pengambilan keputusan yang setara? Dan apakah memberikan manfaat yang setara pula?

Bila kesetaraan itu sudah terjadi, maka kita bisa katakan bahwa kebijakan program kegiatan sampai anggaran dari sektor pembangunan terkait, sudah responsif gender. ■ **Bowo Leksono**

Dana Alokasi Khusus Prasarana Air Bersih dan Sanitasi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan terselenggaranya otonomi daerah, pemerintah telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang kemudian disebut sebagai Dana Perimbangan. Dengan demikian pemerintah mengharapkan adanya hubungan yang teratur secara adil dan selaras dalam hal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah itu sendiri.

Dana perimbangan tadi terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pada prinsipnya ketiga dana tadi sama-sama ditujukan bagi pendanaan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan di daerah, sedangkan letak perbedaannya adalah lingkup kegiatan yang akan didukung setiap dana tadi.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dana tersebut dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Daerah tertentu tersebut merupakan daerah yang dapat memperoleh DAK setelah memenuhi persyaratan kriteria umum, kriteria khusus, dan juga kriteria teknis.

Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan khusus adalah kegiatan yang ditetapkan pemerintah yang mengutamakan kegiatan pembangunan, peng-

adaan, peningkatan, serta perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk sarana fisik penunjang. Pelayanan dasar ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dana tersebut dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Alokasi DAK untuk Air Bersih dan Sanitasi

Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar terhadap masyarakat tadi, pembangunan infrastruktur di sektor air bersih dan sanitasi pun menjadi salah satu kegiatan yang mendapat suntikan dana dari DAK. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan peraturan tersebut, pada tahun 2007 ini sektor air bersih dan sanitasi mendapat alokasi sebesar

Rp 1.062.370.000.000,- atau sebesar 6,21 persen dari keseluruhan anggaran untuk DAK Non Dana Reboisasi tahun ini yang mencapai Rp 17.094.100.000.000,-. Dan yang dimaksud dana reboisasi tadi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu yang kemudian dana tersebut digunakan dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

Porsi yang didapat sektor air bersih dan sanitasi mungkin tidak terlalu besar jika dibandingkan total DAK Non DR yang dianggarkan pemerintah. Hal ini dikarenakan pendanaan sektor air bersih dan sanitasi belum menjadi bidang tersendiri sehingga masih harus berbagi dengan jalan dan irigasi sebagai bagian dari pembangunan bidang infrastruktur.

Namun jumlah proporsi tadi setidaknya masih mengalami peningkatan jika dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana pada tahun 2005 air bersih dan sanitasi mendapat porsi sebesar 5,07 persen dari DAK Non DR dan pada tahun 2006 sebesar 5,25 persen. Bahkan sebelum tahun 2005 sektor air bersih dan sanitasi belum mendapat alokasi dana dari DAK.

Dalam dua tahun terakhir sejak 2005, setiap tahunnya sektor air bersih dan sanitasi terus mengalami peningkatan proporsi dimana pada tahun ini meningkat 0,96 persen dari tahun sebelumnya dan peningkatan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2006

yang hanya 0,18 persen dari tahun 2005. Melihat kondisi tersebut setidaknya dapat sedikit mengikis rasa pesimis terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar masyarakat khususnya bidang air bersih dan sanitasi.

Pengalokasian DAK untuk bidang infrastruktur khususnya air bersih dan sanitasi bertujuan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air bersih dan sanitasi. Lebih rinci lagi pengalokasian tersebut dilakukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan prasarana dan sarana air bersih yang diarahkan untuk kegiatan perbaikan, peningkatan dan pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada daerah rawan air bersih dan kekeringan di perdesaan dan perkotaan serta penanganan prasarana dan sarana sanitasi yang diarahkan untuk kegiatan perbaikan, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi untuk daerah-daerah rawan sanitasi di perdesaan dan perkotaan.

Daerah Penerima DAK

Untuk mendapatkan alokasi dana dari DAK maka setiap daerah harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut terdiri dari kriteria umum, khusus, dan teknis. Berdasarkan kriteria umum, pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional. Kemampuan tersebut didasarkan pada selisih antara realisasi Penerimaan Umum Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil) dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2005.

Sedangkan secara khusus, daerah yang dapat menerima alokasi DAK adalah daerah-daerah pada wilayah ter-

Kriteria teknis berbeda untuk setiap bidangnya dimana untuk bidang infrastruktur air bersih dan sanitasi kriteria yang harus dipenuhi daerah penerima DAK dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

tentu yang memiliki karakteristik dan/atau berada di wilayah (a) Provinsi Papua yang merupakan Daerah Otonomi Khusus; (b) daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, dan daerah yang masuk kategori ketahanan pangan, serta daerah pariwisata; (c) daerah rawan banjir/longsor, daerah penampung transmigrasi, daerah yang memiliki pulau-pulau kecil terdepan, daerah yang alokasi DAU-nya dalam tahun 2007 tidak mengalami kenaikan, daerah rawan pangan dan/atau kekeringan, daerah pascakonflik, dan daerah penerima pengungsi.

Kriteria teknis berbeda untuk setiap bidangnya dimana untuk bidang infrastruktur air bersih dan sanitasi kriteria yang harus dipenuhi daerah penerima DAK dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Kriteria teknis tersebut mempertimbangkan (a) jumlah desa dan kelurahan (dinyatakan dalam satuan desa/kelurahan); (b) jumlah desa dan kelurahan rawan air bersih (desa/kelurahan); (c) jumlah penduduk (jiwa); (d) tingkat/cakupan pelayanan air limbah (persentase jiwa); (e) tingkat/cakupan pelayanan persampahan (persentase jiwa); (f) luas genangan di kabupaten/kota (ha); (g) luas kawasan kumuh di kabupaten/kota (ha); dan (h) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Kewajiban Daerah Penerima DAK

Setelah ditentukan sebagai daerah penerima DAK, daerah juga mempunyai kewajiban menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis. Kewajiban penyediaan Dana Pendamping tadi untuk menunjukkan sejauh mana komitmen daerah terhadap kegiatan yang didanai dari DAK. Namun terdapat daerah tertentu yang terlepas dari kewajiban penyediaan Dana Pendamping yaitu daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Dalam pelaksanaan program DAK, melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Teknis pemerintah pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan DAK, pemerintah menugaskan Menteri Keuangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasinya. Selain kewajiban di atas, daerah pun mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Keterlambatan atau tidak dilaksanakannya penyampaian laporan tersebut akan merugikan daerah sendiri dengan ditundanya penyaluran DAK. Melalui pengaturan-pengaturan yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan pengalokasian DAK dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pembangunan di daerah yang juga menjadi prioritas nasional. ■ Afif Nu'man

MENGAPA CLTS BERHASIL?

(Tinjauan dari Perspektif Ilmu Sosial)

Saya berpendapat, Kamal Karsseorang asal Bangladesh yang melahirkan model pembangunan jamban yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat (*Community Led Total Sanitation*). Dia adalah seorang pragmatis. Dia tidak mau terikat pada salah satu kutub paradigma ilmu sosial tetapi cenderung meleburkannya menjadi perangkat untuk membuat rekayasa sosial (*social engineering*) guna sebesar mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia tidak peduli bahwa dikalangan ilmuwan sosial terjadi polarisasi tajam, yang masing-masing mengibarkan bendera mazhabnya, berkelompok secara eksklusif dan jarang bertemu pendapat dalam forum yang sama.

Diakui atau tidak upayanya memanipulasi kaidah-kaidah ilmu sosial untuk rekayasa mempengaruhi dan mengubah perilaku, sangat berhasil. Penerapan di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan kinerja yang sangat baik. Bagaimana tidak? Dalam waktu relatif singkat, perilaku penduduk yang biasa BAB (buang air besar) di sembarang tempat, bisa berubah. Jamban rumah tangga dengan model yang dikembangkan sendiri oleh penduduk, dalam hitungan bulan bisa terbangun, dan cakupan pengguna jamban meningkat sangat pesat, meroket mencapai 100 persen. Hal yang belum pernah terjadi selama ini. Peristiwa yang sangat fenomenal ini, tentu saja sangat menarik. Bagaimana menjelaskannya?

Kinerja di beberapa daerah

Di Indonesia, CLTS sudah diterapkan di berbagai daerah, seperti beberapa desa di Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat), Muaro Jambi, (Jambi),

Oleh: Alma Arief¹⁾

Bogor, Lombok Barat, dan sebagainya. Hampir semua daerah yang telah menerapkan model itu berhasil menakjubkan, bukan saja kecepatan serapan dan pertumbuhan cakupannya tetapi juga pengembangan sendiri model sanitasi dasar oleh masyarakat dan kesediaan masyarakat untuk secara bersama-sama mengubah perilaku dan menegakkan kontrol sosial dengan berbagai cara.

Penerapan prinsip-prinsip CLTS juga sangat konsisten. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain bisa diabstraksikan sebagai berikut.

1. Tanpa adanya subsidi dan masukan dari luar, baik berupa pendanaan stimulan, material maupun model jamban
2. Adanya proses pemicuan untuk menggoncang (membuat *shock*) tingkat kesadaran dan perasaan

masyarakat sasaran bahwa selama ini mereka telah berperilaku dan berpandangan keliru .

3. Adanya komitmen pribadi untuk segera mengubah pandangan dan perilakunya.
4. Fasilitasi disampaikan dengan bahasa yang lugas, cenderung kasar, tidak mempertimbangkan belas kasihan.
5. Asumsi dasarnya masyarakat mau dan mampu membebaskan dirinya dari masalah BAB di sembarang tempat.

Konsistensi terhadap prinsip tersebut, tampaknya yang justru menjadi andalan untuk keberhasilan pembangunan sanitasi dasar model CLTS. Beberapa desa uji coba di Indonesia, ada yang dinyatakan diskualifikasi dan dikeluarkan dari keikutsertaan dalam uji coba karena adanya belas kasih pemerintah (desa) yang mencoba memberikan masukan (dana) ke masyarakat agar sasarnya segera tercapai, ma-

FOTO: DOK/POKJA AMPL



syarakat segera membangun jamban dan cakupannya segera mencapai 100 persen. Masukan dari luar seperti itu, justru yang dihindari karena tidak selaras dengan prinsip memandirikan masyarakat model CLTS dan bahkan akan menumbuhkan rasa ketergantungan.

Cikal Bakal di Indonesia

Dengan segera, setelah uji coba menunjukkan keberhasilannya, berbagai komunitas yang selama ini menunjukkan kepedulian pada upaya penanggulangan masalah BAB di sembarang tempat dan peningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, terguncang dan cukup takjub, layaknya sebuah capaian spektakuler yang belum pernah terwujud. Benarkah?

Apabila bicara dalam tataran angka (statistik), capaian pembangunan sanitasi di Indonesia selama ini memang lebih merupakan ungkapan kesedihan. Persentase penduduk yang memiliki jamban masih rendah atau dengan kata lain persentase yang BAB di sembarang tempat masih tinggi.

Di manakah mereka BAB selama ini? Di sungai, di kebun, di ladang, di selokan, di semak-semak, dan sebagainya. Pendeknya di sembarang tempat. Karena kondisi yang memprihatinkan itu, istilah WC bagi mereka kemudian menjadi suatu satire menyedihkan. Ada di antaranya yang menamainya "WC terbang" untuk menyebut perilaku BAB di kantong plastik dan membuangnya (melemparkan) ke tempat sampah, "WC Putar" merujuk perilaku BAB di semak-semak atau balik pohon, dan bergerak memutar semak atau pohon bila kebetulan dipergoki orang lewat, "WC bergerak/pindah" untuk menyebut perilaku BAB di kebun sambil membawa pentungan untuk mengusir anjing ataupun babi yang akan memangsa feces, "WC plung lap" mengacu BAB di sungai, dan sebagainya. Ada plesetan yang mengganti nama WC leher angsa menjadi WC leher babi atau leher anjing, karena babi dan

anjing itulah yang berperan sebagai latrine. Ada lagi sebutan "WC helikopter atau *hanging latrine*" untuk merujuk tempat BAB berbentuk kotak dari papan yang berada di atas sungai.

Jumlah penduduk yang berperilaku seperti itu jutaan. Pembangunan sanitasi dengan sistem dana stimulan yang didorong pemerintah, tumbuh sangat lambat, atau bahkan jalan di tempat. Hal itu karena lemahnya kemauan masyarakat untuk beradaptasi, mengubah perilaku mereka yang memang sudah membudaya. Data penelitian menunjukkan bahwa rentang waktu mulai saat seseorang mengenal jamban sampai dia mau membangun jamban di rumahnya bergerak antara: 5-33 tahun, rentang waktu yang sangat panjang. Itulah kinerja pembangunan yang menyedihkan bila dilihat dari aspek angka-angka. Disayangkan, bahwa pelaksana pembangunan kurang mau belajar dari pengalaman (*lesson learned*) yang ada, dan cenderung memaksakan model yang mereka rancang. Padahal, ada beberapa pelaksanaan pembangunan sanitasi dasar yang hasilnya cukup spektakuler, yang seharusnya bisa memberi inspirasi untuk dikembangkan di tempat lainnya. Jangan-jangan Kamal Khar justru terinspirasi dari beberapa kasus di Indonesia, menangkap substansinya, dan menyintesanya menjadi model CLTS tersebut.

Benarkah di Indonesia tidak pernah ada model yang bisa menghasilkan capaian seperti itu, dan benarkah masyarakat sasaran program lambat merespon gagasan yang bermaksud meningkatkan kesejahteraannya? Di Desa Piyangang, Desa Syawal (Jawa Tengah), Desa Margahayu, Neglasari, Gunung Sari, Sumur Gintung, Kabupaten Subang (Jawa Barat) dan juga di Lewoloba, Kab. Flores Timur, pembangunan sanitasi dasar pernah membuahkan hasil yang cukup menakjubkan juga.

Di Desa Piyangang, Kabupaten Semarang, capaian pemilikan jamban

mencapai 100 persen, hanya dalam waktu beberapa tahun. Ada beberapa metode yang dikembangkan fasilitator kesehatan dari Puskesmas yang memfasilitasi masyarakat desa ini, antara lain:

- Memanipulasi kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, dengan cara menyalurkan bantuan stimulan melalui anak-anak sekolah. Di sini pesan hidup bersih dan sehat, dan penyampaian bantuan stimulan disampaikan melalui guru yang tahu persis siapa muridnya yang tidak memiliki jamban.
- Di sekolah, setiap kelas memiliki WC sendiri, di dalam kelas terdapat *washtafel*, dan di halaman dibangun taman sekolah. Setiap tahun dilaksanakan lomba kebersihan dan keindahan sarana kesehatan tersebut.
- Di Desa Piyangang ini, pesan hidup bersih dan sehat juga dititipkan kepada ustad (guru ngaji) yang akan menyampaikan kepada jamaahnya, dan juga melalui perkumpulan PKK.

Hasilnya menakjubkan. Dalam waktu relatif singkat semua rumah tangga telah memiliki jamban. Padahal pada waktu sebelumnya mereka yang tidak punya jamban, BAB di selokan. Jamban yang mereka bangun biaya pembangunannya jauh melampaui bantuan stimulan yang diberikan, bahkan ada yang mencapai nilai jutaan rupiah. Di sini peran guru dalam memberi wawasan PHBS sangat kuat, dan juga metode yang secara halus "mempermalukan" seorang murid dihadapan temannya sangat efektif. Murid yang tidak punya jamban dan karenanya masih BAB di sembarang tempat, menjadi kekuatan penekan bagi para orang tua, yang karena rasa sayang kepada anaknya segera membangun jamban agar anaknya tidak merasa malu.

Di Desa Syawal, Banjarnegara, Jawa Tengah, metodenya lebih simpel. Di desa yang semula penduduknya BAB

di selokan, dan karena setiap musim kemarau menebarkan aroma menge-rikan karena selokannya kering, dalam waktu hanya beberapa tahun, sudah terbebas dari BAB di sembarang tempat (selokan). Di sini metodenya lebih menekankan pada peran guru agama, pendidikan sekolah (Muhammadiyah) dan fasilitator desa. Identitas desa yang sangat memalukan karena menebarkan bau kotoran manusia di musim kemarau, dijadikan isu untuk dibebaskan melalui forum pengajian, pendidikan sekolah, dan juga penerangan oleh fasilitator desa. Karena prestasinya, fasilitator desa sering dikirabkan dalam kegiatan nasional untuk memberikan penjelasan keberhasilannya dan atau belajar dari desa lainnya.

Di Desa Lewoloba, Flores Timur, prestasi membangun jamban yang spektakuler dicapai melalui metode pemaksaan dan pemberian sanksi yang memberatkan secara ekonomi, dan memalukan secara sosial. Pada saat desa ini dipimpin seorang mantan (pensiunan) tentara, maka salah satu yang diprioritaskan adalah mendorong pembangunan jamban. Di bawah kepemimpinannya masyarakat dipaksa membangun jamban sehingga dalam waktu singkat 100 persen penduduk memiliki jamban. Pemaksaan dilakukan dengan benar-benar menerapkan sanksi ekonomi dan sosial bagi yang tidak memilikinya. Di upacara 17 Agustus, penduduk yang tidak memiliki jamban diumumkan, dan didenda membayar dua ekor ayam atau satu ekor anjing. Tidak ada fasilitator desa, yang ada adalah pemaksaan dan penegakan sanksi secara tegas.

Di Desa Neglasari, Gunung Sari, Margahayu, Sumur Gintung, Subang metodenya sangat normatif mengikuti model fasilitasi partisipatori secara intensif. Beberapa fasilitator dari Yayasan Pradipta Paramitha, mengajak penduduk untuk melakukan FGD sekitar pem-

angunan sarana jamban. Fasilitasi benar-benar dilakukan secara intensif sehingga penduduk memahami mengenai apa kerugian/risiko-risikonya BAB di sembarang tempat, apa keuntungannya membangun dan menggunakan jamban, dan sebagainya. Dalam waktu singkat, karena fasilitasi intensif tersebut, hampir semua rumah tangga telah memiliki jamban sendiri.

Pelajaran yang bisa dipetik dari beberapa kasus tersebut adalah :

- Perlu adanya penyadaran melalui pendidikan formal maupun non formal. Mentranformasikan pengetahuan untuk mengubah perilaku, melalui: guru ngaji, fasilitator desa, fasilitator dari Puskesmas, guru sekolah, dan sebagainya.
- Memberikan sanksi ekstrinsik dalam bentuk barang atau uang.
- Memberikan sanksi sosial dengan mengumumkan kepada masyarakat.
- Memberikan sanksi (intrinsik) seperti rasa malu, rasa terbelakang, dsb.
- Memberikan penghargaan (ekstrinsik) bagi yang berprestasi (lomba antarkelas)
- Memberikan penghargaan (intrinsik) berupa penerimaan sosial, harga diri, dsb.
- Melakukan tekanan melalui kekuatan kelompok yang berpengaruh (anak-anak mereka sendiri yang masih sekolah dasar).
- Melakukan tekanan dan penegakan aturan melalui kekuatan yang mampu memaksa (kepala desa yang juga mantan tentara).

Faktor Pemicuan

Suatu hal yang istimewa dari model CLTS adalah dramatisasi proses penyadaran masyarakat, yang mampu membuat masyarakat dalam sekejap memahami (memiliki pengetahuan) mengenai kerugian berperilaku BAB di sembarang tempat dan juga keun-

tungannya bila BAB di jamban yang higienis. Dalam teori pengembangan organisasi pada bagian yang membahas *planned change*, istilah pemicuan lebih bersesuaian dengan istilah *unfreezing* dari model perubahan terencana yang dibuat Lewin, ketimbang dua model lainnya yaitu: *action research model*, dan *contemporary action research model*, yang secara luas dikenal dalam teori pengembangan organisasi. Pada fase *unfreezing*, terjadi proses transformasi psikologis, di mana terjadi pembongkaran pengetahuan mengenai perilaku apa yang diinginkan dan perilaku apa yang tidak diinginkan. Dalam skala masa, proses ini kadang kala menimbulkan ketegangan antara kelompok yang menginginkan perubahan dengan yang tidak.

Dalam model CLTS, proses penyadaran didramatisasi sedemikian rupa sehingga benar-benar mampu membuat *shock* dan membuka wawasan masyarakat. Dengan peragaan membuat peta sosial untuk mengidentifikasi sebaran permukiman dan siapa yang BAB di sembarang tempat, peragaan dengan menawarkan siapa yang bersedia meminum air yang terkontaminasi tinja dengan menawarkan segelas air yang dibubuhi sedikit tinja, dan dengan menghitung kuantitas tinja yang mereka buang sehari-hari yang mencemari lingkungan sekitar, dan melakukan transek ke tempat-tempat mereka biasa BAB sembarangan, telah benar-benar mampu mengguncang kesadaran dan perasaan masyarakat (aspek *affective* dan *cognitive*). Di sinilah proses penyadaran yang disebut pemicuan itu. Masyarakat tersadar bahwa selama ini mereka telah hidup secara tidak sehat, setelah mereka memperoleh penjelasan mengenai bagaimana polutan yang secara kuantitatif sangat besar, bertebaran di sekitar mereka dan melalui berbagai proses polutan tersebut akan mencemari makanan dan minuman, yang

akhirnya masuk ke perut manusia.

Di saat masyarakat dalam kondisi *shock* karena proses penyadaran yang singkat dan sedang dalam perasaan bersalah berat, mereka secara bersama-sama diminta komitmennya mengubah perilaku dengan membuat jamban. Peserta pertemuan diminta memberikan tepuk tangan setiap ada individu yang memberikan nama dan komitmennya, dan kepada mereka diberikan julukan pahlawan pelopor perubahan perilaku BAB.

Pada sesi akhir tahap pemicuan, masyarakat telah memiliki rencana kerja membuat jamban. Dipandu fasilitator, masing-masing yang hadir akan memberikan informasi nama, dan kapan akan menyelesaikan pembuatan jamban. Kelompok masyarakat yang telah memberikan komitmen tersebut akan menjadi pelopor perubahan perilaku, dan akan menjadi kelompok pengontrol perubahan yang berjalan terus-menerus, sehingga bagaikan bola salju yang semakin membesar, akhirnya peserta akan mencapai 100 persen.

Tahap yang juga menentukan dari model CLTS adalah penegakan kontrol sosial. Variasinya sangat beragam. Ada yang menggunakan anak-anak sebagai pasukan pengintai, yang secara langsung akan menginformasikan kepada penduduk bila melihat orang BAB di sembarang tempat. Ada yang membuat nyanyian untuk memermalukan orang-orang yang BAB di sembarang tempat, dan sebagainya. Inilah bentuk hukuman yang efektif dan membuat jera, lebih efektif dari hukuman denda materi.

Perspektif Ilmu Sosial

Telah disampaikan, Kamal Karr tidak peduli pada polarisasi paradigma ilmu sosial, dan cenderung meleburnya untuk rekayasa sosial (*social engineering*) guna kemaslahatan masyarakat. Padahal di dalam ilmu sosial terdapat polarisasi yang masing-masing mengibarkan bendera mazhabnya.

Di satu kubu berdiri kokoh ilmuwan yang dikonsepsikan sebagai kaum naturalis yang menelaah fenomena sosial secara *scientific* dengan mengasumsikan masyarakat sama dengan benda-benda alam atau obyek ilmu lainnya yang bisa ditentukan keteraturan perilakunya, kaidah-kaidahnya, dan karenanya bisa terukur menggunakan metode statistik. Di kutub ini berdiri sub-sub kubu seperti: kaum *structure* fungsionalis, sub-kubu kaum *conflict structuralist* yang terpecah lagi menjadi kaum *structuralist Marxist* dan non-Marxist, dan sub kubu kaum *behaviorist*.

Sedangkan pada kubu yang lain berdiri kokoh kaum humanis, yang memandang manusia sebagai fenomena unik yang tidak bisa digeneralisasikan, dibuat hukum-hukumnya. Kaum humanis menolak keras pandangan kaum naturalis yang mereduksi nilai manusia menjadi identik dengan benda-benda alam lainnya, termasuk binatang.

Model CLTS menggunakan berbagai kaidah dalam masing-masing paradigma ilmu sosial untuk menyiasati perubahan perilaku (memanipulasi kaidah ilmu sosial) tanpa mempedulikan polarisasi mazhab, yang, sesungguhnya, sangat tajam. Beberapa kaidah yang dimanipulasikan untuk rekayasa CLTS, adalah:

Di manakah komponen-komponen teoritis dari masing-masing mazhab tersebut dimanipulasikan untuk rekayasa? Penjelasan begini:

1. Kontrol sosial : Modelnya bermacam-macam, ada yang menggunakan anak-anak untuk memata-matai orang yang BAB di sembarang tempat, ada yang menggunakan lagu-lagu untuk memermalukan orang BAB di sembarang tempat, dsb.

2. Sosialisasi: Diskusi intensif, dramatisasi dan peragaan pada saat alih pengetahuan ke masyarakat mengenai hidup yang higienis. Proses ini bila berhasil akan muncul "nilai dan norma baru" yang merupakan perekat dan

kesepakatan kolektif.

3. Penegakan aturan dengan sanksi yang keras/tegas: Proses ini merupakan kelanjutan dari kontrol sosial namun sanksinya lebih konkret dan disepakati bersama.

4. Pada dasarnya introduksi cara hidup higienis mengandung aspek konflik, yaitu memperebutkan ruang hidup yang higienis. Di satu sisi berdiri kelompok yang biasa BAB di sembarang tempat yang menganggap ruang bisa dipakai semauanya termasuk BAB di sembarang tempat. Di sisi lain berdiri kelompok pembaharu yang menginginkan hidup yang higienis, lingkungan yang bersih dan sehat.

5. Keutuhan sosial ditegakkan dengan *coersive power* : Penegakan nilai dan norma yang telah terbangun dan disepakati bersama, dijaga bersama dengan memberikan sanksi yang pada dasarnya bersifat memaksa/paksaan. Setiap orang harus patuh, atau menerima konsekuensi dianggap tidak beradab, dikucilkan, disindir-sindir dalam pertemuan, diumumkan dalam peringatan 17 Agustus, dan sebagainya. Ini pada dasarnya kekerasan, paksaan, meskipun tidak dalam bentuk kekerasan fisik,

6. Bila diuntungkan (mendapat imbalan) dalam melakukan kegiatan tertentu, maka akan mempertahankan untuk melakukan kegiatan tersebut. Peserta pemicuan akan memberikan komitmennya mengubah perilaku, karena fasilitator mampu menjelaskan dengan segala cara bahwa mereka akan diuntungkan bila hidup secara higienis. Sebaliknya bila tidak berhasil, masyarakat tak akan mematuhi.

7. Manusia akan menghindari berperilaku yang tidak mendapatkan imbalan/keuntungan/*reward*, atau dengan kata lain menghindari hukuman (*punishment*). Prinsip 6 dan 7, di dalam manajemen disebut kaidah *carrot and stick*. Di sini manusia memang diasumsikan seperti binatang yaitu mencari ganjaran (*carrot*), dan menghindari hu-

kuman (*stick*). Di dalam CLTS masyarakat akhirnya akan mematuhi untuk mengikuti kesepakatan bersama "nilai-nilai dan norma baru", sebab bila tidak mereka akan mendapatkan hukuman, dipermalukan oleh anak-anak, dijadikan bahan cemoohan, diumumkan ke publik, dan sebagainya. Meskipun hukumannya bukan fisik seperti dicambuk dll. Sedangkan bila mengikuti mereka memperoleh keuntungan/ imbalan yaitu: penerimaan sosial, perbaikan mutu kesehatan, dan sebagainya.

8. Makna suatu benda atau gejala didapatkan melalui proses interaksi sosial (pengetahuan akan makna benda atau gejala diperoleh dari interaksi dengan pihak lain). Masyarakat selama ini melakukan BAB di sembarang tempat karena selama ini (dari kecil) memperoleh pengetahuan dari orang tuanya atau orang lain di sekitarnya, bahwa sungai, kebun, semak, dsb, mempunyai makna sebagai tempat BAB, tong sampah, dsb.

9. Makna benda atau gejala akan berubah melalui interaksi dengan pihak

lain (makna baru suatu benda diperoleh dari pihak lain). Dalam CLTS sangat nyata bahwa peserta pemucuan memperoleh pengetahuan baru mengenai makna sungai, kebun, semak, dsb. Bahwa tempat-tempat tersebut bukan tempat untuk BAB. Bahwa BAB harus dikelola dengan baik agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. BAB harus dilakukan di jamban, dan sebagainya. Keberhasilan mengintroduksi makna baru suatu benda atau gejala itu, akan sangat tergantung pada kepiawian fasilitator pemucuan.

10. Reaksi terhadap gejala atau benda tertentu tergantung pada pendefinisian mengenai makna benda atau gejala tersebut (*setting of mind*). Bila seseorang mendefinisikan bahwa sungai adalah tempat pembuangan segala limbah termasuk BAB maka dia tidak akan merasa bersalah menggunakan sungai sebagai tempat BAB. Namun bila pendefinisian sudah berubah sebagaimana pada butir 9, maka dia akan merasa bersalah dan tidak menggunakan lagi sebagai tempat

BAB. Perubahan ini menjadi kuat bila di ikuti kesepakatan bersama dengan memberikan sanksi (butir 4).

Itulah beberapa prinsip dalam ilmu sosial yang dimanipulasikan untuk membuat rekayasa CLTS. Apabila demikian prinsip-prinsip CLTS pun pada masa lalu sudah diterapkan di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Kemudian apa yang membedakannya sehingga kinerja CLTS begitu menakjubkan, hasilnya bisa meroket mencapai cakupan 100 persen dalam waktu kurang dari setahun?.

Jawabannya adalah pemucuan yang di dalamnya terkandung dramatisasi penyadaran masyarakat dengan menanamkan pengetahuan baru, dan mendemonstrasikan secara visual, dan langsung meminta komitmen untuk mengubah perilaku sekaligus penjadwalan kapan hal itu akan dilakukan. Yang tidak kurang penting adalah kontrol sosial yang modelnya bisa bermacam-macam. ■

¹ Konsultan WASPOLA

Kaidah Mahzab STRUCTURE Fungsionalis	Kaidah Mahzab STRUCTURALIST (MARXIST DAN NONMARXIST)	Kaidah Mahzab BEHAVIORIST	Kaidah Mahzab HUMANIST/INTERACTIONIST
<p>Kontrol sosial sebagai mekanisme pengendalian penyimpangan perilaku.</p> <p>Sosialisasi nilai dan norma untuk memantapkan sistem sosial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan keteraturan sosial secara kekerasan/paksaan - Sanksi berat bagi pelanggar aturan. - Konflik perebutan sumber daya langka sebagai realitas sosial - Keutuhan sosial ditegakkan dengan <i>coersive power</i>. 	<p>Dengan percobaan pada binatang tertentu disimpulkan bahwa: "Perilaku manusia mendasarkan pada prinsip pertukaran/transaksional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila diuntungkan (mendapat imbalan) dalam melakukan kegiatan tertentu, akan mempertahankan untuk melakukan kegiatan tersebut. 2. Akan menghindari perilaku yang tidak mendapatkan imbalan/keuntungan/<i>(reward)</i>, atau dengan kata lain menghindari hukuman (<i>punishment</i>). Dalam management disebut prinsip <i>stick and carrot</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap benda dan gejala mempunyai makna tertentu: <ul style="list-style-type: none"> o Makna suatu benda atau gejala didapatkan melalui proses interaksi sosial (pengetahuan mengenai makna benda atau gejala diperoleh dari interaksi dengan pihak lain) o Makna benda atau gejala akan berubah melalui interaksi dengan pihak lain (makna baru suatu benda diperoleh dari pihak lain) o Reaksi terhadap gejala atau benda tertentu tergantung pada pendefinisian mengenai makna benda tersebut.

Belajar dari Pekalongan dalam Optimalisasi DAK Air Bersih Apapun Sumber Dananya, yang Penting Perencanaannya

Oleh: Sofyan Iskandar

Paparan Kabupaten Pekalongan pada lokakarya nasional Implementasi Kebijakan Nasional AMPL di Semarang, yang diselenggarakan awal Februari 2007, sangat menarik. Di hadapan 70 peserta yang mewakili 50 kabupaten dan 9 provinsi, disampaikan bagaimana Kabupaten Pekalongan melalui Kelompok Kerja AMPL-nya melakukan pendekatan kepada pengelola proyek air minum yang dibiayai Dana Alokasi Khusus pada tahun 2006.

Kepedulian Kelompok Kerja AMPL Pekalongan diwujudkan dengan upaya maksimal yang dapat mereka lakukan. Dengan menyiapkan masyarakat penerima bantuan, diharapkan sarana air minum yang dibangun kontraktor dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat. Dengan upaya tersebut, di sebelas desa telah terbentuk badan pengelola sarana air minum yang sebagian disebut "PDAM Desa".

Ketika partisipan lokakarya melakukan kunjungan ke desa-desa penerima proyek tersebut, serangkaian pertanyaan diajukan kepada pengelola dan masyarakat. Intinya mereka ingin mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Diperoleh kesan bahwa partisipasi masyarakat memang ada, tetapi masih terbatas, hanya dimulai ketika proyek tersebut akan mulai dilaksanakan. Masyarakat misalnya diajak berbicara ketika menentukan lokasi sumur dalam, tetapi alasan mengapa harus menggunakan sumur dalam tidak diketahui masyarakat. Ketika dalam pelak-

sanaanya ternyata diperlukan pipa distribusi tambahan, kemudian masyarakat berembuk dan sepakat melakukan kontribusi.

Walaupun masih jauh dari prinsip pengelolaan berbasis masyarakat yang keputusannya berada di tangan masyarakat-tetapi upaya Kelompok Kerja AMPL Pekalongan dalam melibatkan masyarakat, perlu mendapat apresiasi. Tampaknya upaya tersebut memberikan harapan, terbukti dengan berfungsinya sarana yang dibangun. Walaupun demikian, upaya pembinaan perlu terus dilakukan karena sistem yang dibangun sangat sarat teknologi, yang keahliannya mungkin belum dimiliki masyarakat desa.

Hal menarik dari pengalaman Pekalongan adalah adanya persepsi yang kurang tepat terhadap pengelolaan dana alokasi khusus. Tampaknya anggapan yang menonjol bahwa kegiatan yang didanai DAK seolah-olah turun begitu saja dari pusat ke daerah, dengan aturan-aturannya yang ketat, yang tidak memungkinkan daerah melakukan pekerjaan persiapan yang sifatnya nonfisik.

Apabila mekanisme dan aturan DAK ini dipahami semua pelaku pembangunan, pemanfaatan dananya dapat lebih optimal. Sesungguhnya dana alokasi khusus prosesnya dirancang *bottom up*. Tahap pertama yang dilakukan adalah pemerintah daerah melakukan pengusulan kegiatan yang diajukan kepada menteri teknis, untuk proyek air minum dalam hal ini Menteri Pekerjaan

Umum. Kemudian menteri teknis menyampaikan usulan dan kriteria teknisnya kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan didampingi menteri teknis, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Bappenas melakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR. Menteri Keuangan menetapkan DAK untuk masing-masing daerah. Nampak jelas bahwa peran pemerintah daerah sangat vital, inisiatif awal berasal dari daerah. Sebaiknya daerah mengusulkan kegiatan yang memang dapat dikelola oleh daerah sendiri, dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah sendiri.

Dalam PP No. 25 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus dimaksud adalah pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Secara khusus untuk sektor air bersih, DAK diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi, optimalisasi, dan pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada desa/kelurahan rawan air bersih dan kekeringan, yang memakai teknologi sederhana diluar jaringan (sistem) PDAM/PAM, dengan cakupan skala desa/kelurahan yang dikelola masya-

FOTO: BOWO LEKSONO



rakat.

Ada aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan DAK ini seperti :

- Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
- Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
- DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
- Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.
- Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.

Dari aturan yang ada, jelas sekali bahwa dana alokasi khusus hanya memberi ruang bagi kegiatan fisik, tidak untuk kegiatan-kegiatan pendahuluan, seperti penyiapan masyarakat, pelatihan, dan lain-lain. Bahkan dana pendamping daerah sendiri pun hanya dialokasikan untuk kegiatan fisik. Pertanyaannya adalah, apakah peker-

jaan persiapan itu tidak perlu ada ataukah perlu tetapi tidak boleh menggunakan DAK. Padahal tujuan pembangunan tersebut untuk digunakan dan dikelola masyarakat pengguna. Hal ini bisa dilihat dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Untuk pelaksanaan DAK tahun 2006, jelas sekali bahwa penyusunan rencana definitif harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyiapan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaannya. Menurut aturan tersebut, pekerjaan persiapan termasuk di dalamnya penyiapan masyarakat merupakan kegiatan yang *inheren* di dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini dipastikan dalam lampiran peraturan tersebut yang menilai kemajuan pekerjaan berdasarkan tiga kategori, yaitu i) persiapan terdiri dari kesiapan dana pendamping, rencana definitif, surat penetapan, sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, ii) pelaksanaan terdiri dari proses tender, kontrak, realisasi kegiatan, serah terima, dan paska kegiatan terdiri dari organisasi pengelola masyarakat, pemanfaatan.

Jadi jelas bahwa program air bersih dengan DAK merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan paska kegiatan. Hanya sejauh mana pemerintah daerah dapat memilah kegiatan yang langsung didanai DAK dan didanai oleh daerah sendiri sebagai bagian kewajiban daerah dalam pembangunan sektor air bersih.

Bayangkan sebuah kabupaten yang sudah memiliki suatu perencanaan pembangunan air minum. Daerah tersebut sudah memiliki prioritas wilayah yang harus dibangun. Ada daerah yang menjadi sasaran perluasan PDAM, ada daerah yang hanya bisa dibangun sistem berbasis pengelolaan masyarakat. Berdasarkan prioritas tersebut, daerah dalam hal ini kelompok kerja lintas dinas terkait melakukan fasilitasi penilaian kebutuhan untuk wilayah/desa prioritas. Dengan panduan yang diberikan, desa didorong untuk menyusun perencanaan air minum, yang meliputi; pilihan sumber air, sistem pengaliran, mekanisme pelaksanaan, kontribusi, pengelolaan, dan rencana operasi serta pemeliharannya. Tentu kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan pendanaan yang perlu dialokasikan dari APBD.

Dari usulan desa-desa kemudian pemerintah daerah mengusulkan pendanaannya ke berbagai sumber termasuk DAK misalnya. Sehingga ketika dana tersedia, pada prinsipnya kegiatan fisik sudah dapat dilakukan tanpa penyiapan yang berarti.

Pembatasan penggunaan DAK hanya untuk kegiatan fisik, bukan berarti kegiatan dapat dilakukan tanpa kegiatan penyiapan masyarakat. Tetapi tersirat di dalamnya agar pemerintah daerah sendiri melakukan kegiatan perencanaan yang komprehensif dan bersifat programatik. Untuk itu upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melakukan kegiatan penyiapan masyarakat untuk mendukung DAK air bersih di daerahnya perlu mendapat apresiasi. ■

Limbah Bukan Lawan tapi Kawan

Aplikasi Pemanfaatan Biogas Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Batu, Jawa Timur

Kota Batu yang sejak bergulirnya otonomi daerah tahun 2001, resmi sebagai daerah otonom terpisah dari Kabupaten Malang. Kota ini dikenal sebagai daerah yang subur, sejuk, dingin dan memiliki pemandangan yang indah sebagai daerah pariwisata.

Lebih jauh, masyarakat Kota Batu juga dikenal sebagai peternak sapi perah dan pengusaha kecil seperti tahu, tempe dan ayam potong. Karena itu perlu perhatian terhadap isu-isu lingkungan yang diakibatkan limbah peternakan dan usaha kecil.

Wujud perhatian itu berupa peningkatan nilai tambah melalui pemanfaatan limbah cair dan limbah padat (sampah) menjadi biogas sebagai bahan alternatif energi pengganti bahan bakar minyak dan pupuk organik.

Potensi Kota Batu

Kota yang terletak di dataran tinggi ini terdapat banyak sumber mata air (111 mata air) untuk kecukupan air bersih dan pertanian yang mengalir sebagian wilayah di Jawa Timur.

Potensi ini dirasa cocok untuk pengembangan populasi ternak sapi perah sejumlah 6000 ekor yang tersebar di Kecamatan Bumiaji, Batu, dan Junrejo. Disamping usaha kecil tahu, tempe dan ayam potong kurang lebih 165 unit yang tersebar di Kecamatan Batu dan Junrejo.

Daerah yang memiliki tanah subur dengan iklim dingin dan sejuk sangat mendukung perkembangan bakteri untuk biogas dan pupuk organik. Bakteri ini diperlukan dalam pemanfaatan limbah dari usaha ternak sapi dan usaha kecil.

Oleh: **Muji Dwi Leksono, S.H., M.M.**

Tinggal bagaimana merubah opini masyarakat bahwa limbah bukanlah lawan tapi kawan. Ajakan ini berupa pemanfaatan potensi limbah cair (tahu, tempe, ayam potong dan ternak) dan limbah padat (sampah) menjadi biogas sebagai bahan alternatif energi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pupuk organik.

Namun, pemanfaatan limbah ini harus tetap memperhatikan penataan sanitasi dan pembuangan limbah. Dengan demikian akan mengurangi beban pencemaran lingkungan dan kualitas air tetap terjaga.

Peran Serta Masyarakat

Dalam setiap program kegiatan yang menyentuh pada kehidupan masyarakat terlebih dahulu dilakukan sosialisasi agar masyarakat yang menerima pro-

gram bisa mengetahui maksud, tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut dan merasa terlibat. Demikian pula dalam kegiatan pengelolaan limbah cair tahu, tempe dan ternak menjadi biogas dan pupuk organik.

Aktualisasi program berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilakukan secara padat karya adalah satu wujud keterlibatan masyarakat terutama yang menerima manfaat secara langsung. Diperlukan penentuan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) digester biogas dengan pertimbangan waktu jangka panjang dan mensinergikan kehendak masyarakat.

IPAL biogas dilakukan secara bersama-sama dari beberapa pemilik kandang ternak dan usaha kecil tahu, tempe dan ayam potong agar tumbuh kesadaran dan tanggung jawab bersama. Dan penyerahan pemanfaatan biogas dari pemerintah kepada masyarakat penerima agar dijaga, dirawat, dipelihara dan dimanfaatkan dengan

FOTO: ISTIMEWA



sebaik-baiknya.

Pemanfaatan Teknologi

Dalam penanganan limbah cair agar bisa dimanfaatkan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat diperlukan rekayasa teknologi tepat guna dengan pertimbangan biaya konstruksi murah (bahan-bahan mudah dicari dan tersedia), biaya operasional rendah (tidak memakai tenaga listrik namun dilakukan secara kerja bakti kelompok), dan dapat dimanfaatkan dengan mudah (siapa saja bisa melaksanakan dan mengoperasikannya).

Sehubungan dengan teknologi tepat guna maka untuk menghasilkan biogas diperlukan pengujian kandungan BOD₅ (*Biochemical Oxygen Demand* - banyaknya oksigen dalam mg/l yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri sehingga jernih sekali) dan COD (*Chemical Oxygen Demand* - banyaknya oksigen dalam mg/l yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara kimiawi).

Dalam pembangunan IPAL menjadi biogas menghasilkan gas metan (CH₄) sebagai sumber energi alternatif dan sekaligus menghasilkan pupuk organik serta dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan. Dengan indikator BOD₅ dan COD turun sebesar 90 persen dan nyala kompor api biru ini menunjukkan efisiensi panas tinggi.

Hasil yang Diperoleh

Setiap program kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai target yang diharapkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sama dikemudian hari. Adapun hasil yang diperoleh berupa polusi limbah cair usaha tahu, tempe, ayam potong dan ternak sapi perah akan teratasi karena pengurangan tingkat pencemaran dengan indikasi parameter BOD₅ dan COD turun 90 persen.



FOTO: ISTIMEWA

Setiap program kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai target yang diharapkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sama dikemudian hari.

Dengan demikian lingkungan tetap bersih, sehat dan menambah estetika kandang karena limbah cair dan padat tidak berserakan. Gas methan (CH₄) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti BBM untuk memasak dan penerangan.

Hasil berupa pupuk *slurry* sebagai pupuk organik siap pakai untuk menyuburkan dan menggemburkan ta-

nah mempunyai nilai jual serta bermanfaat dalam menopang perekonomian keluarga.

Peningkatan peran serta masyarakat dan pengenalan teknologi tepat guna dalam pengelolaan lingkungan akan memberikan kontribusi dalam merubah opini negatif terhadap limbah. Bahwa limbah cair dan padat dapat dimanfaatkan dalam menunjang dan mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga BBM, LPG dan listrik melalui IPAL menjadi biogas sebagai energi alternatif pengganti BBM.

Masalah lingkungan memang menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya karena merupakan modal dan faktor utama dalam mensejahterakan masyarakat. Karena itu diperlukan strategi dalam mewujudkannya serta kemampuan dan kemauan dari pihak pemerintah maupun masyarakat dalam membentuk dan menumbuhkan Masyarakat yang Sadar Lingkungan (*My Darling*). ■

Metode *Balanced Scorecard*

Sebagai Tolak Ukur Kinerja

Institusi Pengelola Sistem Penanganan Sampah

Munculnya kasus lingkungan dalam hal sampah di berbagai kota besar di Indonesia saat ini (Jakarta, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya), merupakan wujud masih minimnya perhatian para pemangku kepentingan institusi pengelola sistem penanganan sampah terhadap kinerja institusi yang dipimpinnya. Berbagai kasus konflik sosial akibat sampah yang tidak diangkut setiap hari, bocornya bak truk sampah yang mengakibatkan tetesan air sampah (air lindi) sepanjang jalan, hingga penolakan masyarakat terhadap keberadaan Instalasi Pengolahan Sampah (IPS), merupakan beberapa contoh kasus penanganan sampah yang tidak diselesaikan secara komprehensif dan tuntas. Sangat dikhawatirkan akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi pengelola sistem penanganan sampah sehingga bisa merugikan institusi itu sendiri. Untuk mencegah hal ini, diperlukan suatu kajian yang menyeluruh mengenai kinerja institusi tersebut, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya.

Salah satu metode pengukuran kinerja yang dapat digunakan adalah Metode *Balanced Scorecard*. Dengan metode ini, diharapkan dapat muncul suatu simulasi untuk memberikan gambaran dan akhirnya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja institusi itu untuk melayani pelanggan (dalam hal ini masyarakat, selaku produsen sampah).

Pengertian Metode *Balanced Scorecard*

Metode *Balanced Scorecard* perta-

Oleh: Sandhi Eko Bramono, S.T.,
MEnvEngSc¹

ma kali diajukan oleh Robert S. Kaplan (seorang profesor di *Harvard Business School*) dan David P. Norton (seorang pimpinan di US Consultancy) pada tahun 1992. Metode ini melakukan pendekatan analisis kinerja perusahaan ke dalam aspek kinerja internal, aspek sumber daya manusia, aspek hubungan eksternal, aspek keuangan, aspek kepuasan konsumen (pelanggan), dan aspek pengembangan usaha. Metode ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode pengukuran kinerja institusi, seperti *Total Quality Management (TQM)* yang juga cukup populer dan umum digunakan.

Seiring dengan irama otonomi daerah di Indonesia, metode ini akan sangat membantu untuk memberikan pedoman pada pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan ke daerah. Pemerintah pusat akan dapat memberikan masukan dan pembinaan secara terukur pada tiap daerah, sehingga biaya investasi pemerintah untuk pembinaan dapat lebih efisien dan efektif. Sebagai permisalan, sangat memungkinkan bahwa institusi di Provinsi A tidak membutuhkan pembinaan yang serupa dengan Provinsi B. Hal ini dikarenakan kinerja institusi di Provinsi A sudah lebih baik pada salah satu aspek, namun lemah pada beberapa aspek lainnya. Sebaliknya institusi di Provinsi B sudah relatif mantap pada tiap aspek dalam kinerja institusinya. Tentu saja ini berdampak kepada turunnya biaya investasi untuk pembinaan institusi di Provinsi B, yang

dapat dialokasikan pada institusi di Provinsi A.

Aspek Kinerja Internal

Aspek kinerja internal umumnya melakukan pendekatan kinerja substansi teknik. Pendekatan teknik dalam metodologi perhitungan sistem penanganan sampah harus mampu menjawab kebutuhan sistem penanganan sampah dengan benar. Setiap subsistem penanganan sampah dalam hal pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah merupakan hal yang harus dikaji secara mendalam. Kelayakan dan keandalan teknik yang disediakan harus mampu menangani 100 persen sampah setiap harinya. Selain itu, tingkat keterjangkauan pelanggan (dalam hal ini masyarakat selaku produsen sampah harus diperhatikan), karena merupakan dasar perhitungan biaya retribusi sampah sebagai gambaran dari biaya operasional-pemeliharaan-perawatan yang dibutuhkan. Selain itu, peluang investasi dalam hal sistem penanganan sampah yang akan dibebankan pada institusi pengelola sistem penanganan sampah juga harus terjangkau, namun tetap memperhatikan kelayakan dan keandalan teknik yang disyaratkan.

Sebagai permisalan, ketidakterkumpulan sampah 100 persen setiap harinya, ketidakterangkutan sampah 100 persen setiap harinya, serta ketidakterolahan sampah 100 persen setiap harinya, sudah pasti akan memberikan gambaran rendahnya kinerja institusi ditinjau dari aspek ini. Selain kuantitas dari sistem penanganan sampah terpenuhi, kualitas sistem penanganan

FOTO: DOK/POKJA AMPLI



sampah juga harus baik. Jika sampah dapat tertangani 100 persen setiap harinya, harus dipastikan bahwa semuanya dilaksanakan secara baik, seperti petugas sampah mengoperasikan gerobak sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, bak sampah pada truk sampah tidak berkarat (tidak meneteskan air lindi di badan jalan), hingga pengoperasian IPS yang sesuai tata cara dan prosedur yang ditetapkan.

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia memegang peranan yang penting untuk menjamin kinerja institusi dengan baik. Sumber daya manusia mencakup kuantitas dan kualitas yang bersinergi untuk mencapai tujuan. Pengembangan sumber daya manusia dari segi kuantitas mutlak diperlukan mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan sistem penanganan sampah, ditinjau dari sudut pandang peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Selain itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan, merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Pimpinan institusi harus mampu menjamin bahwa pengalokasian kuantitas sumber daya manusia didasarkan pada kebutuhan pada tiap seksi atau divisi. Sedangkan pengembangan kualitas sumber daya manusia harus diarahkan untuk benar-benar mendukung pencapaian tujuan. Suatu kesalahan memberikan pendidikan maupun pelatihan lanjut tanpa peta konsep yang jelas, yang akhirnya justru tidak memberikan manfaat apapun. Haruslah ditarik suatu alur yang jelas, bahwa investasi dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan lanjut pada sejumlah karyawan, akan memberikan kontribusi beberapa persen dari tujuan total institusi. Jika dalam hal ini

tambahan kemanfaatan (benefit) maupun keuntungan (profit) institusi tidak terjadi, maka dibutuhkan suatu kesadaran bahwa pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan hanya membuang uang secara percuma. Pemilihan karyawan yang potensial untuk mencapai manfaat ataupun keuntungan bagi institusi harus didasarkan pada kinerja karyawan itu sendiri. Dengan pemilihan yang tepat, target kemanfaatan ataupun keuntungan yang diharapkan dapat tercapai.

Sebagai permisalan, karyawan yang potensial dalam hal merancang sistem penanganan sampah diberikan pendidikan lanjut mengenai sistem penanganan sampah secara modern. Sedangkan karyawan yang andal dalam hal tata administrasi dan organisasi tidak perlu diberikan pendidikan lanjut tentang sistem penanganan sampah, namun sebaiknya diarahkan untuk pendidikan lanjut mengenai administrasi niaga yang baik.

Aspek Hubungan Eksternal

Aspek hubungan eksternal merupakan hal yang sangat penting, mengingat perannya untuk mendorong peluang yang mungkin dapat diraih oleh institusi. Hubungan dengan berbagai institusi lain dapat memberikan manfaat. Peluang terjadinya investasi tambahan dalam infrastruktur sistem penanganan sampah dari institusi lain,

merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Hubungan dengan institusi pendidikan juga sangat memungkinkan untuk memperoleh masukan berupa kajian akademik yang tentu sangat berguna untuk meningkatkan kinerja institusi. Bahkan kerja sama dengan institusi yang berkaitan dengan penyebaran informasi, khususnya media massa, dapat memicu lahirnya kontrol dari masyarakat sebagai umpan balik bagi kinerja institusi. Kegiatan yang dilakukan oleh institusi dapat pula disebarluaskan oleh media massa melalui hubungan kerja sama eksternal yang baik dengan institusi tersebut.

Sebagai permisalan, penolakan masyarakat akan kehadiran IPS di sekitar lingkungan mereka juga dapat dijadikan suatu penilaian yang buruk pada institusi ini, karena ketidakmampuannya untuk mengomunikasikan dengan baik sistem penanganan sampah yang direncanakan. Aspek komunikasi massa terhadap masyarakat mutlak diperlukan untuk menjamin masyarakat bahwa sistem yang direncanakan sudah mematuhi kaidah peraturan yang berlaku dan memberikan dampak negatif yang minimum pada masyarakat dan lingkungan.

Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan parameter yang harus diuji dalam mengukur kinerja institusi. Kemampuan dalam mengelola keuangan menjamin keberlangsungan institusi. Efisiensi dalam manajemen, berupa memotong jalur-jalur ekonomi berbiaya tinggi yang umumnya tidak menghasilkan suatu keluaran yang sangat efektif, namun sangat boros dalam hal pembiayaan, mutlak untuk dilakukan. Penyelewengan keuangan juga menjadi suatu perhatian serius yang dapat mengganggu kinerja institusi secara signifikan. Perhitungan retribusi sampah yang benar

harus mampu memberikan keuangan yang sehat pula bagi institusi pengelolaanya.

Sebagai permisalan, alokasi pembiayaan untuk sistem penanganan sampah itu sendiri diharapkan lebih tinggi daripada pembiayaan untuk kebutuhan anggaran tetap yang bersifat pendukung (misalnya, gaji karyawan, alat tulis kantor, uang perjalanan dinas, dan lain-lain). Namun di sisi lain, bentuk dari institusi merupakan suatu bentuk dasar acuan penganggaran. Institusi yang berbentuk Perusahaan Daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan jika berbentuk dinas masih diharapkan memberikan pelayanan tanpa mengharap adanya keuntungan atau laba. Namun sangat diharapkan bahwa kegiatan penganggaran dilakukan secara profesional dan transparan, untuk menjamin akuntabilitas dari institusi.

Aspek Kepuasan Konsumen

Aspek kepuasan konsumen juga menjadi tolok ukur yang penting untuk meninjau kinerja suatu institusi. Dalam hal sistem penanganan sampah, kepuasan masyarakat dalam hal keterkumpulan sampah, keterangskutan sampah, serta keterolahan sampah 100 persen setiap harinya, adalah bentuk manifestasinya. Selain itu, keterjangkauan retribusi sampah yang ditarik berdasarkan kualitas pelayanan tersebut, juga harus mampu dibayarkan oleh masyarakat. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidakpuasan pelayanan harus dapat segera ditindaklanjuti untuk mempertahankan kinerja. Institusi harus mempunyai kotak pengaduan untuk menampung pengaduan dari masyarakat. Kemampuan menanggapi serta kecakapan untuk melayani masyarakat yang memberikan keluhan merupakan suatu tolok ukur institusi ditinjau dari aspek ini.

Sebagai permisalan, dapat dilakukan suatu survei mengenai jumlah pengaduan atau keluhan dari konsumen yang masuk ke dalam kotak pengaduan. Kemudian ditinjau seberapa cepat pengaduan tersebut ditangani atau diselesaikan, aksesibilitas masyarakat untuk menjejaki pengurusan pengaduan yang telah dilakukannya, hingga penyelesaian kemungkinan adanya pungutan liar (pungli) dari oknum-oknum tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada masyarakat selaku produsen sampah dan pengguna jasa institusi tersebut.

Aspek Pengembangan Usaha

Aspek pengembangan usaha merupakan upaya kewirausahaan (*enterpreneurship*) untuk mengembangkan cakupan pelayanan secara prima, dengan tidak mengorbankan tingkat pelayanan yang utama sebagai kewajiban institusi tersebut. Upaya untuk memperluas cakupan pelayanan baik kuantitas maupun kualitas, bahkan harus mampu meningkatkan kinerja institusi itu sendiri, baik dari segi kemanfaatan (*benefit*) maupun keuntungan (*profit*) bagi institusi tersebut.

Sebagai permisalan, menjual produk daur ulang sampah anorganik (seperti sampah plastik, sampah gelas, dan sampah logam), dapat memberikan keuntungan tambahan bagi institusi. Selain itu, biaya pengolahan sampah anorganik tersebut menjadi lebih rendah, dan akhirnya menurunkan biaya total sistem penanganan sampah. Dengan pendekatan tersebut, retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat juga dapat dikurangi, karena telah terjadi subsidi silang dari hasil penjualan produk daur ulang sampah untuk menutupi biaya pengoperasian-pemeliharaan-perawatan dalam sistem penanganan sampah.

Manfaat Metode *Balanced Scorecard*

Dengan metode ini, pemerintah

pusat dapat memberikan pembinaan secara lebih terarah pada institusi-institusi yang berwenang dalam sistem penanganan sampah di tiap daerah. Pemerintah pusat perlu untuk melakukan pembobotan (*scoring factor*) untuk keenam aspek di atas, untuk dapat menilai secara obyektif dan seragam untuk seluruh institusi yang ada di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat juga perlu untuk melakukan diseminasi informasi bagi seluruh institusi di daerah mengenai penilaian kinerja ini, yang tidak bertujuan untuk menghakimi, namun untuk memicu pelayanan sistem penanganan sampah yang lebih baik di seluruh Indonesia. Hal ini akan membuka peluang pula bagi institusi di daerah untuk berkoordinasi secara internal dan secara mandiri menjalin kerja sama dengan institusi serupa di daerah lain yang memiliki kinerja lebih baik. Tentu saja hal ini akan memberikan peningkatan kerja sama dan koordinasi antar institusi di daerah untuk meningkatkan cakupan kuantitas dan kualitas pelayanannya masing-masing.

Sebagai pengukuran kinerja institusi, metode ini masih memerlukan suatu analisis kebijakan dan strategi untuk memperbaiki kinerja institusi. Metode ini merupakan salah satu metode di antara sekian banyak metode lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja institusi. Dengan memanfaatkan metode ini, diharapkan dapat mempertegas penilaian kinerja institusi yang bertugas menangani sistem penanganan sampah. Tentu saja ini dapat menjadi langkah yang baik untuk mencegah terjadinya kembali kasus-kasus seperti penolakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong ataupun longsor sampah di IPS Leuwigajah, dimasa yang akan datang. Semoga ! ■

*) Penulis adalah staf Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum ; anggota Indonesian Solid Waste Association (InSWA) dan Ikatan Ahli Teknik

Kerelaan Tatung-Azizah Mengelola Jaringan Air Warga

Begitu banyak daerah di Indonesia yang belum berkesempatan memperoleh kebutuhan air untuk hidup sehari-hari yang layak. Tak hanya di wilayah perkotaan, di pelosok desa pun persediaan akan air bersih masih sangat langka. Tak jarang masyarakat secara swadaya berusaha mengakses air bersih. Seperti yang dilakukan warga Kelurahan Ulu 12, Kecamatan Sebrang Ulu, Palembang, Sumatera Selatan.

Sudah sejak 1992 warga kelurahan di daerah pegunungan itu secara swadaya mengusahakan penyediaan air jaringan terbatas bagi kebutuhan mereka. Untuk kelancaran arus air hingga ke rumah warga dibutuhkan sukarelawan yang secara ikhlas mengabdikan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Adalah Tatung Ibrahim dan Azizah, pasangan suami istri di Kelurahan Ulu 12 itu yang rela menjadi pengelola instalasi pengolahan air. Bukan sebatas kerelaan untuk mengelola jaringan air, Tatung menjadi operator setelah menjalani pendidikan dan pelatihan.

Keterlibatan Tatung dan Azizah bermula ketika instalasi dibangun pada 1992 oleh Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Departemen Pekerjaan Umum. Instalasi dengan kapasitas 5 liter per detik ini mulai beroperasi setahun kemudian.

"Selama kurang lebih setahun, instalasi dikelola pihak kelurahan. Karena kesulitan dalam hal keuangan dan operasional, pihak kelurahan menyerahkan kepada kami dengan perjanjian lahan dan instalasi tetap menjadi milik pemerintah," tutur Tatung merasa bangga.

Pasangan ini bahu-membahu mengelola instalasi pengelolaan air ter-

batas tersebut. Tatung menangani hal-hal teknis di instalasi dan jaringan. Sementara Azizah menangani pembelian bahan-bahan operasional seperti solar dan bahan-bahan kimia, serta penagihan ke pelanggan.

"Semula pelanggan hanya 15 rumah kemudian berkembang sampai saat ini berjumlah 125 rumah. Tidak ada biaya penyambungan namun pelanggan membayar sendiri biaya penyambungan ke instalasi," ungkap Tatung.

Memang diakui, kualitas air tidaklah sebagus air dari PAM. Namun karena pelayanan 24 jam pelanggan cukup merasa puas. Pelanggan membayar Rp 50 ribu tiap bulannya secara flat. Bahkan pelanggan sanggup membayar relatif tinggi karena banyak dari pelanggan yang menjualnya kembali.

Pada musim kemarau, kata Tatung, dalam sehari instalasi memerlukan kurang lebih 45 liter solar seharga Rp 4.500,- per liter. Solar ia beli dari pemasok langganan dengan menggunakan *boat* di Sungai Musi. "Untuk menetralkan air baku digunakan 1,5 kilogram soda kaustik per harinya. Harga soda kaustik di pasaran Rp 10 ribu per kilogram".

Sementara bahan tawas, lanjut Tatung, digunakan sebagai bahan pengendap utama dengan rincian 50 kilogram tawas atau satu zak seharga Rp 105 ribu akan habis dalam tiga hari. Sementara bahan kaporit, tambahnya, yang digunakan dalam proses desinfeksi, dalam waktu tiga hari juga membutuhkan satu kilogram dengan harga Rp 65 ribu.

Azizah menceritakan, instalasi hanya tinggal memiliki satu pompa karena satu pompa cadangan sudah lama rusak. Karena umur pompa yang sudah tua, Azizah harus menyisihkan paling tidak Rp 50 ribu per bulan untuk

biaya saat pompa rusak. "Paling tidak diperlukan Rp 75 ribu untuk ongkos tukang pompa tiap kali pompa rusak. Itu pun belum termasuk biaya suku cadang yang harus diganti," ujarnya.

Untuk membantu tugas sehari-hari, Tatung memperkerjakan tiga orang yang direkrut dari tetangga sendiri. Dalam mengelola keuangan, Azizah menggaji Rp 250 ribu tiap orang. Tiap dua minggu sekali pekerja membersihkan bak-bak pengolahan dan penampungan dari lumpur yang mengendap.

Meskipun pelanggan membiayai sendiri jaringan pipanya, namun jika ada kerusakan atau kebocoran, sudah menjadi kewajiban Tatung dan pegawainya untuk memperbaiki. "Setiap hari ada saja yang harus dicek dan diperbaiki pipanya. Paling tidak dibutuhkan Rp 15 ribu tiap harinya," ungkapnya.

Saat ini mereka sangat memerlukan investasi baru untuk mengganti pompa yang sudah tua dan seringkali rusak. Tatung sudah pernah minta bantuan ke kelurahan namun tak mendapat tanggapan positif. Pinjaman ke bank pun sudah pernah diijazahkan. Bank kemudian, seperti umumnya syarat pinjaman, meminta surat bukti kepemilikan tanah atau agunan lain. Satu hal yang tidak dapat dipenuhi pasangan ini.

"Jumlah uang yang diperlukan sebenarnya tidak banyak, yang penting bisa untuk membeli dua pompa yang totalnya seharga Rp 5 juta," kata Tatung. Tatung dan Azizah yakin dapat mengembalikan uang pinjaman secara cicilan per bulan. Adakah pihak yang dapat membantu? ■ **Job Supangkat**

Penulis adalah anggota tim studi penyedia air skala kecil WASPOLA-BAPPENAS

Ananda, Puteri Indonesia Lingkungan Hidup 2006

Prihatin terhadap Kelangkaan Air

Buku pelajaran yang menyatakan air dan sinar matahari termasuk benda bebas sehingga manusia bisa leluasa menggunakan, jelas sudah tidak relevan lagi. Terutama pada benda air. Seiring usia bumi, di berbagai tempat sangat terasa bahwa air sudah menjadi benda ekonomi.

Puteri Indonesia Lingkungan Hidup 2006, Ananda, ingin menanamkan dalam pikiran anak-anak Indonesia sebagai penerus generasi bangsa bahwa air sudah mulai dirasakan kelangkaannya. "Untuk itulah, kita harus menggunakan air bersih seefisien mungkin," kata peraih *runner up* I Puteri Indonesia 2006 sekaligus peraih Puteri Indonesia Persahabatan dan Persatuan Indonesia kepada **Percik**.

Menurut Nanda, panggilan akrab Ananda, pemerintah telah menemukan satu solusi dalam mengatasi kelangkaan air bersih yaitu dengan membangun sumur resapan. "Sumur resapan selain berfungsi mengatasi kelangkaan air bersih juga mengatasi banjir saat musim hujan," ungkap dara cantik kelahiran Banjarmasin, 3 Juni 1984.

Nanda membagi pengalamannya saat berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia, sudah dirasakan kondisi kelangkaan air dan tak terkecuali di kota kelahirannya. Duta Indonesia di ajang *Miss International Earth* ini menceritakan ada beberapa kecamatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang kesulitan mendapatkan air bersih sehingga untuk mendapatkannya masyarakat harus membeli air dari gerobak dan mereka yang kesulitan ini

biasanya masyarakat yang berasal dari golongan ekonomi bawah.

Suatu ketika, putri pasangan **H Ir Nur Achmad M.H** dan **Hj Dra Nurana Alwi** yang juga sempat menjadi penulis lepas di Harian *Banjarmasin Post* ini berkunjung ke daerah Tanjung Berung, Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya itu, Nanda menyaksikan bagaimana suatu daerah yang dalam kurun 12 tahun terakhir mengalami kelangkaan air bersih.

"Kondisinya memprihatinkan. Bagaimana masyarakat harus berjalan jauh ke sumber air untuk kehidupan sehari-hari," tutur penghobi fotografi yang memiliki tinggi badan 170 cm dan berat badan 50 kg ini.

Bukan semata Nanda seorang Puteri Indonesia Lingkungan Hidup, sebagai manusia calon peserta *Miss World* ini merasa prihatin dengan kondisi kelangkaan air yang dialami masyarakat kita. "Indonesia memang daerah tropis yang banyak turun hujan. Tapi tak jarang daerah yang masih kekurangan air bersih," katanya.

Kelangkaan air, menurut pandangan penyabet *The Beauty of Indonesian Eyes Contest by Soft lens X2* ini bukan semata fenomena alam. Ada faktor manusia yang turut berperan

merusak lingkungan, seperti menebang pohon di hutan dan membangun vila tanpa memikirkan wawasan lingkungan. Mereka, kata Nanda, adalah orang-orang yang hanya berpikir sesaat untuk memenuhi kepentingannya.



FOTO:DJK PRI

Akumulasi Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan seperti halnya hutan yang gundul atau sungai-sungai yang tersumbat sampah, akan menyebabkan bencana banjir. Dalam pemikiran Nanda, banjir merupakan bencana yang harus ditindaklanjuti secara berkesinambungan. "Banjir yang terjadi di Jakarta beberapa bulan yang lalu dan beberapa tahun terakhir ini akibat akumulasi kerusakan lingkungan hidup," ungkap bintang iklan Mustika Ratu dan salah satu produk mobil.

Ia mencontohkan kegiatan dan kondisi perusakan lingkungan seperti semakin berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan gedung-gedung yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan dan rendahnya kesadaran masyarakat yang masih mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Pola hidup tidak sehat akibat air kotor dan sanitasi yang kurang baik ini kerap tak disadari. Pada akhirnya menimbulkan berbagai sumber penyakit. Menurut alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Lambung Mangkurat Banjarmasin ini mempunyai solusi mengatasi bermacam jenis penyakit tersebut.

Nanda mengatakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyakit yang ditimbulkan oleh air kotor yaitu dengan melakukan penyuluhan kesehatan. "Terutama penyuluhan yang dilakukan di pelosok daerah," ujar mantan penyiar radio di Banjarmasin ini.

Disamping itu, lanjut Nanda, usaha-usaha pencegahan yaitu membangun tangki-tangki air bersih yang diperuntukkan untuk masyarakat. "Pada intinya penyakit kulit yang muncul akibat lingkungan adalah karena kurangnya kebersihan diri," tegas pemudi yang sempat mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia-Kanada ini.

Arti Puteri Lingkungan

Predikat Puteri Lingkungan bagi Nanda pribadi adalah sosok yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat peduli terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Menurut pendapat putri dengan segudang prestasi dan pengalaman kerja, dalam satu dekade terakhir, kepedulian terhadap lingkungan hidup perlu peningkatan seiring semakin

FOTO: DOK PRI



parahnya kerusakan pada lingkungan hidup.

"Dengan adanya Puteri Indonesia Lingkungan Hidup diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari bahwa lingkungan hidup adalah penunjang utama kehidupan," jelas presenter acara "Matematika itu Indah" yang ditayang-

kan TVRI Nasional dan pembawa berita pagi di salah satu stasiun televisi swasta.

Nanda merasa predikat sebagai Puteri Indonesia Lingkungan Hidup menuntut tanggung jawab untuk selalu mencerminkan kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan hidup. "Kepedulian dan kecintaan ini harus diterapkan dimana pun dan kapan pun kita berada. Bila semua orang peduli dan cinta pada lingkungannya, jelas akan terjadi keseimbangan lingkungan hidup," tegas putri yang mengaku punya keahlian sebagai MC (*master of ceremony*) ini.

Karena itu, sebagai Puteri Lingkungan, mantan anggota Pas-kibraka Tingkat Nasional ini mempunyai misi *m e n y a d a r k a n* masyarakat bahwa untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi sekarang ini, bukan hanya tanggung jawab pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup. "Melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat termasuk LSM yang bergerak di lingkungan hidup".

Nanda berjanji kelak bila sudah tidak menyangdang gelar Puteri Indonesia Lingkungan Hidup, dirinya akan tetap mengkampanyekan bahwa lingkungan hidup adalah bagian yang sangat vital dari setiap kehidupan manusia. "Seandainya lingkungan hidup rusak maka kehidupan manusia pun akan terancam," tegas pemeran utama wanita di film independen bertajuk "Oren Jus". ■ **Bowo Leksono**

Lubang Resapan Biopori

Lubang Ajaib Berteknologi Sederhana

FOTO: BOWO LEKSONO

Indonesia termasuk negara yang dikaruniai curah hujan relatif tinggi. Ironisnya banyak orang yang merasa takut terhadap kelangkaan air bersih. Tidak sedikit daerah yang mengalami kekeringan dan kerap terjadi banjir di musim penghujan.

Semakin bertambah tahun, kelangkaan air bersih tak hanya persoalan kuantitas tapi juga kualitas. Kondisi seperti ini karena banyak pihak yang tidak merasa bersyukur dengan mengantisipasi penyebab bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sehingga orang terlalu mudah menyalahkan bencana yang terjadi akibat fenomena alam.

Seorang pakar bidang pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ir. Kamir Raziudin Brata, M.Sc menciptakan teknologi sederhana dan relatif murah yang bisa mengurangi laju air hujan berupa lubang serapan. Teknologi ini dinamakan "lubang resapan biopori" (LRB).

Lubang resapan biopori ini berupa lubang berbentuk silinder berdiameter 10 cm atau 30 cm dengan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak lebih dari kedalaman muka air tanah dengan jarak masing-masing lubang antara 50 sampai 100 cm. Lubang-lubang ini diisi sampah organik guna mendorong terbentuknya biopori. Biopori atau liang-liang kecil terjadi karena adanya aktivitas hewan-hewan (bakteri) tanah atau akar tanaman. Lubang-lubang kecil ini berkapasitas sekitar 8 liter air.

Banyak manfaat yang diberikan teknologi sederhana ini. Tak hanya meningkatkan laju peresapan air hujan ke dalam tanah sebagai sumber air bersih sekaligus mengantisipasi bencana banjir saat musim hujan dan kekeringan di



musim kemarau. Cara ini juga menghindari terjadinya genangan air yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berdarah dan malaria.

Sementara pemanfaatan sampah organik dapat mengatasi masalah pembuangan sampah yang kerap mengakibatkan pencemaran dan tersumbatnya saluran drainase sehingga mudah sebagai sarang penyakit. Manfaat lain, sampah organik tersebut jelas menjadi kompos yang baik untuk tanaman.

"Saya mengembangkan teknologi sederhana ini supaya orang tidak punya alasan lagi untuk lepas dari tanggung jawab terhadap kelangkaan air bersih," tutur Kamir R Brata, dosen Ekologi Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, saat ditemui *Percik* di kampusnya.

Mudah dan Murah

Teknologi ini sangat mudah diterapkan semua masyarakat dari berbagai

lapisan, baik kaya maupun miskin. Masyarakat yang hanya memiliki lahan sempit di seputar rumah pun bisa dan perlu membuat lubang-lubang resapan ini.

Kamir menjelaskan lubang-lubang resapan diisi sampah organik di sekitar rumah dan bila menyusut karena proses pelapukan perlu selalu ditambah. "Kompos yang dihasilkan dapat diambil setiap akhir musim kemarau sekaligus pemeliharaan lubang. Dan untuk memperkuat mulut lubang dapat diberi adukan semen selebar 2-3 cm dengan ketebalan 2 cm di sekeliling mulut lubang," terang alumni IPB tahun 1974 ini.

Menurut Kamir, banyaknya lubang yang perlu dibuat dapat dihitung menggunakan persamaan; jumlah lubang adalah intensitas hujan (mm/jam) x luas bidang kedap (m²) dibagi laju peresapan air per lubang (liter/jam).

Ia mencontohkan untuk daerah de-

FOTO: BOWO LEKSONO

ngan intensitas hujan 50 mm/jam (hujan lebat) dengan laju peresapan air per lubang 3 liter/menit (180 liter/jam) pada 100 m² bidang kedap perlu dibuat sebanyak (50x100):180 = 28 lubang.

Bila lubang yang dibuat berdiameter 10 cm dengan kedalaman 100 cm, lanjut Kamir, setiap lubang dapat menampung 7,8 liter sampah organik, artinya tiap lubang dapat diisi sampah organik selama 2 sampai 3 hari. "Dengan demikian 28 lubang baru dapat dipenuhi sampah organik yang dihasilkan selama 56 sampai 84 hari dimana dalam kurun waktu tersebut lubang perlu diisi kembali," jelas pakar yang sedang menyusun disertasi pada program doktor di IPB.

Kamir sendiri tak hanya memulai membuat lubang resapan berpori ini di lingkungan rumahnya. Di lingkungan kampus seperti pelataran, taman yaitu di sekeliling batang pohon, dan di lahan-lahan penelitian. Bahkan lubang ini sangat efektif bila dibuat di dasar saluran air (got) dengan cara membendungnya. Ia menjamin 100 persen air meresap dengan cara dibendung. "Cara ini pun tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Paling kita harus membuang sampah non-organik bila menyumbat lubang".

Menurut Kamir, pembuatan lubang akan lebih mudah dengan alat bor tanah yang dapat dipesan di pandai besi berbiaya sekitar Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. "Biaya membeli atau membuat bor akan lebih murah bila satu bor tanah dimiliki oleh beberapa keluarga," ujarnya.

Tak Ada Ruginya

Ada anggapan bahwa sampah yang dimasukkan ke lubang akan mencemari air resapan bawah tanah. Anggapan ini ditepis Kamir karena menurutnya sampah organik di dalam lubang-lubang tersebut tidaklah banyak dan air yang masuk tidak menggenang. "Karena itu tidak menghambat proses pelapukan



yang dilakukan bakteri organisme sehingga tetap aman bagi air resapan," jelas pakar jebolan *Western University*, Australia ini.

Justru, menurut Kamir sumur resapan dinilai tidak efektif karena banyaknya volume air yang masuk ke dalam lubang besar sehingga air tidak segera meresap tapi akan menggenang. "Kondisi air di luar batas kemampuan menyebabkan tanah seputar sumur resapan menjadi lembek dan menyumbat proses peresapan. Sehingga akan timbul bau dan sumber penyakit karena bahan organik tidak segera dihancurkan," ungkapnya.

Kurang Promosi

Semua orang memerlukan air dan semua orang juga menghasilkan sampah. Tapi bagaimana agar kebutuhan air dapat tercukupi dan masalah sampah tidak merugikan orang lain.

Siapa menyangka sang pakar telah menciptakan teknologi lubang peresapan biopori sudah sejak 1970-an. Namun belum banyak pihak mencobanya ter-

masuk di lingkungan kampus IPB. Bahkan baru 5 April 2007 lalu, teknologi ini diluncurkan secara resmi oleh pihak kampus.

Menurut Kamir tidak memasyarakatnya teknologi ini karena kurang promosi dan belum adanya petunjuk teknis. Ia berharap pihak terkait seperti departemen-departemen teknis akan membantu memperkenalkan pada masyarakat. "Selama ini saya berharap orang tergerak mengaplikasikannya. Caranya memang harus melihat sendiri," ujarnya.

Di Jakarta, kata Kamir, baru Kantor Kementerian Lingkungan Hidup yang telah mencobanya. "Rencananya saya ingin memperkenalkan dan menerapkan teknologi ini di lingkungan Istana Negara," katanya mantap.

Bagaimanapun upaya peduli terhadap lingkungan seperti membuat lubang resapan biopori yang menyimpan kandungan air bersih akan semakin memperkaya bumi ini. Jadi, tunggu apalagi? Mari kita mencoba!

■ BW

Pendampingan Pascaproyek, Siapa Berminat ?

K erap kita dengar kata *sustainability* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "keberlanjutan". Kata ini selalu di-dengarkan dalam setiap proyek baik di bidang air bersih dan sanitasi maupun proyek-proyek lain yang berbasis masyarakat. Kata tersebut selalu menjadi kata kunci yang dipersyaratkan donor maupun pengelola proyek.

Berbagai strategi dibuat untuk menjamin kata kunci tersebut agar benar-benar bisa terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu strategi menumbuhkan partisipasi atau kontribusi masyarakat baik dalam bentuk dana tunai (*cash*), material, maupun tenaga/pikiran atau istilah kerennya *in kind*. Hal ini sering menjadi persyaratan di hampir semua proyek berbasis masyarakat.

Partisipatori dan kontribusi ini meski berbeda-beda tingkatan juga selalu dipersyaratkan disemua tahapan proyek dan disemua strata masyarakat. Namun apakah semua strategi tersebut telah benar-benar ampuh menjamin adanya keberlanjutan proyek? Ini yang belum dijamin oleh proyek-proyek berbasis masyarakat karena berbagai faktor akan mempengaruhi dalam tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan.

Di negara kita yang sangat unik dimana keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, dan paham begitu banyak. Dan ternyata tidak mudah untuk mengejar kata kunci *sustainability* itu bisa terlaksana dengan mudah. Meski demikian pola masyarakat yang paternalistik dimana selalu membutuhkan figur pendamping nampaknya belum bisa dilepaskan di lingkungan masya-

rakat kita pada umumnya.

Berangkat dari kondisi tersebut ternyata tidak dapat dipungkiri peran fasilitator yang bisa menjadi *pioneer* dalam masyarakat yang mampu menstimulasi tahapan-tahapan yang menjamin adanya keberlanjutan dan dapat dilakukan secara terus-menerus bahkan beberapa tahun setelah proyek memasuki masa pengoperasian dan pemeliharaan. Karena disinilah peran dan fungsi *pioneer* yang sesungguhnya diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian masalah bukan pembuat masalah.

Pengertian *pioneer* disini tidak harus selalu diperankan satu orang. Juga tidak harus oleh individu tapi bisa berupa lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah yang *intens* melakukan pendampingan dan bisa mengembankan kepercayaan dari komunitasnya.

Dari beberapa kali mengunjungi eks proyek air bersih dan sanitasi yang sudah lebih dari tiga tahun memasuki masa pengoperasian dan pemeliharaan, hampir semua temuan kasus di lapangan adalah tidak adanya lagi *pioneer* yang secara *intens* melakukan pendampingan dalam menstimulasi organisasi pengelola di masyarakat sehingga tetap berfungsi dengan baik.

Bahkan bisa lebih meningkat peran dan fungsinya badan pengelola akan berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan dari sistem itu sendiri, sehingga *sustainability* yang sangat didambakan tidak mungkin bisa diharapkan lagi. Sungguh menyedihkan bila kenyataan tersebut sering terjadi bah-

kan dalam suatu desa atau lokasi yang sudah mendapatkan bantuan dari beberapa proyek.

Sementara yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dan siapa yang harus menyiapkan *pioneer* dan diharapkan mampu menjadi fasilitator yang diterima masyarakat baik dari tahap persiapan sampai tahap operasi dan pemeliharaan. Bahkan bila mungkin sampai tahap *re-investment* dari proyek itu sendiri oleh masyarakat.

Haruskah ada strategi khusus yang perlu dikembangkan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan *pioneer* dalam proyek-proyek yang berbasis masyarakat agar keberlanjutan yang sebenarnya dapat terjadi di masyarakat. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa Pemda selaku pemegang tanggung jawab dan pemilik otoritas wilayah belum bisa berperan sebagai *pioneer*, apalagi menyiapkannya karena memang bukan suatu aktifitas yang menarik.

Bagaimana dari pihak para donor? Sepertinya juga bukan sesuatu yang menarik untuk coba dilakukan. Apakah mungkin karena kurangnya *support* Pemerintah karena dianggap kegiatan pendampingan pascaproyek ini dianggap sebagai kewajiban masyarakat itu sendiri atau Pemda setempat?

Bila pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan dana tidak ada yang tertarik dalam kegiatan pendampingan pascaproyek, lalu apa hendak kita biarkan investasi bermiliar bahkan bertriliun rupiah selalu bernasib sama? Atau malah menjadi monumen semata? Sampai kapan kita akan melangkah ke depan? ■ **Tofik Rochman**

renungan seorang pekerja di sektor air bersih dan sanitasi

Togo-togo Butuh Pionir Baru

Sistem air bersih Togo-togo merupakan salah satu program pengadaan sarana air bersih kerjasama *Plan Indonesia* dengan masyarakat di Desa Togo-togo yang dibangun pada tahun 1994. Sistem air bersih ini menggunakan sumur dalam sebagai sumber airnya.

Dengan kedalaman sumur sekitar 102 meter, kapasitas debit sesuai hasil tes pumping yang dilakukan pada waktu itu sebesar 20 liter/detik. Pada awal pengoperasian sistem terpasang menggunakan pompa *submersible* dengan kapasitas berkisar 13 liter/detik melayani 125 sambungan rumah (SR) dan 20 hidran umum (HU), dimana setiap HU dimanfaatkan oleh 10-15 kepala keluarga (KK).

Semua sambungan baik SR maupun HU dipasang meter air dengan tarif air yang sama untuk kedua jenis sambungan tersebut. Kemudian dihitung berdasarkan besarnya biaya operasi dan pemeliharaan per bulan, meliputi biaya listrik, honor pengelola dan perkiraan biaya penggantian suku cadang baik pompa maupun perpipaannya.

Untuk sebuah sistem yang menggunakan pompa sebagai pilihan teknologi eksplorasinya, sistem di Togo-togo ini cukup istimewa dari sisi manajemen operasi dan pemeliharaannya (O dan M). Lebih dari 12 beroperasi, sistem sarana ini masih bisa berfungsi bahkan mengalami peningkatan cakupan pelayanan yang cukup signifikan seperti yang ditunjukkan dalam tabel peningkatan jumlah pelanggan maupun pendapatannya.

Dua hal yang sangat mendukung adalah tingkat kebutuhan (*demand*) masyarakat akan air bersih yang sangat tinggi juga akuntabilitas badan pengelolanya, khususnya pengelola periode pertama yaitu kurun waktu antara tahun 1994-2005. Bahkan dalam kurun waktu tersebut mampu melakukan perbaikan dan

penggantian pompa secara swadaya (dari hasil pendapatan rekening air) sekitar Rp 90 juta.

Pada tahun 2001 *Plan Indonesia* membantu mengembangkan daerah pelayanan dari tiga desa menjadi lima desa dengan penambahan jumlah SR menjadi 1000 unit.

ter/detik. Juga dengan adanya kevakuman ketua badan pengelola dikhawatirkan kualitas sistem menjadi semakin menurun. Untuk sementara waktu jabatan ketua dipegang ketua dewan pembina yaitu Camat Batang sampai terpilihnya ketua baru. Proses pemilihan ketua badan pengelola sendiri dilakukan secara terbu-

PERKEMBANGAN PELAYANAN SISTEM AIR BERSIH TOGO-TOGO

Tahun	Jumlah Pelanggan		Tarif	Area Pelayanan (Desa)
	SR	HU		
1994	125	20	300	Togo-Togo
1995-1997	212	20	300	Togo-Togo, Arungkeke Palantikang
1998-1999	350	20	450	Togo-Togo, Arungkeke Palantikang, Camba-camba
1999-2000	>500	20	700	Togo-Togo, Arungkeke Palantikang, Camba-camba
2001-2003	1000	20	1250	Togo-Togo, Arungkeke Palantikang, Camba-camba, Bontorappo, Bontoraya
2004-....	>1000	20	1500	Togo-Togo, Arungkeke Palantikang, Camba-camba, Bontorappo, Bontoraya

Pendapatan kotor per bulan dari rekening air ini juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp 1,8 juta pada kurun waktu sebelum tahun 2000 dengan kemampuan menyimpan berkisar antara Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu. Tahun 2007 pendapatan kotor per bulan dari rekening air ini menjadi Rp 14 juta dengan saldo terakhir yang dimiliki badan pengelola sekitar Rp 15 juta.

Besarnya biaya pengoperasian dan pemeliharaan per bulan saat ini adalah sekitar Rp 12 juta. Untuk pembayaran rekening listrik (Rp 6 juta), honor pengurus sebanyak 13 orang termasuk tiga orang jajarun Muspika (sekitar Rp 4,5 juta), pemeliharaan rutin fasilitas (Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta) dan pajak penggunaan air tanah ke Dinas Pertambangan (Rp 50 ribu).

Patut disayangkan bahwa sejak tahun 2005 terjadi penurunan kapasitas sistem sarana dari 13 liter/detik menjadi 8 li-

ter/detik. Juga dengan adanya kevakuman ketua badan pengelola dikhawatirkan kualitas sistem menjadi semakin menurun.

Bagi ketua yang terpilih, nantinya tantangan berat menghadang dimana pembenahan manajemen dan fasilitas memerlukan usaha keras dan kreatif agar penurunan kualitas pelayanan yang sudah mulai terjadi tidak semakin memburuk. Kesuksesan membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sistem di Togo-togo ini bagaimana pun ditentukan kualitas ketua yang diharapkan nantinya akan mampu menjadi pionir di komunitas ini karena modal yang cukup sudah ada di masyarakat yaitu "demand" yang tinggi akan ketersediaan air bersih. Tinggal menunggu hadirnya pionir yang tangguh untuk menjalankan modal yang ada di masyarakat tersebut. ■

Sumber:
Pembelajaran dari hasil persinggahan Budi Suranto dari *Plan Indonesia* saat melewati Togo-togo pada 22 Januari 2007.

Lokakarya Sanitasi di Blitar Hasilkan Deklarasi

FOTO:DOK ISSDP

Perkembangan kota-kota yang tergabung dalam *Indonesia Sanitation Sector Development Program* (ISSDP) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari enam kota peserta ISSDP, Blitar, Solo, dan Banjarmasin telah memasuki tahap penyusunan Rencana Strategis Sanitasi Skala Kota. Sedangkan Kota Payakumbuh, Jambi, dan Denpasar masih dalam tahap penyelesaian Buku Putih Sanitasi yang merupakan potret kondisi sanitasi yang akan dikembangkan menjadi Rencana Strategis Sanitasi Skala Kota.

Pada 28 - 29 Maret 2007 telah diselenggarakan Lokakarya Sanitasi Enam Kota ISSDP Ke-2 bertema: 'Jalan Menuju Strategi Sanitasi Skala Kota' di Kota Blitar. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Tim ISSDP dan Pemerintah Kota Blitar yang didukung kalangan swasta di Kota Blitar.

Tujuan penyelenggaraan lokakarya tersebut sebagai sarana pertukaran informasi antar kota-kota ISSDP. Pada kegiatan ini pemerintah kota dapat meningkatkan kemampuannya dalam penyusunan strategi pembangunan sanitasi dan meningkatkan kerjasamanya dengan pemerintah pusat serta *stakeholders* lainnya. Dari kegiatan ini juga diharapkan adanya dukungan anggota parlemen kota dan masukan-masukan untuk pemerintah pusat tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pembangunan sanitasi kota.

Dukungan politik pemerintah kota tampak nyata dengan hadirnya Walikota Blitar, Walikota Banjarmasin, Sekda Jambi, Kepala Bappeda Surakarta,



Asisten Daerah II Denpasar, Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, Tim Pokja Sanitasi Pusat (perwakilan Bappenas, Departemen PU, Depdagri, KLH, dan Deperin), dan Tim Pokja Sanitasi Enam Kota ISSDP yang terdiri atas : Banjarmasin, Blitar, Denpasar, Jambi, Surakarta, dan Payakumbuh, serta Tim Konsultan ISSDP.

Hadir pula sebagai peserta tamu perwakilan dari kota-kota yang akan berpartisipasi dalam *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP), antara lain Kota Medan, Bandung, Makassar dan Yogyakarta. Kehadiran kota-kota tersebut untuk mempelajari proses penyusunan Rencana Strategis Sanitasi Skala Kota yang sedang dikembangkan melalui ISSDP.

Dalam lokakarya ini dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan

Deklarasi Blitar oleh para walikota kota yang terlibat dalam ISSDP. Para pemimpin kota sepakat mengimplementasikan deklarasi melalui penyusunan rencana aksi yang akan dibuat dalam jangka waktu satu minggu setelah penandatanganan. Mereka menyadari bahwa saat ini pelayanan sanitasi masih jauh dari kebutuhan dan perbaikan kondisi sanitasi, terutama di kawasan kumuh, merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan.

Hari pertama lokakarya diawali *key note speech* dari Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas Basah Hernowo dan Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur Chairul Djaelani. Sebagai pembicara pada hari pertama antara lain M Taufik (Ketua Bappeda Kota Blitar) yang menyampaikan topik *Pro Poor Sanitation*, Alex Chalik

FOTO:DOK ISSDP



(Kasubdit Pengembangan Sistem Drainase dan Persampahan Direktorat Jenderal Cipta Karya PU) yang berbicara Standar Pelayanan Minimum, dan Konsultan ISSDP yang menyampaikan Kerangka Pendukung Kebijakan Nasional dan Aspek Sumber Pembiayaan Sanitasi.

Pada sambutannya, Basah Hernowo mengharapkan ke enam kota dapat menjadi *center of excellent* atau motor replikasi untuk pengembangan sanitasi kota-kota lain di Indonesia. Untuk memberikan gambaran tentang *Pro Poor Sanitation* di kota Blitar, dilakukan kunjungan lapangan ketiga lokasi berbeda, yaitu Puskesmas Bendo (*Citizen Charter*), Fasilitas Sanimas 3 di Kelurahan Sanan Wetan, dan BR2K (Bantuan Revitalisasi Rumah Kumuh) di Kelurahan Tanjung Sari.

Pada kunjungan lapangan ke Puskesmas Bendo diperoleh informasi bahwa Puskesmas ini merupakan salah satu proyek *citizen charter* yang merupakan kontrak atau kesepakatan antara Pemerintah Kota sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai

konsumen. Proyek ini menitikberatkan pada apa dan bagaimana layanan harus disediakan serta bagaimana masyarakat berkontribusi. Inovasi yang diperkenalkan adalah dipahami dan dilaksanakannya hak dan kewajiban pelaku pelayanan publik.

Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi lebih baik. Untuk mengawasi dan memantau kinerja pelayanan dibentuk badan yang beranggotakan tokoh masyarakat dan anggota DPRD. Evaluasi pengelolaan Puskesmas ditinjau dari sisi kepuasan pelanggan. Terlepas dari itu, pendekatan ini bisa berjalan karena adanya dukungan Pemda Blitar dalam hal memberikan insentif atas keberhasilan.

Pada kunjungan ke lokasi Sanimas 3 terlihat masyarakat mampu membangun dan mengelola fasilitas sanitasi serta memberikan akses kepada masyarakat miskin. Pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Sanimas 3 di Sanan Wetan.

Kunjungan ke lokasi BR2K dimaksudkan melihat usaha yang dilakukan Kota Blitar untuk menggabungkan program sanitasi dengan program BR2K bagi masyarakat miskin. Dari proses perbaikan rumah kumuh sampai penyediaan fasilitas sanitasi terdapat langkah-langkah strategis yang dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain dalam menanggapi sanitasi yang *"pro-poor"*.

Pemerintah kota memberi bantuan berbentuk stimulan yang bertujuan memperbaiki dan membangun hunian yang layak dengan sasaran masyarakat miskin. Pemerintah Kota Blitar juga memberikan bantuan dana yang khusus dialokasikan untuk membangun *septic tank* komunal sehingga hunian yang dibangun tersebut memiliki fasilitas sanitasi memadai.

Pada hari kedua, agenda lokakarya diwarnai pemaparan kemajuan kerja masing-masing Pokja Sanitasi. Pokja Sanitasi Jambi, Payakumbuh, dan Denpasar memaparkan rencana penyelesaian buku putih sanitasi, yaitu buku yang berisi potret kondisi sanitasi kota. Sedangkan Pokja Sanitasi dari tiga kota lainnya, Blitar, Solo, dan Banjarmasin menjelaskan persiapan penyusunan rencana strategis sanitasi. Diskusi tanya jawab setiap presentasi tampak terlihat aktif, memberikan masukan kepada program masing-masing kota. Sesi terakhir lokakarya adalah diskusi kelompok tentang metode penyusunan rencana strategis sanitasi.

Lokakarya diakhiri dengan penyimpulan oleh Nugroho Tri Utomo, Kasubdit Air Minum dan Air Limbah Bappenas. Nugroho menggarisbawahi Deklarasi Blitar merupakan momentum yang penting untuk pembangunan sanitasi dan itu diwujudkan dengan komitmen yang diberikan pemerintah kota. Lokakarya ditutup oleh Ketua Bappeda Blitar M Taufik. Setelah acara lokakarya berakhir, peserta mendapat kesempatan mengunjungi perpustakaan dan makam Bung Karno. ■ IA dan YW

Kegiatan WASPOLA Januari-Maret 2007

Semaikan Kearifan untuk Menuai Keberhasilan

Tahun 2007 ini WASPOLA memasuki hampir satu dasawarsa perjalanan mengusung Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dalam rangka meningkatkan pelayanan AMPL di daerah. Bukan waktu yang sebentar dan tidak sedikit tantangan yang dirasakan dalam setiap langkahnya. Walaupun demikian, masa *exit strategy* ditahun ini ditandai dengan semangat menyemaikan kearifan dalam memaknai Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM) di daerah dengan melihat beberapa daerah telah menuai keberhasilan dari penerapan kebijakan tersebut.

Perlu dukungan eksekutif dan legislatif

Tolak ukur keberhasilan dapat dilihat antara lain beberapa daerah mendapat dukungan politis dari pimpinan daerah yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pejabat teknis dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan. Disamping legalitas terhadap kelembagaan Pokja melalui SK pimpinan daerah atau adanya legalitas dalam implementasi rencana strategi (Renstra) pembangunan AMPL.

Keberhasilan yang lain adalah kelembagaan yang menandai kuatnya fungsi dan peran Pokja melalui berbagai inisiatif dan inovasi Pokja AMPL di daerah. Kemudian dukungan pembiayaan berupa alokasi dana operasional Pokja, mobilisasi berbagai sumber pembiayaan dalam mendukung operasionalisasi Renstra.



FOTO:DOK WASPOLA

Bupati Gorontalo David Bobohoe Akib dalam wawancara dengan tim penulis buku *Lesson Learned WASPOLA* menyatakan keterlibatan komunitas akan memperluas pengembangan capaian dan keberhasilan karena adanya rasa memiliki dan kesadaran dari komunitas. "Komitmen untuk partisipasi masyarakat sudah semestinya didukung dari parlemen lokal dan pemerintah," katanya. Sementara Kepala DPRD Kabupaten Gorontalo Anto Naue tidak menolak untuk turut mendukung komitmen dan partisipasi masyarakatnya.

Hal ini terlihat dari kunjungan tim ke tiga desa yang dikunjungi, yaitu Dembe I, Lonuo, dan Olimoo. Sejak 2004 Pokja AMPL memainkan peran cukup banyak dalam memfasilitasi permasalahan yang dihadapi lembaga-lem-

baga yang didirikan sebelumnya seperti BPAM, UPS, dan sebagainya.

Pokja AMPL Daerah memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat dan hasilnya solusi yang ditemukan sendiri oleh masyarakat. CLTS (*Community Led Total Sanitation*) atau Gerakan Sanitasi Total Masyarakat cukup berhasil diterapkan. Komunitas merasakan perubahan yang lebih baik dalam keseharian mereka. Dengan adanya jamban, para perempuan mengatakan, "Sekarang sudah senang", dan para lelaki menyatakan konsentrasi kerja 100%, "Melaut tidak ingat *ambe* air lagi".

Renstra, salah satu output kunci adopsi kebijakan

Renstra atau Rencana Strategi Pembangunan AMPL di daerah merupakan output penting sebagai tolak

ukur memastikan terjadinya adopsi kebijakan melalui mekanisme perencanaan. Sampai akhir Desember 2006, 14 daerah sudah melakukan finalisasi Renstra, delapan daerah menyelesaikan draf dan 24 daerah masih dalam proses menyusun draf Renstra.

Beberapa kabupaten telah menunjukkan inovasi maupun inisiatifnya untuk memastikan Renstra mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Salah satunya bulan Januari lalu Kabupaten Pekalongan mengadakan lokakarya kedua, sebagai kelanjutan lokakarya sebelumnya dengan mempertimbangkan semua input dari berbagai pihak termasuk masyarakat.

Sedangkan di TTS (Timur Tengah Selatan) pada 19 Januari 2007 diselenggarakan lokakarya Renstra yang dihadiri 25 peserta dari berbagai pihak. Hasilnya menyepakati tujuan strategis pembangunan AMPL yaitu mengurangi prevalensi penyakit menular, meningkatkan kesadaran, dan menyusun kebijakan daerah tentang pembangunan AMPL berbasis masyarakat.

Lokakarya di Rotendao dibuka bupati dan pada saat penutupan unsur pimpinan DPRD menegaskan dukungannya terhadap penyusunan Renstra. Selama dua hari efektif telah dihasilkan draf kedua Renstra AMPL. Beberapa kesepakatan dan penegasan dari hasil lokakarya akan disempurnakan sebagai bahan pemaparan kepada bupati dan DPRD sebelum dilegalakan.

Keragaman pendekatan dalam operasionalisasi kebijakan

Februari 2007, Sumba Barat dan Sumba Timur mengadakan lokakarya dan membentuk kelompok kerja yang dihadiri sekitar 60 orang dari unsur dinas terkait dan tokoh masyarakat. Lokakarya dibuka wakil bupati setempat.

Sumba Timur melihat mandat pen-



FOTO:DOK WASPOLA

ting dibentuknya kelompok kerja antara lain karena banyaknya sarana terbangun yang tidak berkelanjutan, rendahnya cakupan layanan AMPL, dan berkurangnya waktu produktif khususnya bagi anak usia sekolah dikarenakan harus mengambil air dengan jarak yang jauh.

Beberapa program yang diusulkan antara lain peningkatan kapasitas, penyiapan strategi pembangunan AMPL, peningkatan kelestarian lingkungan, peningkatan layanan AMPL, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Sedangkan kelompok kerja Provinsi Jawa Tengah mengadakan layanan penguatan kapasitas kelompok kerja kepada 20 peserta dari anggota Kelompok Kerja AMPL provinsi. Topik yang dibahas antara lain meliputi paradigma pembangunan, kebijakan nasional AMPL, dasar-dasar fasilitasi, manajemen kolaborasi kelompok kerja, serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Sedangkan Kabupaten Kebumen mengadakan Pelatihan CLTS (*Community Led Total Sanitation*) di Desa Bocor untuk para sanitarian. Diikuti 57 peserta termasuk dinas kesehatan dan tokoh masyarakat.

Pelatihan ini menghasilkan rencana

tindak lanjut dari dinas kesehatan untuk melakukan pemucuan di 11 desa terpilih serta terbentuknya dukungan positif dari pemerintah daerah bahwa program sanitasi dapat dilakukan dengan pendekatan non-subsidi.

Membangun komitmen dan keberlanjutan

Untuk bersama membangun komitmen dalam keberlanjutan pembangunan AMPL dilaksanakan Lokakarya Nasional di Semarang pada 6-9 Februari 2007. Acara ini diikuti 66 peserta dari daerah, 21 dari Pokja AMPL dan WASPOLA. Lokasi Semarang dipilih karena adanya contoh inovasi dari Kabupaten Pekalongan yang dinilai telah mengadopsi prinsip-prinsip kebijakan ke dalam program pembangunan AMPL.

Topik dari Loknas adalah berbagi pengalaman Renstra, inovasi pembiayaan, dan peningkatan peran koordinasi dan efektifitas. Pada akhir lokakarya dengan pengalaman yang diperoleh dari daerah lain; seluruh provinsi dan kabupaten menyatakan optimis melanjutkan agenda pembangunan AMPL. Hal itu perlu didukung dan dibantu dalam teknis pelaksanaannya. ■ WH

Membangun Jejaring Komunikasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Menjadikan Air Minum dan Sanitasi sebagai Isu "Sexy" bagi Media Massa

Kru *stand by* sesuai tugas masing-masing. Cahaya lampu menerangi wajah presenter kondang yang tersenyum membawa gelas besar berisi air. Sementara kameraman siap dengan *angle* masing-masing. Lalu terdengar *program director* berteriak, "3-2-1 action!".

"Halo, selamat pagi pemirsa, saya membawa gelas besar air minum karena hari ini adalah Hari Air Sedunia", demikian sapa Dick Doank dan Desy Ratnasari saat membuka acara "Selamat Pagi" di Trans7. Pagi itu khusus menayangkan serangkaian topik seputar air minum dan sanitasi. Koordinator Pokja AMPL Dr. Oswar Mungkasa hadir sebagai *special guest* (bintang tamu).

Kesadaran stasiun televisi, radio, dan media cetak dalam mengangkat air minum dan sanitasi tentu menjadi hal yang menggembirakan. Mengingat selama ini sebagian besar praktisi media menganggap isu sektor AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) belum menjadi sesuatu yang "sexy" (baca: menarik) untuk diberitakan.

Padahal isu tersebut penting untuk diketahui publik. Selain permasalahan yang cukup rumit, para pelaku sektor AMPL memiliki informasi dan data yang berbeda-beda sehingga membingungkan media massa. Lalu kemana media massa harus memperoleh informasi? Juga belum jelas, sementara kerja media membutuhkan waktu yang cepat. Pendapat tersebut dilontarkan praktisi media pada acara *AMPL Open House*, 22 Februari 2007, di sekretariat Pokja AMPL Jalan Cianjur 4 Menteng, Jakarta.



FOTO:DOK/POKJA AMPL

Disisi lain para pelaku sektor air minum merasa banyak proyek telah dilaksanakan, tapi informasi manfaat dan gaungnya kepada publik sangat kecil. Pemberitaan di media massa hanyalah seputar *bad news* (berita buruk) mengenai AMPL. Hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk mau duduk bersama termasuk dalam hal ini media massa, memikirkan jalan keluar yang tepat sehingga terjadi suatu sinergi maksimal dari kedua belah pihak.

Mengangkat isu AMPL melalui media massa

Awal 2007 ini di tingkat pusat mempersiapkan serangkaian kegiatan implementasi strategi komunikasi, salah satunya media relation dan advokasi media. Diawali keikutsertaan tim WASPOLA dalam *On Communications Workshop on Water and Sanitation Reform in East Asia Discussion Forum for Governments, Mass Media, and WSS Agencies* yang diselenggarakan WSP/World Bank di

Bangkok awal Februari 2007.

Diikuti enam negara yang menghadirkan peserta dari pemerintah dan media massa. Delegasi Indonesia dihadiri PU, Depkes, Bappenas, serta media massa dari Jakarta Post, Kompas, Kantor Berita Antara, Xinhua News Agency, dan Trans TV.

Hasil pertemuan di Bangkok, aksi pertama yang dilakukan adalah mengundang media massa berkunjung di rumah AMPL, WASPOLA, dan ISSDP 22 Februari 2007. Acara yang dihadiri sekitar 25 wartawan dari berbagai media massa termasuk empat stasiun televisi berlangsung santai dalam jamuan makan siang bersama.

Praktisi media dipertemukan dengan orang-orang kunci dari sektor AMPL, seperti Bappenas, PU, Depdagri, Depkes, KLH, WASPOLA, ISSDP dan ESP/USAID. Nugroho dari Bappenas menyatakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi bisa diraih melalui partisipasi pu-

blik dan dalam hal ini media sangat kuat mempromosikan hidup sehat dan perubahan perilakunya. Sementara Garry Swisher (Waspola) menambahkan ketersediaan komunitas untuk berpartisipasi tergantung pada pemahaman terhadap pentingnya nilai-nilai mengenai air minum dan sanitasi. Dengan memahami isu AMPL, akan sangat membantu media dalam mengemas pesan terhadap publik secara tepat.

Sebagian besar jurnalis menyatakan sangat membutuhkan banyak informasi dan materi untuk dipublikasikan dari sektor ini. Dari pertemuan tersebut, semua pihak menggagas pentingnya mengembangkan kelanjutan jaringan komunikasi dan keterlibatan media dalam acara atau agenda yang serupa.

Mengembangkan jaringan komunikasi

Secara tanggap, even di atas ditindaklanjuti dengan *Workshop Communication Networking* antara pelaku sektor AMPL dengan media massa sejumlah 50 peserta pada 27 Februari 2007. Workshop ini diselenggarakan oleh BAPPENAS, WASPOLA bekerjasama dengan JAS (Jaringan Air dan Sanitasi) dan FORKAMI. Tujuan utama pertemuan adalah memetakan potensi semua pihak melalui mekanisme jaringan komunikasi sehingga dapat menampung informasi secara lebih luas.

Dari sesi pemetaan strategi ditemukan hal menarik, ternyata banyak kegiatan yang serupa yang dilakukan antarpelaku maupun *stakeholder* di sektor ini. Sehingga akan lebih efektif dan optimal apabila satu sama lain saling berkontribusi maupun memanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dikemukakan Harian *Jakarta Post* dan Media Indonesia yang membutuhkan informasi, data akurat, dan gambar-gambar di lapangan untuk mendukung pemberitaan seperti Hari Air Sedunia.

Sementara kelompok pelaku sektor mempunyai banyak informasi dan materi tetapi tidak tahu bagaimana cara

mempublikasikannya. Jelas terlihat ada kebutuhan yang sebetulnya saling menjawab dari kedua belah pihak, hanya butuh penyesuaian.

Dari pertemuan ini dihasilkan kesepakatan dibentuknya "Jejaring Komunikasi AMPL" sebagai wadah saling berbagi informasi dan kampanye publik. Mekanisme pertemuan akan berlangsung 3 bulan sekali dengan kesekretariatan di kantor Pokja AMPL.

Salah satu kegiatan bersama dari jejaring ini diwujudkan pada 20 Maret 2007 dengan mengadakan "Dialog Media Mengenai Kelangkaan Air Baku: Tantangan dalam Penyediaan Air Minum untuk Perkotaan" dalam rangka Peringatan Hari Air Sedunia 2007. Diskusi yang dimoderatori dr. Lula Kamal, artis dan presenter ini diselenggarakan Pokja AMPL, FORKAMI dan ESP/USAID.

Menghadirkan Duta MDGs Erna Witoelar, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Syahrial Loetan, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko, dan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Budirama Natakusumah.

Dilanjutkan kunjungan ke lokasi Kelurahan Jatake, Kecamatan Jati Ujung, Tangerang dengan mengunjungi MCK Plus++ dampingan BEST untuk melihat bagaimana MCK tidak hanya sebagai tempat pembuangan kotoran manusia tetapi sekaligus bisa dipergunakan sebagai bahan olahan biogas yang dapat digunakan untuk memasak sehari-hari. Praktisi media nampak cukup tertarik dengan model sanitasi semacam ini terbukti lebih dari enam media menayangkan program ini.

Perlunya pusat informasi dan pengembangan media AMPL

Hubungan kemitraan yang telah dibangun dengan media massa menun-

jukkan isu AMPL yang tadinya dirasa kurang "sexy" sekarang mulai dilirik. Berbagai liputan dan tayangan khusus mengenai air dan sanitasi mulai mendapat tempat di berbagai media massa. Hasil monitoring menunjukkan selama Maret 2007 lebih dari enam stasiun televisi menyiarkan secara intens melalui pemberitaan, majalah udara, maupun talk show. Demikian juga dengan radio dan media cetak. Tulisan-tulisan mengenai AMPL mulai terarah dengan baik.

Perkembangan positif tersebut perlu ditindaklanjuti dengan membentuk AMPL *Information Centre* sehingga dapat membantu media massa mengangkat isu AMPL di masa mendatang. Sebagai langkah awal, 11-14 Maret 2007 WASPOLA mengadakan Pelatihan Pengembangan Media AMPL bagi staf internal dan Pokja AMPL Pusat di Yogyakarta bekerjasama lembaga pelatihan media Studio Audio Visual PUSKAT.

Selama tiga hari pelaksanaan, pelatihan dengan metode *learning by doing* ini bermaksud mengembangkan pemahaman dan ketrampilan peserta tentang media komunikasi AMPL yang tepat sasaran dan efektif, salah satu hal yang penting adalah kemampuan kerja tim. Peserta berlatih mengenai karakteristik media dan menghasilkan produksi sendiri baik foto esai, drama radio, dan program iklan layanan video/televi. Tim juga berkesempatan mengunjungi Radio Komunitas BBM yang dikelola sendiri oleh masyarakat Desa Minomartani serta mengadakan siaran langsung dengan masyarakat setempat.

Bagaimanapun pelaku sektor AMPL membutuhkan kekuatan media untuk publikasi sementara media membutuhkan materi AMPL sebagai bahan tayangan kepada publik. Terciptanya dialog dan *public sphere* menjadi salah satu strategi penting sehingga nantinya terjadi partisipasi publik yang positif dan kritis terhadap pembangunan AMPL. ■WH

Pembuatan Jamban Terbanyak 1719 dalam Satu Tahun MURI untuk Warga Pandeglang

Sejumlah 1719 jamban keluarga dibangun selama kurun waktu satu tahun. Sebuah prestasi yang mengembirakan bagi warga di enam desa dari lima kecamatan yaitu Saketi, Pagelaran, Angsana, Patia, dan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terlebih pembuatan jamban atau cubluk itu dengan swadaya alias tanpa subsidi pemerintah.

Prestasi ini karena kesadaran warga terhadap resiko pencemaran lingkungan yang disebabkan praktek buang air besar (BAB) di tempat terbuka atau di sungai. Kesadaran ini yang pada akhirnya menggiring warga Pandeglang berinisiatif membangun jamban di belakang rumah.

Pantas bila kesadaran warga ini akhirnya membuahkan hasil berupa penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). "Pembuatan Jamban Terbanyak 1719 dalam Kurun Waktu Satu Tahun", demikian MURI mencatat prestasi yang diukir warga Pandeglang.

Penyerahan piagam MURI dilakukan oleh Representatif MURI Nadri kepada Bupati Pandeglang A. Dimiyati bertepatan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang yang ke-133, Minggu 1 April 2007.

Penghargaan ini tak terlepas dari prakarsa Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Banten dan PCI (*Project Concern International*), pemegang dan penyelenggara Pemkab Pandeglang, dan pendukung yaitu forum lima kecamatan dan penggerak PKK lima kecamatan, serta Pokja AMPL Pusat dan WASPOLA (*Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning Project*).

Dimiyati mengatakan penghargaan



FOTO:WIWIT

Ternyata pendekatan dengan cara menimbulkan rasa jijik dan malu kepada warga, terbukti ampuh memancing warga membangun jamban.

ini sebagai sebuah tantangan agar lebih bersemangat lagi dalam membudayakan hidup bersih dan sehat. "Semangat dan usaha keras ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten dan warganya," ungkapnya usai menerima piagam penghargaan

MURI.

Diawali gerakan CLTS (*Community Led Total Sanitation*) yaitu gerakan sanitasi total yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dan gerakan ini diinisiasi WASPOLA melalui pelatihan di provinsi Banten. Ini yang pada akhirnya menginspirasi Pokja AMPL Provinsi Banten menindaklanjutinya dengan fasilitasi PCI.

Gerakan yang memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk mengkaji keadaan dan resiko pencemaran lingkungan yang disebabkan praktek buang air besar di tempat terbuka. Dan ternyata pendekatan dengan cara menimbulkan rasa jijik dan malu kepada warga, terbukti ampuh memancing warga membangun jamban.

■ BW

Hari Air Sedunia 2007

Menyiasati Kelangkaan Air

FOTO: MALIK

Sudah lebih dari 10 tahun penanaman Hari Air Sedunia. Rupanya air akan selalu menjadi persoalan yang kompleks yang dialami banyak negara, terutama negara-negara miskin. Tak disangkal karena air memang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Hari Air Sedunia (*World Water Day*) diperingati setiap tanggal 22 Maret. Peringatan ini sebagai wahana untuk memperbarui satu tekad dalam melaksanakan Agenda 21 yang dicituskan pada tahun 1992 dalam *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro. Peristiwa itu secara populer dikenal sebagai *Earth Summit (KTT Bumi)*.

Pada sidang umum PBB ke-47, 22 Desember 1992 melalui Resolusi Nomor 147/1993, usulan Agenda 21 diterima sekaligus ditetapkan pelaksanaan Hari Air Sedunia setiap 22 Maret mulai tahun 1993 di setiap negara anggota PBB termasuk Indonesia.

Saat ini, sekitar 100 juta penduduk Indonesia belum berkesempatan mempunyai akses air yang aman untuk dikonsumsi.

Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Pusat, jumlah volume air total di bumi sekitar 1,4 miliar km³. Jumlah yang sungguh besar dan 97,3 persen adalah air laut. Hanya 2,7 persen saja air yang tersedia sebagai air tawar yang ada di daratan.

Namun jumlah air tawar yang tersedia di planet yang dihuni manusia ini, sebanyak 37,8 juta km³ air tawar tersebut berupa lapisan es di puncak-puncak gunung dan gleyser dengan porsi 77,3



persen. Sementara air tanah dan resapan hanyalah 22,4 persen serta air danau dan rawa hanya 0,35 persen. Lalu uap air di atmosfer sebanyak 0,04 persen dan sisanya merupakan air sungai sebanyak 0,01 persen.

Maka dari itu, tidak salah bila di tahun 2007 ini, tema yang dipetik adalah Menanggulangi Kelangkaan Air (*Coping with Scarcity*). Tema ini menyoroti peningkatan signifikan dari kelangkaan air di dunia dan perlunya peningkatan kesatuan dan kerjasama dalam menjamin manajemen kelangkaan sumber daya air yang berkelanjutan, efisien, dan adil, baik di tingkat internasional maupun lokal.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan dengan berlatar iklim tropis, secara kuantitas tak akan kekurangan air. Namun, setiap tahun kualitas air selalu menurun sementara kebutuhan akan air bersih terus

meningkat.

Dengan demikian tema ini menjadi penting karena sumber daya air kita telah mengalami degradasi dengan tingkat kecepatan yang semakin memunculkan dan telah mencapai tingkatan krisis untuk ketersediaan air bersih. Demikian juga jumlah kejadian bencana alam yang terkait dengan air (banjir dan tanah longsor) yang terjadi di seluruh Indonesia semakin meningkat dengan jumlah korban manusia yang meninggal mencapai lebih dari 750 orang, hilang lebih dari 250 orang, dan ratusan ribu orang mengungsi serta menyebabkan lebih dari 200.000 rumah telah rusak selama periode 5 tahun terakhir.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) atas nama *United Nations - Water (UN-Water)*, selaku penyelenggara kegiatan, telah menyiapkan beberapa agenda kegiatan dalam menyambut Hari Air Sedunia

yang telah dimulai sejak Januari hingga Maret lalu. Acara utama Peringatan Hari Air Sedunia pada 22 Maret 2007 dipusatkan di kantor pusat (*headquarters*) FAO, Roma, Italia. Dalam acara ini dihadiri para ahli dari seluruh dunia yang menyampaikan isu-isu terkait dengan permasalahan kelangkaan air.

Sementara kegiatan Perayaan Hari Air Sedunia 2007 di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai pihak dengan bentuk dan caranya masing-masing.

1. Bappenas, FORKAMI dan ESP-USAID, Pokja AMPL Pusat menggelar Diskusi dan Kunjungan Media dengan tema "Kelangkaan Air Baku: Tantangan dalam Penyediaan Air Minum untuk Perkotaan di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (20/3). Diskusi menghadirkan pembicara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Syahrial Loetan, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun, Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Budirama Natakusumah, dan Lula Kamal selaku moderator. Selesai diskusi, insan pers berkunjung ke Kelurahan Jatake, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang, untuk mengamati bangunan MCK Plus++.

2. Sebuah talkshow menarik dalam kemasan acara "Selamat Pagi" di layar Trans7, Kamis (22/3) pagi, memetik topik "Hidup dengan Sanitasi dan Ketersediaan Air yang Lebih Baik". Dihadirkan narasumber Kasubdit Persampahan dan Drainase Bappenas Oswar Mungkasa dengan presenter Desy Ratnasari dan Dik Doank.

3. Radio Delta FM Jakarta mengadakan talkshow mengenai air dalam kemasan acara "Indonesia Siesta", Kamis (22/3) siang. Talkshow mengangkat tema "Kelangkaan Air Baku: Tantangan dalam Penyediaan Air Minum untuk Perkotaan". Kasubdit Persampahan dan Drainase Bappenas

TEMA-TEMA HARI AIR SEDUNIA SETIAP TAHUN

1994 : <i>Caring for Our Water Resources is Everyone's Business</i> (Peduli Akan Sumber Daya Air adalah Urusan Setiap Orang)
1995 : <i>Water and Women</i> (Air dan Wanita)
1996 : <i>Water for Thrifty City</i> (Air untuk Kota-Kota yang Haus)
1997 : <i>The World's Water: is There Enough?</i> (Air Dunia Cukupkah?)
1998 : <i>Groundwater-The Invisible Resource</i> (Air Tanah-Sumber Daya yang Tak Kelihatan)
1999 : <i>Everyone Lives Downstream</i> (Setiap Orang Tinggal di Bagian Hilir)
2000 : <i>Water for 21st Century</i> (Air untuk Abad 21)
2001 : <i>Water for Health</i> (Air untuk Kesehatan)
2002 : <i>Water for Development</i> (Air untuk Pembangunan)
2003 : <i>Water for Future</i> (Air untuk Masa Depan)
2004 : <i>Water and Disasters</i> (Air dan Bencana)
2005 : <i>Water for Life</i> (Air untuk Kehidupan)
2006 : <i>Water and Culture</i> (Air dan Budaya)
2007 : <i>Coping with Scarcity</i> (Menanggulangi Kelangkaan Air)

Oswar Mungkasa didaulat sebagai narasumber didampingi pembawa acara artis cantik Shahnaz Haque.

4. Berbagai kegiatan yang dikoordinasi oleh Departemen Pekerjaan Umum antara lain kampanye peduli air dan penggalakan Hari Air Sedunia, berbagai lokakarya, pameran dan perlombaan, dan kegiatan hingga tingkat daerah. Sebagai puncak acara Hari Air Sedunia 2007 untuk tingkat Nasional berupa penanaman pohon langka bernilai ekonomi (*arboretum*) di Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dengan semangat "Muda Menanam, Tua Memanen" pada 9 Mei 2007 di Situ Cikaret, Bogor.

5. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan menggelar kampanye peduli lingkungan di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Kampanye yang bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia ini disponsori Yayasan Anand Ashram, yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *National Integration Movement*. Mereka mengajak masyarakat agar mencintai air dan alam sekitar.

6. Sekitar 45 mahasiswa ITS (Institut Teknologi Surabaya) yang tergabung dalam Pecinta Lingkungan Hidup (PLH) Siklus ITS Surabaya menggelar aksi teatrical di perempatan Gubeng Pojok, Minggu (11/3). Mereka secara khusus menyoroti kondisi air Sungai Kalimas yang sudah sangat tercemar

meski sampai sekarang masih menjadi bahan baku air minum warga Surabaya.

7. Memperingati hari air sedunia, ratusan siswa sekolah dasar di Kota Solo menebarkan benih ikan di kolam Kapujanggan yang terletak di Kompleks Sriwedari Solo, Jumat (23/2). Mereka juga membersihkan lingkungan di sekitar kolam yang dibangun sejak Paku Buwono X tersebut.

8. Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan - FT UI menyelenggarakan kegiatan Uji Kualitas Air (UKA) gratis atau diskon hingga 90% biaya pemeriksaan kualitas air untuk parameter tertentu. Progam UKA berlangsung dari tanggal 1 hingga 22 Maret 2007.

9. Perayaan Hari Air Sedunia di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dipusatkan di Taman Sari sebagai bentuk peringatan akan pentingnya menjaga sumber air bagi masyarakat. Tema Hari Air Sedunia 2007 yaitu "Mengatasi Kelangkaan Air" saat ini dirasakan langsung sebagian masyarakat Serambi Mekkah itu. Tak hanya di kota Banda Aceh, kondisi kelangkaan air juga terjadi di daerah hulu seperti di Desa Jruek Balee.

10. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (LSM Gebrak) melakukan teatrical mandi di Bundaran Otorita Batam (OB) guna memperingati Hari Air Sedunia. Teatrical ini menggambarkan betapa sulit dan mahalnya air yang merupakan kebutuhan pokok manusia. ■ **BW**

Diskusi dan Kunjungan Media

Sanitasi Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dinilai sangat kurang. Hingga saat ini, kurang lebih 100 juta penduduk Indonesia belum mempunyai akses terhadap air yang aman untuk diminum dan sanitasi dasar.

Berdasarkan laporan MDGs (*Millennium Development Goals*) Asia-Pasifik 2006 dan laporan *A Future Within Reach*, Indonesia termasuk dalam negara-negara yang mundur dalam upaya pencapaian MDGs.

Demikian persoalan yang muncut dalam Diskusi dan Kunjungan Media dengan tema "Kelangkaan Air Baku: Tantangan dalam Penyediaan Air Minum untuk Perkotaan" dalam memperingati Hari Air Sedunia 2007. Acara ini digelar POKJA AMPL kerja sama FORKAMI dan ESP-USAID pada 20 Maret 2007 di Bappenas.

Acara yang dihadiri media massa dan elektronik ini menghadirkan pembicara Erna Witoelar (*MDGs Ambassador*), Syahril Loetan (Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas), Agoes Widjanarko (Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum), I Nyoman Kandun (Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan), Budirama Natakusumah (Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta), dan Lula Kamal sebagai moderator.

Duta MDGs Erna Witoelar memaparkan untuk sampai ke target MDGs pada tahun 2015, kinerja pencapaian Indonesia kurang menggembirakan dan bahkan cenderung adanya penurunan. Hal ini menempatkan Indonesia dalam kategori terbawah bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini dan Filipina.

"Pada laporan MDGs 2006, penurunan pencapaian kerja Indonesia dan

beberapa negara lain tak hanya soal air dan sanitasi, tapi juga bidang pendidikan dan kematian ibu melahirkan," ungkap Erna. Menurutnya, bermacam hal mempengaruhi kondisi penurunan ini, seperti adanya konflik politik dan banyak terjadinya bencana.

Ironisnya, meskipun Indonesia masuk 10 negara kaya air namun ancaman krisis air baku tak bisa terhindarkan. Menurut catatan, dari kondisi neraca air di Pulau Jawa, hingga tahun 2000 ketersediaan air per kapita di Jawa sebesar 1.750 meter kubik per kapita per tahun jauh di bawah standar cukup yaitu minimal 2.000 meter kubik per kapita per tahun.

Angka ini diperkirakan semakin menurun hingga mencapai 1.200 meter kubik per kapita per tahun pada 2020. Selain Jawa, kelangkaan air juga akan mengancam Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Potensi kelangkaan air baku semakin diperparah oleh pencemaran sungai terutama air limbah rumah tangga. Sebanyak 76,2 persen dari 52 sungai di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi tercemar berat oleh cemaran organik. Sementara 11 sungai-sungai utama tercemar berat unsur amonium.

Mayoritas sungai yang terdapat di kota padat penduduk seperti Jawa, cenderung lebih tercemar oleh bakteri *coliform* dan *fecal coli*. Keberadaan bakteri *fecal coli* menunjukkan terjadinya pencemaran tinja dan bakteri ini adalah penyebab utama penyakit diare.

Lebih lanjut Erna mengatakan kondisi memprihatinkan yang terjadi di Indonesia ini membutuhkan kerja sama semua pihak agar tercapai kondisi yang lebih baik. "Setiap peran masyarakat itu penting seperti berkampanye, memberihkan sungai, membuat sumur re-

sapan, dan sebagainya," ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Syahril Loetan (Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas). Menurutnya, buruknya penanganan sanitasi di Indonesia terjadi akibat anggapan bahwa masalah sanitasi sepenuhnya tanggung jawab masing-masing rumah tangga dan persoalan dianggap selesai saat sebuah rumah tangga sudah menyediakan fasilitas sanitasi dengan baik.

"Sudah seharusnya sanitasi bukan lagi urusan pribadi tapi menjadi persoalan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi penanganan sanitasi harus dilakukan bersama karena kondisi mendesak dan tak bisa ditunda-tunda lagi," tutur Syahril.

Lebih jauh Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Budirama Natakusumah memaparkan kondisi air permukaan dan air tanah di wilayah DKI Jakarta.

Limbah di wilayah Jakarta, didominasi dari limbah rumah tangga (domestik) yang mencemari 13 aliran sungai di Jakarta.

"Hal ini, perlu adanya upaya-upaya pencegahan antara lain penerapan peraturan-peraturan berkenaan dengan pengelolaan air limbah domestik," jelas Budirama.

Sementara I Nyoman Kandun, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, menjelaskan keinginannya untuk terus mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat. "Bukankah sebuah kemustahilan kita bisa hidup sehat tanpa air bersih?," katanya.

Berdasarkan penelitian, kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan tindakan pencegahan dari penyakit hingga 65 persen. "Perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat tergantung kondisi ekonomi dan pendidikan yang baik. Kuncinya, bumi bisa dihuni manusia karena air," demikian I Nyoman Kandun. ■ BW

Lebih Nyaman dengan MCK Plus++

S iapa tak merasa nyaman hidup di lingkungan bersih? Apalagi bila kebutuhan berupa MCK (mandi, cuci, kakus) terpenuhi dengan baik. Tentu karena kebutuhan itu diperlukan setiap saat oleh semua orang.

Permasalahan kebutuhan dasar berupa MCK kerap dialami masyarakat urban yang, demi kelangsungan hidupnya, rela berjubel-jubel hidup di kota. "Sejak ada bangunan MCK plus ini jadi enak. *Nggak kayak* dulu harus antri di pompa air," kata Hartati (54), warga Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, saat kunjungan media dalam rangka Hari Air Sedunia 2007 yang digelar Pokja AMPL, Selasa (20/3).

Hartati, salah satu warga yang merasa beruntung sebab kompleks di mana ia tinggal dibangun sebuah MCK Plus++. "Di sini banyak kontrakan untuk karyawan pabrik dan kebutuhan air susah. Sekarang *mah* semua sudah terpenuhi. Mandi, cuci, gampang," ujarnya berbinar.

Bangunan dengan teknologi Jerman yang terletak di Kelurahan Jatake, RT 02/01, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang ini terdiri dari 12 kamar, enam untuk toilet dan enam lagi untuk mandi dengan menggunakan *shower*. Sementara tempat mencuci berada di luar.

Tak hanya itu, tinja masyarakat pun dimanfaatkan sebagai biogas untuk memasak dan penerangan. Di kompleks bangunan berbiaya Rp 200 juta dengan ukuran 3 x 8 meter ini terdapat sumur resapan dan taman sehingga lingkungan sekitar kian bersih, sehat, dan nyaman.

Marwan (50), petugas MCK++, sesuai Subuh sudah berada di lokasi dan bertugas hingga pukul 22.00 WIB.



FOTO: BOWO LEKSONO

Menurutnya, untuk sekali buang air orang membayar Rp 300,-, untuk mandi Rp 400,-, sementara mencuci Rp 1.000,-. "Di sini yang memakai kebanyakan ya karyawan pabrik. Sehari sekitar 150 orang yang memakainya," tutur bapak tiga anak ini.

Ditemani istri tercinta, Marwan membuka warung kecil di kompleks itu. Untuk memasak air atau mi instan, biogas hasil MCK++ itulah yang digunakan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan karena kompleks di mana MCK ini berada selalu bersih dan nyaman.

Proyek MCK ini ditangani BEST (Bina Ekonomi Sosial Terpadu) dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Direktur BEST Hamzah Harun Al Rasyid mengatakan tangki septik MCK ini dibangun kedap air dan kedap udara. "Jadi terjamin kebersihan dan kesehatannya," ungkapnya.

Sudah banyak rumah tangga di

Indonesia, terutama yang bermukim di perkotaan, yang memiliki tangki septik sebagai penampung buangan tinja. Jumlahnya hampir 80 persen. Hanya apakah penampung buangan tinja itu sudah memenuhi syarat kesehatan? Sebab tangki septik setidaknya berjarak 10 meter dari sumur dan tidak bocor. Saat ini, di Tangerang terdapat 26 titik MCK++ yang sudah beroperasi.

Tahun 2003, sistem ini diadopsi Pemerintah Indonesia melalui *pilot project* SANIMAS (Sanitasi oleh Masyarakat) melalui kerjasama AUSAID, WSP, dan Bank Dunia. Pada SANIMAS, pelibatan masyarakat menjadi kunci utama pelaksanaan program. Kontribusi masyarakat dipersyaratkan dan fasilitas dikelola langsung oleh masyarakat. Sejak 2005, konsep SANIMAS telah direplikasi Departemen Pekerjaan Umum dan telah menjangkau sekitar 80 kabupaten/kota. ■ **Bowo Leksono**

Lokakarya Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh dicirikan sebagai lingkungan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah atau perumahan yang sangat rendah serta tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah, sampah dan drainase.

Upaya untuk menyusun kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh diawali dengan lokakarya pada 7-9 De-



FOTO:ISTIMEWA

seMBER 2006 yang digagas Direktorat Permukiman dan Perumahan-BAPPE-

NAS dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Rencananya penyusunan kerangka kebijakan tersebut akan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait melalui sebuah kelompok kerja.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat tersusun kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh yang akan menjadi panduan bagi semua pihak dalam menangani permukiman kumuh di Indonesia. ■ **BW**

Lokakarya Koordinasi dan Perencanaan Program AMPL di NTT

Dalam kaitan pelaksanaan program UNICEF 2007 di NTT, dilaksanakan Lokakarya Koordinasi dan Perencanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi NTT kerjasama UNICEF 28 Februari - 1 Maret 2007 di Kupang.

Lokakarya dibuka sekretaris Bappeda NTT dan dihadiri wakil dari Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, UNICEF, sekretariat Pokja AMPL Pusat, instansi provinsi dan daerah yang mendapat dukungan UNICEF, yaitu Kabupaten Alor, Ende, Belu, dan Sikka. Lokakarya ini hasil kerjasama UNICEF, Bappeda NTT, Pokja AMPL pusat, dan WASPOLA.

Astrid, perwakilan UNICEF, mengemukakan perlunya meningkatkan kualitas program kerjasama AMPL antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF. "Pada saat ini daerah mitra kerja baru men-

jangkau NTT dan NTB, tetapi selanjutnya dapat diperluas ke sembilan daerah mitra kerja," katanya di sela lokakarya.

Pada kesempatan diskusi mengemuka beberapa isu utama terkait pembangunan AMPL, yaitu (i) kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber mata air, (ii) rendahnya kemampuan



FOTO:DOK/POKJA AMPL

masyarakat, (iii) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (iv) pemilihan teknologi tepat guna, (v) rendahnya kesadaran masyarakat, (vi) konflik pemanfaatan sumber daya air, (vii) lemahnya koordinasi, (viii) kurangnya konsistensi rencana dan implementasi, (ix) tidak tersedianya basis data, dan (x) tidak tersedianya rencana strategis.

Secara garis besar, kegiatan kerjasama pada 2007, mencakup (i) peningkatan kapasitas berupa pembentukan Pokja AMPL di masing-masing daerah, pembenahan dan pengelolaan data dan penyusunan renstra, (ii) peningkatan kesadaran masyarakat melalui PHBS dan CLTS, (iii) pembangunan fasilitas berupa Penampung Air Hujan (PAH) dan jamban sekolah, dan (iv) pembenahan monitoring dan evaluasi. ■ **BW**

Menyambut Hari Air Sedunia Berbagi Pohon Berbagi Kehidupan

"Ibu tahu kapan hari air sedunia?" tanya Geri Andrian, pelajar SMA YPI 45 Bekasi, kepada seorang ibu yang berada di sebuah mobil. Sambil menerima sebatang bibit pohon dari Geri, ibu itu pun balik bertanya, "Enggak tuh. Emang kapan?".

Mungkin memang tidak penting orang harus tahu kapan hari air sedunia. Dan tak ada keharusan pula orang memperingatinya. Karena yang paling penting adalah memahami hakekat dan esensinya. Air adalah kebutuhan dasar manusia, tak satupun manusia mampu melakukannya.

Memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh tepat pada 22 Maret 2007, Perusahaan Coca-Cola Indonesia kerjasama USAID Indonesia menggelar kegiatan di Bumi Perkemahan dan Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta, pada 18 Maret 2007. Kegiatan ini melibatkan 40 pelajar dari empat SMA di Bekasi yaitu SMAN 2, SMAN 6, SMA YPI 45, dan SMA Al-Azhar Kemang Pratama. Disamping sejumlah warga Kampung Wangkal dan pelajar SDN Sukadanau, serta beberapa pakar lingkungan dan pengelolaan air.

Mengapa peringatan Hari Air Sedunia 2007 dirayakan di Cibubur? Menurut *Deputy Chief Executive Operating Committee Coca-Cola Foundation Indonesia* Triyono Prijosoessilo, Cibubur merupakan daerah tangkapan hujan dan kantong air yang dekat dengan masyarakat sekitar Jakarta. "Cibubur dengan luas 210 hektar adalah hutan kota sebagai wilayah penyerapan air yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat," katanya.

Menjadi acara puncak yaitu pembagian 2.007 bibit pohon kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat lebih

FOTO: BOWO LEKSONO



peduli terhadap air dan konservasi lingkungan hidup. Sejumlah 500 bibit dibagikan kepada pengemudi yang

melewati jalan seputar Cibubur. Sisanya diserahkan ke sekolah-sekolah dan pengelola area rehabilitasi lahan kritis dan area hulu sungai.

Sementara Titie Sadarini, *Chief Operating Committee Coca-Cola Foundation Indonesia*, mengatakan dengan membagikan bibit pohon, pihaknya mengajak masyarakat untuk menanam pohon di lingkungan mereka agar membantu proses penyerapan air. "Dengan demikian, setiap individu dapat aktif berperan serta dalam usaha pengentasan masalah kelangkaan air," tuturnya.

Tak hanya di Jakarta. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Cinta Air ini juga digelar di beberapa wilayah di Semarang dan Surabaya. ■ BW

Bermain Sambil Belajar

Linawati, wanita yang berprofesi sebagai guru Biologi di SMAN 6 Bekasi itu tekun mengajak anak-anak didiknya untuk mencintai air. Ia mengajari bagaimana mengukur kandungan oksigen di air danau Cibubur saat perayaan Hari Air Sedunia yang digelar Coca-Cola Indonesia dan USAID.

"Hasilnya 1,7 mililiter per tiga menit," kata Tia Marianti, pelajar kelas II IPA setelah mengambil air di tengah danau ke dalam gelas ukur kemudian memasukkan tanaman jenis hidra. Guru pun menyimpulkan bahwa kandungan oksigen sedang. "Semakin banyak pohon yang tumbuh makin tinggi proses fotosintesa yang akan menghasilkan oksigen," tutur Linawati.

Sebagai pelajar, Tia merasa senang bisa turut merayakan Hari Air Sedunia. Ia yang biasanya hanya berkulat diseputar teori, kali ini bisa langsung praktek, mengamati kandungan oksigen dalam air. "Saya berke-

simpulan kalau kita sudah saatnya berhemat air. Caranya dengan memulai dari diri sendiri, seperti mandi menggunakan *shower*," ungkap dara berwajah hitam manis ini.

Para pelajar dari empat SMA di wilayah Bekasi itu diajak untuk peka terhadap lingkungan terutama terkait permasalahan air dan konservasi tanaman. Banjir yang dialami Jakarta atau tempat-tempat lain di Indonesia setiap tahun, sedikit banyak merupakan dampak ketidakpedulian masyarakat terhadap air dan konservasi lingkungan.

Kepada *Percik*, Triyono Prijosoessilo mengatakan kegiatan yang melibatkan pelajar SMA merupakan bagian Program Cinta Air dengan pendekatan edukasi berupa program *Go Green School (GGS)* atau program sekolah hijau. "Dengan melibatkan para remaja, diharapkan mereka menjadi generasi yang tahu arti penting air dan perlindungan lingkungan hidup," tegasnya. ■ BW

Air

untuk Kesehatan Lingkungan dan Manusia

The Environmental Services Program (ESP) yang didanai The United States Agency for International Development (USAID) bekerja sama dengan masyarakat Indonesia dan pemerintah setempat membuat program pencegahan penyebaran diare melalui peningkatan akses air bersih, pembangunan tangki septik komunal, perlindungan mata air, meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya mencuci tangan dengan sabun, mengamankan pengolahan dan penyimpanan air, dan pengumpulan sampah dengan mempromosikan komposting dan daur ulang.

ESP bekerja di daerah tangkapan air di tujuh provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta dengan total populasi lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa.

ESP melakukan pendekatan dari hulu ke hilir untuk menyatukan manajemen sumber daya air dengan peningkatan kesehatan, menciptakan sebuah pendekatan *Blue Thread* dengan air sebagai tema integrasi untuk menghubungkan kesehatan lingkungan dan manusia.

Dengan inisiatif masyarakat, ESP mendukung empat bidang teknis:

1. *Manajemen Batas Air dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*; Bersama pihak terkait ESP menstabilkan dan meningkatkan suplai air baku untuk penduduk kota di hilir.
2. *Penyediaan Pelayanan Lingkungan*; ESP membantu peningkatan



FOTO:ISTIMEWA

penyediaan air bersih, sanitasi, dan pelayanan manajemen sampah untuk daerah perkotaan dan sub-urban.

3. *Pendanaan Pelayanan Lingkungan*; ESP berusaha membantu pendanaan yang dibutuhkan untuk jangka panjang dan menengah bagi masyarakat maupun sektor swasta untuk menstimulasi investasi dalam produksi dan distribusi air bersih seperti dalam hal pengembangan sistem penyaluran air kotor.
4. *Strategi Komunikasi untuk Perubahan Perilaku*; ESP bekerja sama dengan jaringan media lokal mengangkat kepedulian dan wacana tentang isu-isu penting air, lingkungan dan kesehatan melalui kampanye tetap multi-media.

Dari tujuh provinsi yang menjadi daerah kerja ESP, di setiap provinsi

tersebut ESP menerapkan pendekatan terpadu untuk membawa empat aspek teknik secara bersamaan dalam mendukung inisiatif berbasis masyarakat di lokasi atau masyarakat yang spesifik.

Pendekatan terpadu ESP terdiri dari *Blue Thread*, *Clean-Green-Hygiene*, dan *Water for The Poor*.

Blue Thread

Pendekatan *Blue Thread* ESP menggunakan penyediaan air baku sebagai jalan masuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengembalikan serta mempertahankan ekosistem yang menyediakan air sebagai sumber kehidupan masyarakat. ESP membantu menciptakan jaringan masyarakat, dari hulu ke hilir, yang mampu berbicara dan bertindak secara lokal untuk kepedulian daerah tangkapan air secara luas.

Staf lapangan ESP membantu ma-

syarakat mengidentifikasi tindakan yang bisa mereka ambil untuk melindungi daerah tangkapan air yang menjadi sumber air. Dengan dukungan ESP, sekarang masyarakat melindungi mata air, membangun kebun-kebun, dan menanam kembali lahan-lahan yang terdegradasi.

Clean Green Hygiene

Pendekatan *Clean Green Hygiene* menggunakan sanitasi dan sampah sebagai cara lain meningkatkan kesehatan masyarakat. Air buangan dan sampah rumah tangga mengandung kontaminan baik organik maupun non-organik dan juga bakteri pathogen sehingga memerlukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan.

Namun sayangnya, di sebagian besar wilayah Indonesia, tidak terdapat infrastruktur yang cukup yang dibutuhkan untuk pengolahan tersebut seperti sistem pengumpulan dan pembuangan sampah, serta instalasi pengolahan air buangan kota. Badan air seperti sungai, saluran irigasi, dan saluran drainase kerap dijadikan tempat pembuangan air buangan rumah tangga, sampah, buangan pertanian, dan juga buangan industri.

Tragisnya, namun sebenarnya sangat bisa dicegah, sebagai akibat dari kehidupan yang lekat dengan air buangan dan sampah yang tidak terolah adalah terdegradasinya badan air, timbulnya penyakit, meningkatnya biaya kesehatan, meningkatnya ketidakhadiran siswa di sekolah, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, dan sebagai batas akhirnya hilangnya nyawa manusia.

Program ini bekerja bersama masyarakat, pemerintah setempat, dan organisasi non-pemerintah untuk mengidentifikasi segala tindakan yang dapat diambil mereka sendiri, mulai dari kegiatan sederhana dan bekerja menuju pemecahan yang sangat kompleks, seperti membantu masyarakat mengi-



FOTO:ISTIMEWA

Dengan dukungan ESP, sekarang masyarakat melindungi mata air, membangun kebun-kebun, dan menanam kembali lahan-lahan yang terdegradasi.

identifikasi kondisi mereka saat ini dan bagaimana peluangnya.

Water for The Poor

Di daerah urban, ESP membangun kapasitas PDAM untuk melindungi sumber penyediaan air kota yang digunakan PDAM. Bantuan teknis secara lebih jauh diberikan berdasarkan permintaan hingga 30 PDAM. Berkisar dari studi kelayakan untuk peningkatan sumber air baku dan atau pengembangan jaringan distribusi.

Sehubungan peningkatan kapasitas teknis dan keuangan PDAM dan perlindungan sumber air baku, PDAM mendukung meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota dengan penekanan

terutama pada masyarakat miskin yang tidak terlayani. Prinsip yang dipegang ESP dalam meningkatkan akses untuk masyarakat miskin yaitu keluarga miskin bisa membayar tarif normal PDAM sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan dan memberikan kondisi pembayaran yang fleksibel (penarikan tarif secara harian oleh organisasi masyarakat setempat daripada secara bulanan di kantor PDAM).

Daripada memaksa PDAM membangun lebih banyak lagi kran umum yang tidak terpantau, di mana PDAM dan masyarakat miskin kehilangan air dan uang, ESP mengadakan program menggerakkan masyarakat di sekitar kran umum dan sudah memulai program baru penggabungan meteran pribadi dan umum untuk sekelompok keluarga miskin di lokasi metropolitan yang berbeda di Indonesia.

Keseluruhan di atas merupakan upaya ESP membantu Indonesia dalam usahanya mencapai MDG terkait kegiatan peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua. ■

FN

Evaluasi Persepsi terhadap Kegiatan Fasilitasi Adopsi dan Implementasi Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di 7 Provinsi Melalui Proyek WASPOLA

Masalah keberlanjutan sarana air minum dan sanitasi yang dibangun melalui berbagai proyek, menjadi perhatian banyak pihak. Dalam era desentralisasi, pembangunan sarana air minum dan sanitasi merupakan kewajiban daerah. Kewajiban pemerintah pusat lebih dibatasi pada bimbingan, bantuan teknis, dan penyediaan pedoman serta arahan.

Upaya pemerintah dalam pengembangan kebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi), merupakan tanggung jawab yang harus ditindaklanjuti di tingkat daerah. Setelah proses formulasi kebijakan selesai tahun 2003, dan kemudian diterapkan pada 7 provinsi, selanjutnya perlu diterapkan di daerah yang lebih luas.

Penelitian ini mengkaji respon pemerintah daerah di 7 provinsi-yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo-terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Dengan mengukur tingkat penerimaan responden terhadap logika kebijakan, diketahui rata-rata persepsi responden terhadap kebijakan.

Pengukuran persepsi responden terhadap kebijakan menggunakan skala 1-4, nilai 1 untuk tidak bisa diterima, 2 kurang bisa diterima, 3 untuk bisa diterima, dan 4 sangat bisa diterima. Adapun responden adalah para pejabat dan staf dinas/instansi terkait dengan sektor pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah, yang sehari-hari bertanggung jawab dalam



pengelolaan pembangunan sektor tersebut. Berdasarkan teori kebijakan, diterimanya logika kebijakan, merupakan prasyarat untuk kebijakan dapat diterapkan.

Penelitian menunjukkan bahwa 11 pernyataan kebijakan, baik secara individu maupun gabungan menunjukkan nilai rata-rata 3,31. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan logika kebijakan berkisar diantara bisa diterima dan sangat bisa diterima. Walaupun demikian, rata-rata persepsi responden terhadap penerapan kebijakan nilainya lebih rendah, yaitu sebesar 2,98. Angka ini menunjukkan kemungkinan penerapannya sedikit di bawah bisa diterapkan. Perbedaan rata-rata penerimaan logika dan kemungkinan penerapannya, memberi indikasi banyaknya hambatan yang dihadapi oleh kebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah.

Penelitian ini juga mengkaji kinerja daerah yang mendapatkan fasilitasi kebijakan melalui proyek WASPOLA

sejak tahun 2005. Dilakukan pengukuran persepsi responden terhadap delapan indikator: i) koordinasi pembangunan AMPL antar dinas, ii) pengetahuan dan pemahaman terhadap pendekatan pembangunan partisipatif khususnya dalam bidang AMPL, iii) prioritas pembangunan AMPL berbasis partisipasi masyarakat, iv) pelibatan *stakeholder* di luar pemerintah dalam pembangunan AMPL berbasis partisipasi masyarakat, v) alokasi anggaran daerah pembangunan fisik AMPL berbasis partisipasi

masyarakat, vi) alokasi anggaran daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan AMPL berbasis partisipasi masyarakat, vii) produk peraturan yang mendukung pembangunan AMPL berbasis partisipasi masyarakat, viii) produk perencanaan yang mendukung pembangunan AMPL berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan mengukur persepsi responden terhadap kondisi sebelum dan sesudah fasilitasi, diperoleh data kecenderungan yaitu: i) berubah ke arah yang lebih baik, ii) tidak berubah, dan iii) berubah ke arah yang lebih buruk. Dengan analisis statistik nonparametrik menggunakan uji Mc Nemar, diperoleh nilai Chi Square secara keseluruhan sebesar 81,275. Angka ini lebih besar dari nilai Chi Square tabel sebesar 3,481 untuk derajat bebas 1 dan taraf signifikansi 5%. Artinya bahwa fasilitasi kebijakan menurut responden telah memberikan perubahan yang positif. ■

Dirangkul dari Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, oleh Sofyan Iskandar

Majalah *Percik* bekerja sama dengan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia, membuka rubrik Klinik. Rubrik ini berisi tanya jawab tentang air minum dan penyehatan lingkungan.

Air Minum

Pertanyaan :

Bagaimana cara menentukan dosis koagulan yang benar di Instalasi Pengolahan Air (IPA) ?

Seto, Bandung

Jawaban :

Koagulan yang sering digunakan di Indonesia adalah alum atau aluminium sulfat atau $Al_2(SO_4)_3$. Dosis koagulan dapat ditentukan dengan percobaan di laboratorium dengan piranti yang dikenal sebagai *jar test*. Dosis koagulan sangat ditentukan oleh kualitas air (turbiditas, partikel tersuspensi, jumlah senyawa organik, dan pH), kualitas koagulan (kemurnian dan ukuran butiran), kualitas pengoperasian di IPA (persentase larutan koagulan, teknik pembubuhan, dan intensitas pengadukan), serta kualitas akhir air terolah (khususnya turbiditas dan partikel tersuspensi yang ingin disisihkan).

Dalam pengujian dengan menggunakan *jar test*, umumnya dilakukan pembubuhan koagulan dengan variasi dosis (antara 30 - 80 mg/l) yang diaduk dengan pengadukan cepat (kecepatan 100 rpm) selama 1 menit dan dilanjutkan dengan pengadukan lambat (kecepatan 60 rpm) selama 10 - 20 menit. Kecepatan 100 rpm dijadikan sebagai model pengadukan cepat di IPA (proses koagulasi) serta kecepatan 60 rpm dijadikan model sebagai pengadukan lambat di IPA (proses flokulasi).

Setelah pengadukan lambat, *jar test* dimatikan selama 20 - 30 menit (model proses sedimentasi), untuk kemudian dilihat kualitas flok yang terbentuk. Dan yang diukur adalah kecepatan endap flok (kedalaman gelas *jar test* terhadap waktu endap hingga ke dasar gelas *jar*

test), bentuk flok yang terjadi (padat atau tidak padat), turbiditas dan partikel tersuspensi yang bisa tersisihkan setelah pengadukan.

Variasi dosis dilakukan dengan kisaran yang tersebut di atas untuk menentukan dosis koagulan optimum. Ada batasan tertentu pada suatu dosis yang tinggi, justru turbiditas dan partikel tersuspensi yang tersisa dalam air akan meningkat. Hal ini merupakan tanda bahwa dosis koagulan terlalu tinggi (berlebih) dan dosis optimum akan lebih rendah dari dosis berlebih tersebut. Untuk kualitas air permukaan rata - rata di Indonesia (air keruh), umumnya dosis koagulan ($Al_2(SO_4)_3$) adalah 40 - 50 mg/l.

Drainase

Pertanyaan :

Apakah keuntungan penggunaan drainase yang menggunakan atau tidak menggunakan pembetonan di dasar saluran drainase ?

Rama, Kupang

Jawaban :

Drainase ditujukan untuk mengalirkan air secepat mungkin dari lokasi tersebut untuk mencegah penggenangan (banjir). Penggunaan saluran yang memiliki koefisien kekasaran rendah (seperti beton, dengan koefisien kekasaran Manning = 0.013) dapat mempercepat aliran air untuk dapat diteruskan ke saluran yang lebih besar. Namun dengan pemanfaatan saluran yang tidak dibeton (menggunakan vegetasi atau bidang resapan di dasar saluran), akan meningkatkan jumlah air yang dapat masuk ke dalam air tanah (*infiltrasi*) ketimbang mengalirkannya ke badan sungai (*run off*).

Dengan menggunakan bidang resapan tersebut, maka cadangan air tanah dapat ditingkatkan sebagai konservasi air tanah (air hujan akan terkonversi menjadi air tanah dan tidak menjadi air permukaan). Hal ini menjadikan peluang air tersebut untuk terkontaminasi zat - zat pencemar menjadi lebih kecil (karena air permukaan relatif lebih mudah terkontaminasi ketimbang air tanah). ■ Sandhi Eko Bramono, S.T., MEnvEngSc

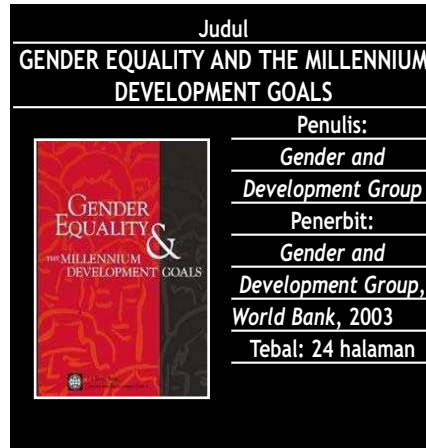
FOTO:RESKI DD



Kesetaraan Gender dan MDGs

Sepererti diketahui, pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) di target pada tahun 1015. Masih banyak negara, terutama negara-negara miskin, yang masih jauh dari target pencapaian diberbagai bidang. Bahkan cenderung ada kemunduran dalam pencapaiannya.

Proyek MDGs ini berdasarkan kesepakatan 198 pemimpin dunia pada September 2000 untuk bersama menanggulangi masalah yang dihadapi sebagian besar negara berkembang di dunia. Masalah-masalah itu seperti kemiskinan, buta huruf, kelaparan, tingginya angka kematian bayi, kekurangan pendidikan, dan kekurangan air minum dan sanitasi.



Makalah ini diterbitkan oleh *Gender and Development* (Kelompok Pembangunan dan Gender) dari Bank Dunia (*World Bank*). Menyajikan gambaran

dasar kesetaraan gender dan menilai hubungan antara kesetaraan gender dengan MDGs terutama dalam bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan gizi, serta lingkungan.

Dilengkapi data-data berupa diagram pencapaian target yang dapat dilihat dari perbedaan jenis kelamin. Disamping dihiasi ilustrasi berupa foto-foto menarik tentang peran perempuan di beberapa Negara.

Kesetaraan gender tidak untuk dijadikan angan-angan semata dan yang lebih penting adalah mewujudkannya. Peran perempuan sangat penting karena dekat dengan bidang-bidang seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan gizi, serta lingkungan. ■ **BW**

Panduan Implementasi Kebijakan Berbasis Gender

Proyek-proyek penyediaan air dan sanitasi yang ditangani ADB lebih dari beberapa dekade terakhir telah membuktikan adanya hubungan positif yang kuat antara perhatian pada gender dan partisipasi kaum perempuan di satu pihak dengan tingkat keberhasilan proyek dan kesinambungan pengelolaan penyediaan air dan sanitasi di lain pihak.

Kaum perempuan merupakan kolektor, pengangkut, pengguna, dan pengelola utama air untuk keperluan rumah tangga dan sebagai promotor dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi di rumah dan di masyarakat. Namun, kebanyakan masyarakat, pandangan kaum perempuan tidak terwakili secara sistematis dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan. Proyek penyediaan air dan sanitasi memberikan kesempatan-kesempatan yang luas untuk mempersempit kesenjangan ini.

Tujuan dari buku yang berupa daftar



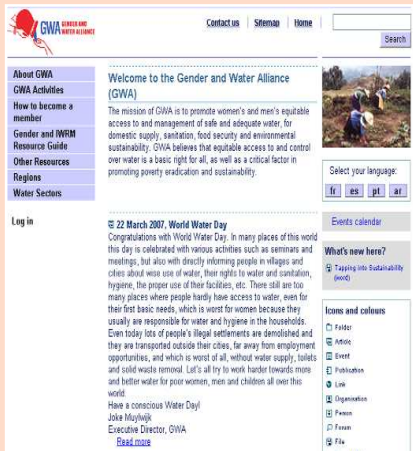
periksa ini untuk membantu para staf dan konsultan ADB dalam mengimplementasikan kebijakan dan sasaran-sasaran strategis ADB dalam hal gender dan pembangunan atau *Gender of Development* (GAD).

Disamping tujuan, buku ini mempertanyakan seberapa penting gender dalam

proyek penyediaan air dan sanitasi serta langkah utama dalam siklus proyek. Juga dibahas contoh *terms of reference* (TOR) untuk spesialis gender.

Daftar periksa ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para pengguna pada seluruh tahapan siklus proyek/program dalam menentukan akses terhadap sumber daya-sumber daya, peran-peran dan tanggung jawab, hambatan dan prioritas-prioritas berdasarkan gender dalam penyediaan air dan sanitasi dan dalam mendesain strategi-strategi yang peka gender, komponen-komponen dan indikator-indikator untuk merespon isu-isu gender.

Daftar periksa ini terutama dibuat untuk proyek-proyek penyediaan air dan sanitasi di perdesaan dan untuk proyek perkotaan yang berbasis masyarakat. Walaupun banyak isu dan metodologi yang dipaparkan buku ini, namun secara umum diterapkan pada seluruh proyek penyediaan air dan sanitasi. ■ **BW**



GENDER AND WATER ALLIANCE (GWA)
www.genderandwater.org

Melalui situs ini pengunjung dapat menemukan informasi penting terkait mengenai gender. Bentuk informasi yang disajikan diantaranya berupa studi kasus, publikasi, bulletin, Deklarasi, materi pelatihan, link. Beberapa publikasi menarik yang dapat ditemukan disini antara lain mengetengahkan topik *Advocacy Manual for Gender and Water Ambassadors*; *For Her-It's The Big Issue: Putting Women at The Center of Water Supply; Sanitation, and Hygiene*; *Gender, Water and Sanitation: a Policy Brief*; *The Gender Approach to Water Management; MDG, Gender & Water*.

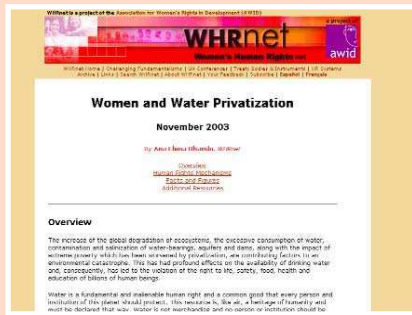
GWA merupakan suatu jaringan global yang didedikasikan untuk mempopulerkan masalah gender dalam sektor pengelolaan sumber daya air. GWA dikelola oleh suatu komite pengarah yang dipilih setiap dua atau tiga tahun. GWA merupakan program asosiasi dengan Global Water Partnership (GWP)

WOMAN HUMAN RIGHT NET (WHRNET)
www.whrnet.org/docs/issue-water.html

Di dalam situs ini pengunjung dapat memperoleh informasi yang ber-

kaitan dengan Perempuan dan Privatisasi Air. Secara jelas tertulis latar belakang dari dibuatnya tulisan tersebut, hubungannya dengan hak asasi manusia dan tambahan berbagai alamat-alamat situs lain yang dapat mendukung informasi berkaitan dengan tulisan tersebut.

Situs ini milik WHRnet yaitu suatu proyek yang dikelola oleh Association for Women's Rights in Development (AWID).



GENDER EQUALITY AND THE MILLENNIUM DEVELOPMENT
www.mdgender.net

Situs ini berfungsi sebagai sumber informasi yang mempromosikan pengertian yang lebih baik dan berbagai piranti yang sarannya untuk mencapai persamaan gender. Disini tersedia beragam materi publikasi dalam bentuk buku, laporan, makalah, artikel, naskah pidato. Selain itu juga terdapat piranti yang dapat digunakan untuk isu-isu persamaan gender. Beberapa topik publikasi menarik yang dapat diperoleh disini antara lain: *A Change of Course, The Millennium Development Goals Through the Lens of the Women's Global Charter for Humanity, Taking Actions: Achieving Gender Equality and Empowering Women, Mainstreaming Gender to Achieve the MDGs: Summary Record*.

Situs ini merupakan usaha kolaborasi antara UN Inter-Agency Network

on Women and Gender Equality, the OECD/DAC Network on Gender Equality dan Multilateral Development Bank Working Group on Gender. ■



ELDIS GENDER RESOURCE GUIDE
www.eldis.org/gender

Di dalam situs ini terdapat berbagai tulisan yang berkaitan dengan gender, antara lain *Gender and Integrated Water Resources Management; Gender and Participation; Gender Health and Wellbeing; Gender and Poverty Redction Strategies; Gender Focused Manuals and Toolkits; gender; Conflicts and Emergencies* dan masih banyak lagi topik menarik lainnya. Tulisan tersebut dapat dibaca teks lengkapnya dalam bentuk pdf.

Situs ini milik Eldis. Eldis merupakan suatu resource center yang berada di bawah Institute of Development, Sussex, Inggris. Eldis didanai oleh Sida, NORAD, DFID dan CDC. ■



Perjalanan Masyarakat NTT Memperoleh Air Bersih

Perempuan-perempuan desa bersama anak-anak mereka berjalan berurutan, menelusuri bukit terjal dan lembah tandus. Perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup. "Kami melakukan ini sehari dua kali, pagi dan sore. Berjalan dari rumah hingga ke sumber air," ujar seorang ibu di salah satu desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebuah gambaran nyata yang dikemas apik berupa film dokumenter bertajuk "Sulitkah Memperoleh Air Bersih?" berisi perjuangan bagaimana masyarakat NTT kesulitan dalam mengakses air bersih karena kelangkaan sumber air baku ditambah curah hujan yang sedikit.

Realita hidup yang 'nelangsa' ini terjadi sebelum Proair (program air bersih) yang merupakan kerjasama Peme-



rintah Indonesia dengan Pemerintah Federal Jerman masuk ke wilayah timur Indonesia.

Tayangan VCD (*video compact disc*) berdurasi 30 menit ini merupakan perjalanan masyarakat kecil di pelosok sampai akhirnya mereka melakukan

langkah-langkah kerjasama dengan Proair untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air bersih.

Dan yang menarik, salah satu syarat kerjasama dengan Proair ini adalah keterlibatan perempuan. Kaum perempuan disadari sebagai pelaku utama ketersediaan air dalam rumah tangga. Terlihat dalam tayangan bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif dalam mengelola sarana air minum.

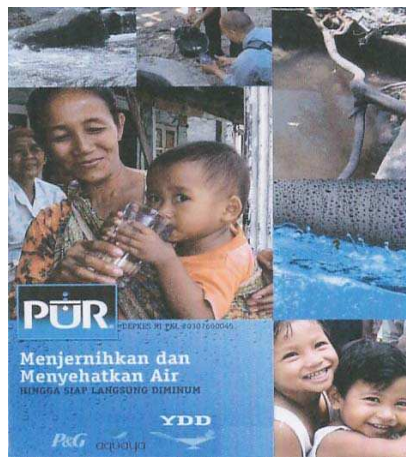
Sebagai sebuah media promosi, film dokumenter berdurasi pendek yang diproduksi Proair ini cukup mengena karena mengedepankan potensi lokal, seperti lokasi, adat istiadat, serta musik yang khas sehingga dekat dengan masyarakatnya. Secara struktur juga mudah untuk diikuti. Namun masih ada beberapa adegan yang terkesan *bertele-tele* sehingga tayangan yang cuma setengah jam ini terasa lambat. ■ BW

Cara Baru Mendapatkan Air Bersih Siap Minum

Film sebagai sebuah hasil karya audiovisual dinilai sangat ampuh dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Karena itu, tayangan iklan berlatar komersil atau sebuah layanan masyarakat harus dikemas semenarik mungkin.

Cara ini dilakukan Yayasan Dian Desa dalam melakukan sosialisasi produk berupa PUR (*purifier of water*) untuk menjernihkan air keruh sekaligus mematikan bakteri sehingga air bisa langsung dikonsumsi.

Produk ini berupa bubuk dari bahan campuran yang dapat mematikan bakteri patogen dan menghilangkan zat padat dalam air sehingga menjadi jernih.



Film pendek berdurasi delapan menit ini dibuka dengan sebuah frag-

men. Dalam fragmen itu dikenalkan bagaimana keunggulan dan cara penggunaan serbuk PUR untuk mendapatkan air bersih.

Penggunaan serbuk ini sangat cocok untuk daerah yang sumber mata airnya tidak jernih atau daerah yang kerap terkena bencana banjir. Metode efektif, aman dan hemat dijadikan kelebihan dari produk ini.

Tayangan ini sangat menarik karena pengambilan gambar yang tidak membosankan dan proses editing yang baik. Apalagi dengan memasang pemain yang cukup dikenal masyarakat luas, seperti Cici Tegal. Tentu akan menambah ketertarikan orang untuk menyaksikannya. ■ BW

LAPORAN

**LEMBARAN INFORMASI ACCESS SEBAGAI PEN-
DUKUNG PENGINTEGRASIAN GENDER
DAN KEMISKINAN**

Penerbit: ACCESS

**WORKSHOP ON THE SOLID WASTE
MANAGEMENT PILOT PROJECT AND
ITS SOCIO-ECONOMIC COMPONENTS**

Penerbit: Cal Recovery Europe
Ltd, 2006

**LAPORAN STUDI SANITASI MASYA-
RAKAT BERPENGHASILAN REN-
DAH (MBR) DI PERKOTAAN GAM-
BARAN UMUM NASIONAL**

Penerbit: PT Waseco Tirta Association
with BaliFokus - WSP, 2006

**PELIBATAN PUBLIK DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN**

**CATATAN PENGALAMAN PEMBANGUN-
AN PRASARANA SUMBER DAYA AIR**

Penerbit: Tim Advokasi Kebijakan Publik, 2005

**WATER AND CULTURE: AIR DI TANAH
KAMI (WATER IN OUR LAND)**

Penerbit: Tirta Dharma - PDAM Kota
Surakarta

**INSTALASI PENGOLAHAN AIR GAMBUT UNTUK
PENYEDIAAN AIR MINUM**

Penerbit: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pengairan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum,
Departemen Pekerjaan Umum, 1994

**ECOLOGICAL NETWORKS AND GREENWAYS: CONCEPT, DESIGN,
IMPLEMENTATION**

Penerbit: Cambridge University Press, 2004

WATER CRISIS: MYTH OR REALITY?

Penerbit: Taylor & Francis / Balkema, 2006

ULTRAVIOLET LIGHT IN WATER AND WASTEWATER SANITATION

Penerbit: Lewis Publishers, 2002

**WORLD WATER RESOURCES AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY -
INTERNATIONAL HYDROLOGY SERIES**

Penerbit: Cambridge University Press - Unesco, 2003

PERATURAN

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.
294/PRT/M/2005 TENTANG BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SIS-
TEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23
TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN
AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAER-
AH AIR MINUM**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEREN-
CANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAP-
PENAS NO. 005/M.PPN.06/2006
TENTANG TATA CARA PEREN-
CANAAN DAN PENGAJUAN
USULAN SERTA PENILAIAN KE-
GIATAN YANG DIBIAYAI DARI PIN-
JAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR
NEGERI**

BUKU

**STATISTIK LINGKUNGAN HI-
DUP INDONESIA (ENVIRONMEN-
TAL STATISTICS OF INDONESIA)
2005**

Penerbit: Badan Pusat Sta-
tistik, 2006

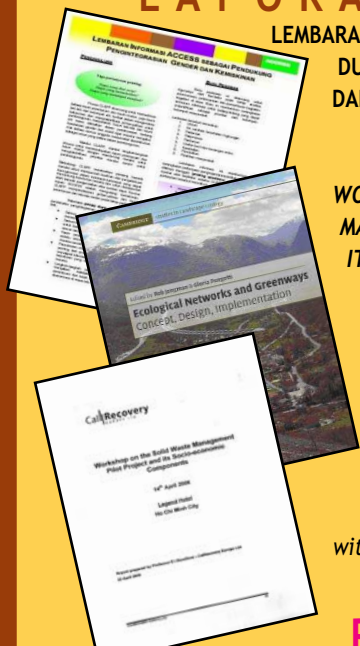
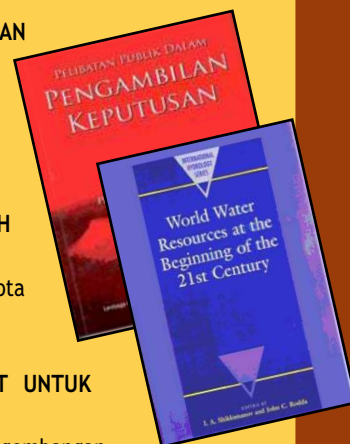
MAJALAH

**MAJALAH PERCIK JUNIOR,
Edisi I, Januari 2007**

**MAJALAH PERCIK,
Edisi Desember 2006,
versi Bahasa Inggris**

**MAJALAH KOMBINASI,
(Komunitas Membangun Ja-
ringan Informasi)
Edisi 19, Maret 2007**

**MAJALAH AIR MINUM
Edisi bulan Maret 2007**



AGENDA

TANGGAL	BULAN	KEGIATAN
16	Januari	Diskusi Terbatas: "Mengurai Benang Kusut Privatisasi Air di Jakarta" diselenggarakan oleh Koalisi Hak Rakyat Atas Air (KruHa) di Jakarta
17	Januari	Workshop Minimasi Sampah Perkotaan, diselenggarakan oleh WJEMP di Jakarta
18-19	Januari	Lokakarya Evaluasi ISSDP, diselenggarakan oleh Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) di Purwakarta
18	Januari	Media Discussion "Memerangi Diare Melalui Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi" diselenggarakan oleh ESP-USAID di Jakarta
18-19	Januari	Lokakarya Konsolidasi dan Pemantapan Kerja ISSDP di Jakarta
23-24	Januari	Lokakarya Proyek Gates Foundation diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Surabaya
24	Januari	Rapat Finalisasi Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Peningkatan Kapasitas Implementasi Kebijakan AMPL-BM diselenggarakan oleh WASPOLA di Jakarta
29	Januari	Lokakarya Keberlanjutan Air Baku PDAM diselenggarakan atas kerjasama Bappenas dengan Universitas Merdeka Malang di Malang
29-30	Januari	Workshop Kondisi Sanitasi Kota Metropolitan dan Kota Besar di Indonesia diselenggarakan oleh Ditjen. Cipta Karya Dep. PU di Jakarta
30	Januari	Persiapan Konferensi Sanitasi Indonesia 2007 diselenggarakan oleh ISSDP di Jakarta
31	Januari	Lokakarya Data AMPL, diselenggarakan atas kerjasama UNICEF dan Pokja AMPL di Jakarta
31	Januari	Rapat Koordinasi Rencana Program Sanitasi Permukiman di Surabaya
5-8	Februari	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ProAir, diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Kab.Ende
6-9	Februari	Lokakarya Nasional Konsolidasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM diselenggarakan oleh WASPOLA di Semarang
13	Februari	Working Group Meeting: "Diskusi Kegiatan Air dan Sanitasi Pasca 2007" diselenggarakan oleh Ausaid bekerjasama dengan Pokja AMPL dan WASPOLA di Jakarta
16	Februari	Rapat Pembahasan WASAP Komponen E- Water & Sanitation Monitoring, diselenggarakan oleh ISSDP di Jakarta
20	Februari	Rapat Koordinasi Kerjasama Indonesia-UNICEF, diselenggarakan oleh UNICEF dan Pokja AMPL di Jakarta
22	Februari	Open House Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, diselenggarakan oleh ISSDP bekerjasama dengan Pokja AMPL dan WASPOLA di Jakarta
22-23	Februari	Lokakarya Penguatan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Propinsi NTT, diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Kupang
23	Februari	Seminar: "Urgensi Peningkatan Anggaran Negara Untuk Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Akan Air", diselenggarakan oleh LP3ES di Jakarta
26-28	Februari	CWSH Supervision Mission, diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Aceh
26	Februari	Rapat UNICEF-POKJA AMPL di Jakarta
27	Februari	Workshop Membangun Jejaring Komunikasi AMPL, diselenggarakan oleh Pokja AMPL bekerjasama dengan WASPOLA, Forkami, Jaringan Air dan Sanitasi (JAS) serta ISSDP di Jakarta
28	Februari	Lokakarya Koordinasi dan Perencanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Propinsi NTT, diselenggarakan oleh UNICEF bekerjasama dengan Pokja AMPL di Kupang
2	Maret	Working Group Briefing, diselenggarakan oleh Ausaid bekerjasama dengan Pokja AMPL dan WASPOLA di Jakarta
5	Maret	Dialog Penajaman Konsumsi Air di Indonesia, diselenggarakan oleh Ditjen. Cipta Karya Dep.PU di Jakarta
5	Maret	Pertemuan Penjelasan BRI Tentang Program Pendanaan yang Sesuai dengan Program ESP, diselenggarakan oleh ESP-USAID di Jakarta
5-6	Maret	CWSH Supervision Mission, diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Kalimantan Tengah
5-6	Maret	Sosialisasi Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007 diselenggarakan oleh Sekjen Dep.PU di Jakarta
6-8	Maret	CWSH Supervision Mission, diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Nias-Sumut
8	Maret	Workshop Penyusunan Profil ke-PLP-an Bidang Persampahan, diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya Dep.PU di Jakarta
5-9	Maret	Orientasi Kelembagaan Pasca Konstruksi Bagi TKK dan TKP WSLIC-2 Tahun 2007 diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Mataram
9	Maret	Sosialisasi Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, diselenggarakan oleh WASPOLA di Banten
13	Maret	Workshop Best Practices Dalam Pengelolaan Persampahan Dalam Rangka Regional Initiative on Environment & Health ASEAN & East Asian Countries diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya Dep.PU di Jakarta
14	Maret	Workshop Membahas Perkuatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Persampahan diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya di Jakarta
12-14	Maret	Pelatihan Produksi Media AMPL, diselenggarakan oleh WASPOLA di Yogyakarta
14-17	Maret	Finalisasi Panduan Operasionalisasi Kebijakan AMPL, diselenggarakan oleh WASPOLA di Yogyakarta
16-17	Maret	Pertemuan Penyempurnaan Pedoman Umum Program Air Bersih dan Sanitasi Pedesaan, diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes di Prop. NTT
18	Maret	Program Cinta Air: Pembagian Bibit Pohon, diselenggarakan oleh ESP-USAID di Cibubur
20	Maret	Diskusi dan Kunjungan Media Memperingati Hari Air Sedunia 2007, diselenggarakan oleh Pokja AMPL bekerjasama dengan WASPOLA, Forkami dan ESP di Jakarta
20-23	Maret	Fasilitasi Pokja Sumba Timur, diselenggarakan oleh WASPOLA di Waingapu
21-23	Maret	Basic Fasilitator, diselenggarakan oleh WASPOLA di Kebumen
22	Maret	Talkshow TV Memperingati Hari Air Sedunia dalam acara Selamat Pagi di Stasiun Trans TV Jakarta
22	Maret	Talkshow Radio Memperingati Hari Air Sedunia, Bertema Kelangkaan Air Baku: Tantangan dalam Penyediaan Air Minum untuk Perkotaan disiarkan dalam acara Indonesia Siesta di Radio Delta FM Jakarta
23	Maret	Persiapan Pelaksanaan WASAP Komponen D-Sanitation City Pilot, diselenggarakan oleh ISSDP di Jakarta
26-27	Maret	Lokalah Fasilitasi, diselenggarakan oleh WASPOLA di Semarang
27-30	Maret	Lokakarya Sanitasi Enam Kota SSDP II, diselenggarakan oleh ISSDP di Blitar, Jatim
28-29	Maret	Lokalah Fasilitasi, diselenggarakan oleh WASPOLA di Brebes, Jateng
30	Maret	Rapat Kelanjutan Kegiatan Small Scale Independent Water Providers Study, diselenggarakan oleh WASPOLA di Jakarta



**Demi
Generasi
Mendatang.....**

**Selamatkan
Sumber Air
SEKARANG JUGA!**